

PEMERINTAH KOTA TERNATE



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2011

DAFTAR ISI

IKHTISA	R EKSEKUTIF
DAFTAR	ISI
BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	PERENCANAAN STRATEJIK
	A. RENCANA STRATEJIK a. Visi
	B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2011
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
	A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJAa. Penetapan Kategori Nilai Capaian
	b. Pengukuran Kinerja
	B. ANALISA CAPAIAN KINERJA C. ANALISA TREND CAPAIAN KINERJA D. AKUNTABILITAS KEUANGAN
BAB IV	PENUTUP
Lampi	r a n

Ikhtisar Eksekutif Hal- i

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kota Ternate tahun 2011, disusun mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Ternate tahun 2011-2015, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Ternate tahun 2011 dan Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Ternate Tahun 2011. LAKIP Pemerintah Kota Ternate tahun 2011, dibuat untuk mempertanggungjawabkan kinerja sebagaimana yang diwajibkan pada Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota wajib menyusun laporan akuntabilitas kinerja.

Kinerja Pemerintah Kota Ternate yang diukur dan dievaluasi dalam LAKIP Pemerintah Kota Ternate tahun 2011 adalah indikator kinerja sasaran sesuai dengan penetapan kinerja Pemerintah Kota Ternate tahun 2011. Indikator kinerja sasaran Pemerintah Kota Ternate tahun 2011 memberikan kontribusi langsung pada pencapaian sasaran dan tujuan Pemerintah Kota Ternate tahun 2011.

Hasil pengukuran dengan menggunakan skala ordinal, menunjukkan bahwa Kinerja Pemerintah Kota Ternate tahun 2011 berada pada kategori **Sangat Berhasil**. Hal tersebut terlihat dari hasil pengukuran penetapan kinerja Pemerintah Kota Ternate tahun 2011, sebanyak 11 sasaran dengan jumlah indikator kinerja sasaran yang ditetapkan sebanyak 204 indikator, 193 (94,61%) indikator kinerja sasaran mencapai hasil optimal (≥ 80%). Namun demikian, terdapat 11 (5,39%) indikator kinerja sasaran Pemerintah Kota Ternate tahun 2011 yang nilai capaiannya kurang optimal (< 80%) yaitu:

- 1. Persentase peningkatan jumlah koleksi buku di perpustakaan daerah, nilai capaian 61,86%;
- 2. Peningkatan pelayanan dokter dan perawat, nilai capaian 73,79 %;
- 3. Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup, nilai capaian 61,54%;
- 4. Angka kematian ibu per 1.000 kelahiran hidup, nilai capaian 60,00%;
- 5. Penderita Malaria *Annual Malaria Incidence* (AMI) nilai capaian 34,48% dan *Annual Parasite Incidence* (API) nilai capaian 50,00%;
- 6. Angka kesakitan DBD/100.000 Jiwa, nilai capaian 76,00%;

- 7. Persentase penyelesaian temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Ternate, nilai capaian 26,20%;
- 8. Tingkat Inflasi, nilai capaian 49,33%;
- 9. Rasio keluarga ber-KK, nilai capaian 76,13%;
- 10. Rasio bayi berakte kelahiran, nilai capaian 47,00%; dan
- 11. Penyelesaian masalah hukum Pemda Kota Ternate, nilai capaian 66,00%

Kelemahan tersebut diatas, diprioritaskan untuk segera dibenahi dengan memperhatikan faktor-faktor penyebabnya. Dengan memperhatikan keberhasilan yang telah dicapai maupun kekurangan/kelemahan sebagaimana tergambar dalam akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Ternate tahun 2011, maka hal tersebut akan dijadikan umpan balik untuk lebih meningkatkan kinerja aparatur Pemerintah Kota Ternate kedepan guna peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat dengan mengedepankan prinsip-prinsip Good Governance.

Ternate, 22 Maret 2011

Walikota Ternate

urhan Abdurahman S.H., M.M.

BABI

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pelaporan merupakan fase yang sangat penting dalam siklus manajemen. Dalam manajemen moderen, pelaporan merupakan fase terakhir yang dijadikan instrumen untuk evaluasi guna perbaikan manajemen itu sendiri.

INPRES Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, telah mewajibkan setiap penyelenggara Negara untuk membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, ditegaskan bahwa Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota wajib menyusun laporan akuntabilitas kinerja.

Laporan akuntabilitas adalah merupakan media pertanggungjawaban kepada publik atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab instansi pemerintah yang dibuat setiap berakhirnya tahun anggaran, yang didasarkan pada perencanaan stratejik yang telah ditetapkan untuk dicapai.

Laporan akuntabilitas kinerja adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja intansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LAKIP Pemerintah Kota Ternate tahun 2011, berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Kota Ternate sebagai daerah otonom, mempunyai hak untuk menyelenggarakan otonomi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, juga mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kewenangan yang diberikan. Salah satu

media pertanggungjawaban tersebut adalah LAKIP yang dibuat setiap berakhirnya tahun anggaran.

B. GAMBARAN SINGKAT KOTA TERNATE

a. Yuridis

Secara yuridis peningkatan status Kota Ternate dari Kota Administratif Ternate menjadi Kotamadya Ternate didasarkan pada Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 1999 tanggal 27 April 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Ternate. Aktivitas pemerintahan dan kemasyarakatan di Kota Ternate pada awal pembentukannya, secara administratif dibagi menjadi 3 Kecamatan dan terdiri dari 58 Desa/Kelurahan. Dinamika pelaksanaan pembangunan secara sinergis antara Pemerintah Daerah dan masyarakat telah membawa perubahan yang ditandai perkembangan dan kemajuan di berbagai aspek. Dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang dan pertimbangan rentang kendali pemerintahan, wilayah tertentu dimana memungkinkan perkembangannya dipandang untuk ditingkatkan status administrasinya seperti Moti, terkait dengan itu, Pemerintah Daerah mengeluarkan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan Moti yang sebelumnya merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Pulau Ternate. Sebagai konsekuensi pelaksanaan Perda dimaksud, 4 (empat) Desa yang ada di Moti dimekarkan dan ditingkatkan statusnya menjadi 6 (enam) Kelurahan.

Perkembangan lain yang dicapai dari segi administrasi pemerintahan adalah dimekarkannya 2 (dua) Kelurahan di Batang Dua, Kecamatan Pulau Ternate menjadi 5 (lima) Kelurahan, melalui Peraturan Daerah No. 13 tahun 2003 tentang Pembentukan Kelurahan Lelewi, Bido dan Pantai Sagu.

Selanjutnya pada akhir tahun 2007 Kota Ternate dimekarkan menjadi 6 Kecamatan, yaitu Kecamatan Ternate Utara, Kecamatan Ternate Selatan, Kecamatan Pulau Ternate, Kecamatan Moti, Kecamatan Batang Dua dan Kecamatan Kota Ternate Tengah dan 11 (sebelas) kelurahan baru yang dimekarkan pada tahun 2007. Pada tahun 2009 dibentuk Kecamatan Hiri dan dilakukan pemekaran kelurahan baru sebanyak 3 (tiga) kelurahan.

Tabel: Wilayah Kecamatan & Jumlah Kelurahan

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan
1	Ternate Utara	14
2	Ternate Tengah	15
3	Ternate Selatan	17
4	Pulau Ternate	13
5	Moti	6
6	Batang Dua	6
7	Hiri	6
Jumlah		77

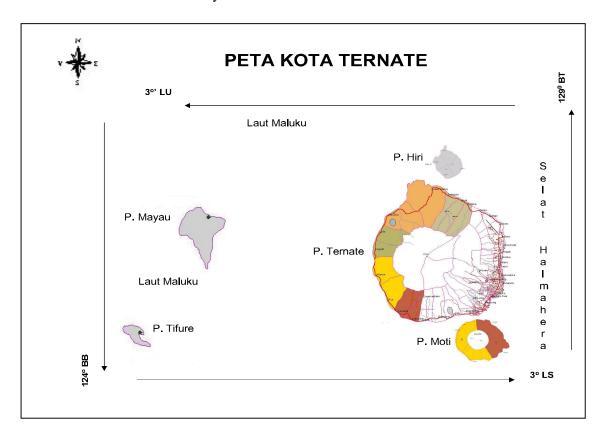
b. Luas Wilayah dan Letak Geografis Daerah

Wilayah Kota Ternate terletak pada 0°-2° Lintang Utara dan 126°-128° Bujur Timur. Luas wilayah Kota Ternate adalah 5.795,40 Km2 dan didominasi oleh wilayah laut 5.544,55 Km2 sedangkan luas daratan 250,85 Km2. Kota Ternate berbatasan dengan :

- Sebelah Utara dengan Laut Maluku;
- Sebelah Selatan dengan Laut Maluku;
- Sebelah Timur dengan Selat Halmahera; dan
- Sebelah Barat dengan Laut Maluku.

Kota Ternate adalah Kota Kepulauan dan terdiri dari 8 pulau, meliputi:

- 1. Pulau Ternate
- 2. Pulau Hiri
- 3. Pulau Moti
- 4. Pulau Mayau
- 5. Pulau Tifure
- 6. Pulau Gurida
- 7. Pulau Maka
- 8. Pulau Mano



Peta Wilayah Administrasi Kota Ternate

c. Topografi

Sebagian besar Kota Ternate adalah daerah bergunung, berbukit, dan terdiri dari pulau vulkanis, karang dengan kondisi jenis tanah sebagai berikut :

- 1. Rogusal: Pulau Ternate
 - Hiri
 - Moti
- 2. Rensika: Pulau Mayau
 - Pulau Tifure
 - Pulau Maka
 - Pulau Mano
 - Pulau Gurida

d. Kondisi Iklim

Sebagaimana umumnya daerah Maluku Utara yang didominasi wilayah laut, Kota Ternate sangat dipengaruhi oleh iklim laut karena mempunyai tipe iklim tropis yang terdiri dari dua musim (*Utara-Barat* dan *Timur-Selatan*) yang seringkali diselingi dengan dua kali masa pancaroba di setiap tahunnya. Kondisi topografi Kota Ternate juga ditandai dengan keragaman ketinggian dari permukaan laut (Rendah: 0-499 M, Sedang: 500-699 M, dan Tinggi: lebih dari 700 M). Dengan kondisi tersebut, Kota Ternate merupakan wilayah kepulauan yang terdiri dari 8 pulau, 5 pulau yaitu pulau Ternate, Hiri, Moti, Mayau, dan pulau Tifure didiami penduduk, sedangkan untuk 3 pulau kecil yaitu pulau Maka, Mano dan Gurida, tidak berpenghuni.

e. Demografis

Sampai dengan akhir tahun 2010, jumlah penduduk Kota Ternate berdasarkan data dari BPS Kota Ternate tahun 2010 sebanyak 185.705 jiwa. Penduduk tersebut tersebar pada 7 (tujuh) kecamatan, yaitu: Wilayah Kecamatan Ternate Selatan 63.746 jiwa, Wilayah Kecamatan Ternate Utara 45.574 jiwa, Wilayah Kecamatan Ternate Tengah 52.072 jiwa, Wilayah Kecamatan Pulau Ternate 14.692 jiwa, Wilayah Kecamatan Moti 4.399 jiwa, Wilayah Kecamatan Batang Dua 2.487 jiwa, Wilayah Kecamatan Hiri 2.735 jiwa.

C. ORGANISASI

Pembentukan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Ternate sebagai realisasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Perangkat Daerah, sampai dengan akhir tahun 2011 Pemerintah Kota Ternate telah membentuk Perangkat Daerah sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) Sekretariat Daerah;
- 2) 1 (satu) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 3) 16 (enam belas) organisasi Dinas Daerah;
- 4) 6 (enam) organisasi Badan Daerah;
- 5) 1 (satu) Inspektorat;
- 6) 6 (enam) organisasi Kantor;
- 7) 1 (satu) organisasi Balai Bahasa Daerah;
- 8) 2 (dua) Perusahaan Daerah;
- 9) 7 (tujuh) organisasi Pemerintah Kecamatan;

10) 77 (tujuh puluh tujuh) Pemerintah Kelurahan.

D. ARAH KEBIJAKAN UMUM PEMBANGUNAN TAHUN 2011

Arah Kebijakan Umum Pembangunan Kota Ternate tahun 2011 yang diatur dengan Peraturan Walikota Ternate Nomor 14 tahun 2010 tanggal 12 April 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Ternate tahun 2011, adalah sebagai berikut:

1. Bidang Kesejahteraan Rakyat

Pembangunan dalam rangka pengentasan kemiskinan di Kota Ternate di arahkan pada pembangunan di berbagai bidang pembangunan yang sifatnya lintas sektor antara lain : bidang kesejahteraan rakyat, bidang ekonomi, bidang infrastruktur dan pelayanan publik, bidang kewilayahan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Bidang Politik dan Penyelenggaraan Pemerintahan.

Adapun bidang kesejahteraan rakyat meliputi:

- a. Pembangunan pendidikan diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan baik di tingkat pra sekolah, pendidikan dasar, menengah dan luar sekolah.
- b. Pembangunan kesehatan diarahkan pada meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dimana Angka Kematian Bayi (AKB), dan Angka Kematian Ibu Bersalin (AKI) serta berkurangnya kasus penyakit menular, yang didukung oleh peningkatan pelayanan kesehatan.
- c. Pembangunan agama diarahkan pada meningkatnya kualitas pendidikan agama dan tempat ibadah.
- d. Pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan pada meningkatnya pelayanan dan partisipasi masyarakat dalam penanganan masalah sosial.
- e. Pembangunan kependudukan diarahkan pada meningkatnya administrasi dan pelayanan kependudukan yang didukung dengan peningkatan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), dengan didukung pendataan perkembangan penduduk secara rutin.
- f. Pembangunan keluarga berencana diarahkan pada peningkatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi serta kesejahteraan keluarga.

- g. Pembangunan ketenagakerjaan diarahkan pada penanganan masalah pengangguran dan meningkatnya kualitas tenaga kerja.
- h. Pelaksanaan pemberdayaan perempuan diarahkan pada meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pengarusutamaan gender dan revitalisasi kelembagaan-kelembagaan perempuan di semua tingkatan masyarakat, keberpihakan kebijakan pembangunan sesuai dengan kodratnya serta meningkatnya partisipasi perempuan dalam berbagai bidang pembangunan.
- i. Pembangunan pemuda dan olah raga diarahkan pada penyediaan fasilitas sarana dan prasarana, kegiatan pemuda dan olah raga serta meningkatkan frekuensi event-event kegiatan pemuda, olah raga dan seni budaya sehingga dapat meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan dan meningkatnya prestasi olah raga dan kesenian pada level regional maupun nasional, serta pembinaan, pendanaan dan perhatian terhadap atlit daerah agar tidak keluar ke daerah lain, kepramukaan, kelembagaan pemuda lainnya.
- j. Pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) diarahkan pada peningkatan pelayanan informasi teknologi dan pengembangan teknologi lokal sehingga dapat mendorong berkembangnya penerapan Teknologi Tepat Guna oleh masyarakat.

2. Bidang Ekonomi

Keberhasilan pembangunan bidang ekonomi sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi secara nasional maupun regional. Oleh karena itu pembangunan bidang ekonomi Kota Ternate tahun 2011 diarahkan pada pencapaian laju pertumbuhan ekonomi sebesar 8 % dan angka inflasi maksimal 5 %, untuk mencapai kondisi tersebut harus didukung dengan:

- a. Pengembangan produk unggulan daerah terutama yang berbasis pada usaha pertanian dan industri kecil yang sinergi dengan industri menengah, besar dalam pengembangan wisata daerah;
- b. Penyediaan kebutuhan pokok masyarakat, terutama pangan melalui peningkatan produksi usaha primer dan perdagangan serta jasa;

- c. Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi, serta Lembaga Ekonomi Makro/Mikro melalui fasilitasi (pembinaan dan pengawasan) dalam pengelolaan manajemen, ketersediaan modal dan pemasaran produk;
- d. Penyediaan anggaran yang dapat diakses sebagai modal usaha bagi masyarakat miskin melalui dana bergulir;
- e. Peningkatan investasi daerah melalui peningkatan intensitas informasi dan promosi potensi daerah, kecepatan dan ketepatan pelayanan ijin usaha;
- f. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana produksi serta infrastruktur perekonomian daerah, meliputi pembangunan dan peningkatan pasar, pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan jalan, irigasi dan penyediaan air baku;
- g. Pengembangan seni dan budaya dalam mendukung sektor pariwisata;
- h. Pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian BUMD.

3. Bidang Infrastruktur Pelayanan Publik

Pembangunan infrastruktur untuk tahun 2011 lebih diarahkan pada upaya untuk:

- a. Menunjang pengembangan sektor unggulan pertanian, perdagangan, perikanan, dan pariwisata;
- b. Menunjang pembangunan kawasan Kota Baru;
- c. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman;
- d. Meningkatkan penyediaan sarana prasarana dasar perkotaan dan penataan kawasan strategis di perkotaan;
- e. Pembangunan prasarana wilayah yang mendorong pemanfaatan dan pengendalian tata ruang wilayah yang optimal dan berkelanjutan.

4. Bidang Kewilayahan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

- a. Pengembangan wilayah diarahkan kepada peningkatan sarana dan prasarana perhubungan dan perekonomian serta penggalian potensi wilayah spesifik yang dapat mendorong berkembangnya wilayah potensial dan daerah tertinggal;
- b. Penataan ruang diarahkan pada meningkatnya kualitas perencanaan tata ruang, pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang;
- c. Pembangunan sumberdaya alam dan lingkungan hidup diarahkan pada:

- 1) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penghijauan dan rehabilitasi lahan serta pembuatan sumur resapan;
- 2) Pemanfaatan sumber daya alam yang optimal dan berkesinambungan;
- Peningkatan kesadaran masyarakat dan pengusaha terhadap kelestarian lingkungan;
- 4) Peningkatan pelaksanaan penegakan hukum dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkesinambungan.

5. Bidang Politik dan Penyelenggaraan Pemerintahan

- a. Pembangunan Politik diarahkan pada terwujudnya kondisi yang kondusif dalam pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2011 dan mendorong keterlibatan Parpol, Ormas, LSM dan Masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan Publik, terutama dalam Penetapan Anggaran dan Perda;
- Meningkatnya efektifitas dan efisiensi serta koordinasi kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat melalui peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan;
- c. Peningkatan kemampuan SDM aparatur; dan berkembangnya jaringan kerja antar unit kerja Pemerintah Daerah, Provinsi, Pusat, Perguruan Tinggi dan Swasta;
- d. Pembangunan Aparatur Pemerintah Daerah diarahkan pada meningkatnya dinamika organisasi kelembagaan pemerintahan daerah;
- e. Pemberdayaan pemerintahan diarahkan pada meningkatnya kemampuan pemerintahan kelurahan, kelembagaan dan keswadayaan serta gotong royong.

6. Bidang Hukum, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

- a. Pembangunan di bidang hukum diarahkan pada peningkatan kualitas produk hukum dan upaya penegakan hukum melalui :
 - Penyesuaian/aktualisasi produk hukum sesuai situasi kondisi daerah dan kepentingan daerah baik di bidang pemerintahan, pelayanan umum maupun kemasyarakatan serta pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan Pemerintah:
 - 2) Peningkatan kualitas SDM aparatur hukum daerah;
 - 3) Peningkatan kesadaran hukum, melalui sosialisasi produk hukum dan pembentukan Kelompok Sadar Hukum (Kadarkum);

- 4) Peningkatan koordinasi pelaksanaan operasi yustisi dalam rangka penegakan Perda, penanggulangan "penyakit sosial masyarakat" dan pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
- b. Sedangkan pembangunan bidang keamanan dan ketertiban umum diarahkan pada:
 - Mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat yang dapat mendukung pelaksanaan pembangunan daerah dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keamanan swakarsa;
 - 2) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana alam serta antisipasi dini terhadap wilayah berpotensi terkena bencana alam, dengan didukung jumlah dan kualitas tenaga Satlinmas (Satuan Perlindungan Masyarakat).
 - 3) Peningkatan bela negara.

E. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2011

Prioritas pembangunan tahun 2011 disamping untuk melanjutkan Program Pembangunan dalam RPJM dan Panca Program juga memecahkan masalah-masalah yang belum terselesaikan pada tahun sebelumnya, maka program pembangunan sesuai hasil Musrenbang RKPD Kota Ternate untuk tahun 2011 diprioritaskan pada kegiatan yang berorientasi pada peningkatan pelayanan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan (kesehatan, pendidikan, infrastruktur, pertanian, UMKM) yang disesuaikan dengan kemampuan pembiayaan dan ketersediaan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

a. Visi

Visi adalah suatu gambaran ideal yang ingin dicapai atau artikulasi dari citra, nilai, arah dan tujuan yang hendak dicapai.

Dengan memperhatikan keinginan luhur dari para pendiri bangsa serta cerminan hati sanubari rakyat Kota Ternate untuk mewujudkan kehidupan yang sejahtera lahir dan batin, memperhatikan isu strategis dalam lima tahun mendatang serta memperhatikan amanat konstitusional yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, maka Visi pembangunan Kota Ternate Tahun 2011-2015 adalah : **Terwujudnya Ternate menjadi Kota "Berbudaya, Agamais, Harmonis, Berkeadilan dan Berwawasan Lingkungan"** (Bahari Berkesan).

Penjelasan Visi tersebut, yaitu:

- 1. Ternate Berbudaya, bahwa kebijakan pemerintah maupun prilaku masyarakat haruslah mencerminkan nilai-nilai budaya *adat se atoran* sebagai sumber nilai yang terbukti ampuh menjadi spirit sosial dan spirit moral *Moloku Kie Raha* pada masa kejayaannya. Hal ini diarahkan untuk menumbuhkan kesadaran dan kecintaan terhadap nilai budaya dan *adat se atoran* dengan mengupayakan pelestariannya, sekaligus menjadikannya sistem nilai yang membentuk kesadaran sosial yang diharapkan terefleksi dalam perilaku sosial masyarakat.
- 2. Ternate Agamais, adalah upaya menciptakan serta menumbuhkan kesadaran keberagamaan dan spiritualitas di dalam masyarakat yang dimulai sejak masa kanak-kanak dan usia remaja, yang diarahkan untuk menangkal berbagai dampak buruk modernitas upaya mewujudkan masyarakat bermartabat, berakhlaq, berbudi pekerti luhur, toleran, penuh belas kasih, yang menempatkan nilai keberagamaan sebagai basis moral yang membentuk kesadaran sosial dan tercermin dalam kehidupan sosial yang santun, religius, aman dan tentram.

- 3. Ternate Harmonis, artinya mengupayakan terwujudnya keserasian, keselarasan dan keseimbangan lingkungan sosial dan lingkungan fisik perkotaan, melalui tata ruang perkotaan terpadu, serasi, nyaman dan sehat, yang mampu mengakomodasi dinamika ekonomi, sosial budaya, dan politik secara seimbang melalui ketersediaan ruang publik yang representatif bagi seluruh masyarakat tanpa kesan pengabaian dan diskriminasi, sehingga menumbuhkan rasa memiliki terhadap Kota Ternate, terpeliharanya persatuan dan kesatuan, meningkatkan wawasan kebangsaan, kerukunan dalam pembauran, semangat persaudaraan, sikap toleran baik antar umat beragama, antar etnik, maupun antar kelompok.
- 4. **Ternate Mandiri,** artinya menjadikan Ternate Kota Jasa dan Perdagangan sebagai pusat perekonomian Maluku Utara, melalui penataan sistem pengelolaan keuangan daerah yang efisien, ekonomis, kompetitif, dukungan infrastruktur ekonomi yang memadai, kepastian hukum, kemudahan investasi. Sekaligus mendorong kreativitas dan produktivitas melalui pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah agar lebih produktif dan berdaya saing, yang diarahkan pada kemandirian ekonomi masyarakat.
- 5. Ternate Berkeadilan, artinya mewujudkan prinsip persamaan hak warga negara dihadapan hukum dan pemerintahan yang diarahkan pada penegakan supremasi hukum, perlindungan HAM, keterbukaan akses dan kesempatan yang merata dalam pelayanan publik di semua bidang yang diarahkan secara sungguh-sungguh pada upaya menjamin kesejahteraan rakyat melalui kebijakan APBD yang memihak rakyat, serta kualitas pelayanan publik, pemerataan akses pelayanan kesehatan, pendidikan, kesempatan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, teratasinya masalah perkotaan seperti kemiskinan, mengurangi kesenjangan antar wilayah dan sektoral, serta pemberdayaan masyarakat sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya (basic needs).
- 6. Ternate Berwawasan Lingkungan, artinya mengupayakan penataan pembangunan perkotaan yang seluruh arah perkembangannya didasarkan pada keasrian dan keaslian potensi lingkungan fisik dan lingkungan sosial budaya, dengan memperhatikan keseimbangan ekologis. Hal ini diarahkan pada upaya revitalisasi lingkungan fisik perkotaan dan lingkungan hidup yang hijau, asri,

nyaman, dan sehat melalui penataan yang terpadu dan serasi antara lingkungan hidup dan lingkungan sosial yang diharapkan memberikan ketenangan, kenyamanan, dan kedamaian kepada warga masyarakat, sekaligus mengupayakan pelestarian ekologi pantai, dan menghindari kecenderungan eksploitasi lingkungan fisik dan ekologi pantai sebagai dampak pengembangan water front city, dan perilaku masyarakat yang relatif belum ramah lingkungan.

b. Misi

Misi pembangunan Kota Ternate dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kota Ternate Tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut:

- 1. Mewujudkan Ternate yang agamais.
- 2. Mewujudkan pemerataan sarana dan prasarana perekonomian yang lebih representatif.
- 3. Membangun Ternate sebagai kota pesisir berbasis lingkungan.
- 4. Membangun Ternate sebagai kota pariwisata berciri budaya dan bahari.
- 5. Membangun Ternate sebagai kota terbuka, demokratis dan adil.
- 6. Membangun Ternate yang sehat dan sejahtera.

c. Permasalahan dan Isu-isu Pembangunan

Permasalahan dan isu-isu pembangunan Kota Ternate 2011-2015 adalah:

- 1. Masalah Sumber Daya Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - a) Profesionalitas serta kompetensi aparatur birokrasi, relatif belum memadai sehingga belum mampu secara merata dan adil mendorong program dan kebijakan bagi kemandirian daerah, menjamin kualitas pelayanan publik terutama pelayanan dasar bidang pendidikan, kesehatan, listrik, air bersih, dan utilitas lainnya.
 - b) Mentalitas aparatur cenderung berorientasi proyek (*project oriented*) ketimbang berorientasi program. Kelemahan ini berimplikasi pada perencanaan program pembangunan antar wilayah dan antar sektor relatif belum integratif dan sinergi, selanjutnya berimplikasi pada belum terpenuhinya azas efisiensi, efektifitas, dan ekonomis dalam pengelolaan dan

- pemanfaatan anggaran secara patut, dan memberikan kemanfaatan yang luas serta berkeadilan kepada masyarakat.
- c) Belum efektifnya akses partisipasi publik yang berkualitas dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam menjamin akuntabilitas serta transparansi kebijakan anggaran (clean governance) sebagai implementasi prinsip-prinsip good governance.
- d) Belum optimalnya kualitas pelayanan publik terutama pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, listrik, air bersih dan utilitas lainnya. Keluhan utamanya berkaitan dengan kepastian waktu, biaya dan tempat.
- e) Belum terintegrasinya sistem pelayanan publik sehingga menimbulkan biaya tinggi akibat faktor ketidakpastian pelayanan.
- f) Rendahnya tingkat transparansi dan akuntabilitas serta kurangnya akses publik dalam perumusan kebijakan pembangunan kota.
- g) Pergeseran paradigma pemerintah bukan lagi sebagai penguasa tetapi sebagai pelayan rakyat. Karena itu tugas camat/lurah mengikuti tugas walikota sebagai pelayan rakyat. Berdaya tidaknya kecamatan/kelurahan sangat tergantung pada pelimpahan wewenang oleh walikota. Besaran kewenangan kecamatan sangat ditentukan oleh urusan yang dilimpahkan oleh walikota.
- 2. Masalah Pemerataan Pembangunan, Akses Perekonomian dan Kesejahteraan
 - a) Tidak seimbangnya pertumbuhan antar wilayah, terutama wilayah Utara dan Selatan Ternate, termasuk wilayah Kecamatan di luar Pulau Ternate, seperti Moti, Hiri dan Batang Dua. Kesenjangan pembangunan antar wilayah ini berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi masyarakat.
 - b) Belum sinerginya kegiatan ekonomi perkotaan dengan kegiatan ekonomi pedesaan, sehingga wilayah luar cenderung mengalami dampak penurunan pertumbuhan (*backwash effects*).
 - c) Kurangnya akses masyarakat, terutama pelaku usaha jasa konstruksi terhadap proyek pemerintah akibat terjadinya praktek mafia ekonomi dan monopoli kepada beberapa pengusaha. Sulitnya pengusaha kecil, petani, nelayan dan koperasi mendapat sumber permodalan dan pendampingan manajemen pengembangan usaha.

- d) Informasi potensi dan peluang usaha belum optimal dipromosikan, padahal Kota Ternate sebagai kota perdagangan dan jasa utama di Maluku Utara memiliki peluang investasi yang cukup tinggi.
- e) Akses usaha yang belum merata, dan rendahnya produktifitas ketenagakerjaan. Ketergantungan terhadap pasokan bahan kebutuhan pokok dari luar adalah situasi rentan terhadap kemandirian ekonomi rakyat.

3. Masalah Penataan Kawasan Perkotaan

- a) Tidak terkendalinya pertumbuhan penduduk baik akibat pertambahan penduduk alamiah maupun akibat urbanisasi sehingga melahirkan kawasan pemukiman kumuh dan kemiskinan kota.
- b) Karena keterbatasan lahan kota dan inkonsistensi kebijakan penataan ruang membuat terjadi alih fungsi lahan secara besar-besaran baik di wilayah pesisir pantai maupun kawasan hutan lindung.
- c) Belum terintegrasinya keruangan (*spatial integration*) secara seimbang pada setiap simpul strategis wilayah perkotaan.
- d) Belum tersedianya ruang terbuka hijau (RTH) bagi warga kota akibat kebijakan komersialisasi kawasan perkotaan serta desain tata ruang yang belum memihak kebutuhan publik.
- e) Kurangnya ruang untuk mewadahi kegiatan PKL yang menimbulkan marginalisasi sektor informal dari sistem ekonomi perkotaan secara *integratif*.
- f) Terabaikannya potensi kawasan pesisir pantai dengan tidak tersedianya prasarana dan sarana kelautan yang berakibat pada menurunnya aktivitas pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir pantai.
- g) Belum mandiri dan terarahnya pembangunan Kota Baru sehingga mengakibatkan masyarakat pada kawasan sekitar membangun permukimannya tanpa memperhatikan penataan wilayah dan kawasan yang sesuai dengan konsep penataan ruang.
- h) Kesemrawutan kota, akibat pertumbuhan kendaraan bermotor tanpa diimbangi oleh ketersediaan infrastruktur jalan dan regulasi yang sering tidak konsisten. Minimnya lahan parkiran menjadi penyebab utama

kemacetan di beberapa pusat perdagangan. Ruang publik bagi pejalan kaki tidak lagi berfungsi karena difungsikan bagi PKL.

4. Masalah Banjir, Sampah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- a) Menurunnya kualitas fisik lingkungan perkotaan, sebagai implikasi dari eksploitasi pembangunan, serta pengelolaan kawasan yang tidak diikuti dengan penataan ruang yang baik dan konsisten.
- b) Penataan drainase dan pengelolaan persampahan yang belum memadai
- c) Minimnya kesadaran warga terhadap lingkungan hidup yang baik menimbulkan masalah banjir, sanitasi yang buruk dan terjadinya abrasi pada wilayah pantai.
- d) Kebijakan pemerintah kota yang belum memperhatikan daya dukung lingkungan dalam pembangunan perkotaan.

5. Masalah Pendidikan dan Kesehatan

- a) Kualitas *output* pendidikan yang masih rendah sehingga belum mampu menjawab kesempatan kerja yang tersedia.
- b) Rendahnya kualitas moral anak didik yang tercermin dalam perilaku bermasyarakat.
- c) Belum meratanya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan yang mudah, murah, berkualitas dan merata, terutama masyarakat yang berada di Kecamatan Moti, Hiri dan Pulau Batang Dua.
- d) Komersialisasi kesehatan ini ditandai dengan mahalnya biaya kesehatan akibat pelayanan Rumah Sakit yang belum profesional akibat Praktek Dokter Ahli lebih memilih berpraktek di Rumah Sakit swasta atau klinik ketimbang melayani pasien di RSU.
- e) Manajemen pelayanan Rumah Sakit yang belum mengakomodasi masyarakat miskin (jamkesda) dan Pemegang Askes.
- f) Masih rendahnya proporsi anggaran kesehatan dalam APBD.
- g) Kematian ibu dan bayi, yang masih cukup tinggi adalah akibat dari buruknya akses pelayanan kesehatan yang tersedia.

6. Masalah Sosial Budaya dan Keagamaan

- a) Masih rendahnya kesadaran budaya hidup toleran masyarakat terutama dalam penutupan jalan untuk acara-acara tertentu.
- b) Fenomena meningkatnya kekerasan terhadap perempuan baik dalam rumah tangga (KDRT), maraknya kasus perkosaan dan meningkatnya angka perceraian di Kota Ternate adalah fenomena yang harus menjadi perhatian kita semua. Fenomena PSK di Kota Ternate adalah penyakit sosial yang berhubungan erat dengan kehidupan ekonomi dan isu moralitas. Tingkat pendidikan yang ditempuh oleh kaum wanita dan terpinggirnya peran wanita dalam pembangunan, seperti masih bias gender dalam penerimaan pegawai, promosi jabatan dan diskriminasi dalam dunia kerja. Fenomena ini tidak lagi menjadi isu domestik perempuan tetapi isu mendasar pembangunan Kota Ternate ke depan.
- c) Belum sinerginya integrasi sosial masyarakat dalam upaya peningkatan partisipasi yang lebih luas dan efektif dalam membuat kebijakan publik yang menyangkut masyarakat.
- d) Penanganan masalah sosial budaya yang terkait dengan masalah kemiskinan perkotaan, gesekan kepentingan antar masyarakat dan antar kampung.
- e) Makin menjauhnya sebagian besar masyarakat dari nilai adat budaya lokal, termasuk pemaknaan atas *adat se atoran* sebagai sumber nilai dan etos sosial, yang terbukti ampuh menjadi nilai identitas masyarakat Ternate pada masa kejayaannya.
- f) Berkurangnya perhatian dan kesadaran pemerintah daerah, dan *stakeholder* di daerah, untuk melakukan rekonstruksi nilai budaya dan kearifan lokal.
- g) Belum maksimalnya peran lembaga keagamaan serta perhatian yang hanya fokus pada sarana prasarana tanpa penguatan basis nilai relegiusitas semakin menjauhkan warga dari nilai-nilai agama.
- h) Masih tingginya angka buta baca Al-Quran di Kota Ternate.

7. Masalah Keuangan dan Kemandirian Fiskal

a) Kurangnya kemandirian fiskal Kota Ternate tergambar dari rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pembiayaan APBD.

Ketimpangan fiskal yang tinggi menunjukan belum optimalnya kinerja sektor ekonomi sehingga kontribusi pendapatan pajak dan retribusi belum signifikan dalam Pendapatan Daerah Kota Ternate.

b) APBD dibuat seringkali lebih berpihak kepada penentu kebijakan daripada kepentingan rakyat. Kurangnya alokasi anggaran untuk belanja modal (investasi) padahal belanja modal ini penting bagi stimulus ekonomi kota di masa yang akan datang, terutama infrastruktur seperti pembangkit tenaga listrik, air minum dan transportasi.

8. Masalah Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di level makro ternyata tidak diikuti pada ekonomi rill di level mikro. Fenomena kemiskinan dan pengangguran adalah gambaran tidak terkoneksinya gambaran makro ekonomi dan kehidupan ekonomi masyarakat secara umum. Inflasi yang masih cukup tinggi telah menurunkan daya beli. Kurangnya akses sumber daya ekonomi dan belum meratanya pembangunan semakin memperburuk kondisi sosial ekonomi masyarakat secara umum.

d. Tujuan

Tujuan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Ternate Tahun 2011-2015 berdasarkan 11 (sebelas) Program Prioritas adalah sebagai berikut:

- 1. Peningkatan dan penataan infrastruktur perkotaan serta percepatan dan pemerataan infrastruktur pada Wilayah Kecamatan, yang diarahkan pada percepatan pengembangan infrastruktur secara merata dan berkeadilan, terutama pada kecamatan-kecamatan di luar kawasan perkotaan untuk membuka keterisolasian, serta memungkinkan terjadinya mobilitas arus barang dan manusia yang mempercepat perkembangan secara merata pada semua wilayah kecamatan;
- Mewujudkan pendidikan murah, terjangkau dan berkualitas, yang diarahkan pada upaya peningkatan sumber daya manusia, khususnya peningkatan derajat pendidikan melalui perluasan akses pendidikan yang murah dan terjangkau,

- sarana dan fasilitas yang memadai, tenaga guru yang cukup, dan mutu yang terus membaik;
- 3. Mewujudkan kesehatan murah, terjangkau dan berkualitas, diarahkan pada upaya meningkatkan sumber daya manusia, melalui peningkatan derajat kesehatan dengan perluasan akses yang mudah, murah, terjangkau, dukungan sarana dan fasilitas memadai, ketersediaan dokter, tenaga kesehatan dan keperawatan yang cukup, dan mutu pelayanan yang terus membaik;
- 4. Mewujudkan anggaran (APBD) yang proporsional dan pro rakyat, diarahkan pada kebijakan anggaran (APBD) yang proporsional dan pro rakyat, yang diprioritaskan pada upaya pemenuhan kebutuhan rakyat serta membiayai program pembangunan yang strategis, juga program populis yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, melalui disain program berbasis keswadayaan dan berciri budaya;
- 5. Penataan, pengendalian dan pemanfaatan ruang kota yang serasi antara kebutuhan dan daya dukung lahan, antara aspek topografi dan kawasan pantai/pesisir berbasis keterpaduan dan keserasian lingkungan sosial budaya dan ekologis, yang diarahkan pada penataan infrastruktur perkotaan sebagai kota jasa dan perdagangan dengan pemanfaatan ruang kota secara terpadu untuk mendukung interaksi spasial, mobilitas dan aktivitas perkotaan yang tertib menuju terwujudnya Kota Ternate yang harmoni, sehat, aman, dan nyaman dan berciri budaya serta berwawasan lingkungan;
- 6. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, dengan kapasitas sumber daya aparatur yang profesional, bersih dan berwibawa, serta birokrasi yang efisien, efektif, kreatif, inovatif, dan responsif, yang diarahkan pada terwujudnya *good government*, dengan sumber daya aparatur yang profesional, kreatif, inovatif, yang mampu menjamin peningkatan kualitas pelayanan, akuntabilitas dan kemandirian masyarakat;
- 7. Peningkatan ekonomi rakyat melalui pengembangan koperasi, usaha mikro kecil menengah dan perluasan lapangan kerja, yang diarahkan pada upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani, nelayan, pekebun, peternak, buruh dan pekerja, koperasi, usaha mikro kecil menengah (UMKM), pedagang

- kaki lima dan pedagang tradisional, menuju pada kemandirian dan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic need*).
- 8. Pelayanan publik yang cepat, murah dan mudah, yang diarahkan pada terwujudnya pelayanan publik oleh aparatur yang profesional, dengan pelayanan yang cepat, mudah, murah, nyaman dan berkualitas;
- 9. Pengembangan masyarakat kawasan pesisir secara berkelanjutan, yang diarahkan pada peningkatan kemandirian masyarakat, melalui pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis potensi pesisir, melalui pengembangan usaha mikro kecil, menengah, koperasi yang mengarah pada produktifitas, dan kemampuan daya saing;
- 10. Membangun kepedulian sosial, kesadaran nilai keagamaan, kebudayaan dan adat istiadat, yang diarahkan untuk menjawab permasalahan perkotaan seperti menurunnya kesadaran spritualitas keberagamaan, solidaritas sosial dan kesadaran kebudayaan sebagai identitas daerah dan jati diri masyarakat, meningkatkan etos sosial, dan optimalisasi penanggulangan masalah-masalah sosial seperti minuman keras, PSK, narkoba serta permasalahan sosial lainnya.
- 11. Penegakan supremasi hukum, hak azasi manusia, untuk mendorong partisipasi publik yang dinamis dan konstruktif, yang diarahkan untuk menjawab masalah penegakan dan kepastian hukum di daerah, termasuk upaya mengadakan regulasi daerah yang mampu mendorong partisipasi publik yang dinamis dan konstruktif, serta regulasi untuk menjamin kualitas pelayanan publik.

e. Sasaran

Untuk mewujudkan tujuan Pemerintah Kota Ternate Tahun 2011-2015, maka selanjutnya ditetapkan sasaran strategis Pemerintah Kota Ternate Tahun 2011-2015, yaitu sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1	2
Tujuan 1: Peningkatan dan penataan infr	astruktur perkotaan serta percepatan dan
pemerataan infrastruktur pad	a wilayah kecamatan
Sasaran strategis 1:	1) Proporsi panjang jaringan jalan dalam
Percepatan pengembangan infrastruktur	kondisi baik (pembangunan)
secara merata dan berkeadilan, terutama	infrastruktur wilayah di Kecamatan
pada kecamatan-kecamatan di luar kawasan	2) Cakupan pemerataan pelayanan air
perkotaan untuk membuka keterisolasian,	bersih kawasan dataran tinggi
serta memungkinkan terjadinya mobilitas	3) Cakupan pemerataan pelayanan listrik
arus barang dan manusia yang mempercepat	yang tidak terjangkau layanan PLN
perkembangan secara merata pada semua	
wilayah kecamatan	
Tujuan 2: Mewujudkan Pendidikan Mura	ah, Terjangkau dan Berkualitas
Sasaran strategis 2:	1) Persentase sarana pendidikan,
Peningkatan Sumber Daya Manusia,	pemerataan tenaga pengajar dan
khususnya peningkatan derajat pendidikan	peningkatan mutu pendidikan
melalui perluasan akses pendidikan yang	2) Dana bantuan penunjang kegiatan
murah dan terjangkau, sarana dan fasilitas	sekolah (penunjang BOS) untuk
yang memadai, tenaga guru yang cukup, dan	mewujudkan pendidikan dasar yang
mutu yang terus membaik	berkualitas
	3) Penyediaan buku pelajaran di
	perpustakaan sekolah
	4) Jumlah guru yang difasilitasi untuk
	melanjutkan studi S-1
	5) Pemberian beasiswa kepada
	siswa/mahasiswa berprestasi dan kurang
	mampu
	6) Pemberian beasiswa kepada guru
	berprestasi untuk melanjutkan studi
	7) Pemberian insentif kepada guru di
	daerah terpencil
	8) Angka melek huruf
	1

9) Angka rata-rata lama sekolah

- 10) Angka partisipasi murni
- 11) Angka partisipasi kasar
- 12) Angka partisipasi sekolah
- 13) Rasio guru/murid (SD)
- 14) Rasio guru/murid (SLTP)
- 15) Rasio guru/murid (SLTA)

Tujuan 3: Mewujudkan Kesehatan Murah, Terjangkau dan Berkualitas

Sasaran strategis 3:

Meningkatnya Sumber Daya Manusia, melalui peningkatan derajat kesehatan dengan perluasan akses yang mudah, murah, terjangkau, dukungan sarana dan fasilitas memadai, ketersediaan dokter, tenaga kesehatan dan keperawatan yang cukup, dan mutu pelayanan yang terus membaik

- Persentase sarana prasarana pelayanan kesehatan, dokter dan perawat serta obat-obatan di Puskesmas/ Pustu/ Poskeskel
- 2) Pemberian insentif kepada bidan atau tenaga kesehatan di daerah terpencil
- Pemberian beasiswa kepada dokter, tenaga medis putera/puteri daerah berprestasi
- Jumlah masyarakat miskin yang mendapat pelayanan Jamkesda
- Persentase pelaksanaan kebijakan subsidi silang bagi pasien rawat inap
- Persentase pelayanan Ambulance dan Mobil Jenazah gratis bagi warga kurang mampu
- 7) Angka harapan hidup
- 8) Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup
- 9) Angka kematian ibu per 1.000 kelahiran hidup
- 10) Persentase gizi buruk pada balita
- 11) Persentase kecamatan bebas rawan gizi
- 12) Persentase Posyandu Purnama dan Mandiri
- 13) Persentase Penduduk yang memanfaatkan Puskesmas

- 14) Persentase persalinan oleh tenaga kesehatan
- 15) Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk
- 16) Penderita Malaria

Tujuan 4: Kebijakan Anggaran (APBD) yang Proporsional dan Pro Rakyat

Sasaran strategis 4:

Terwujudnya kebijakan Anggaran (APBD) yang proporsional dan Pro Rakyat, yang diprioritaskan pada upaya pemenuhan kebutuhan rakyat serta membiayai program pembangunan yang strategis, juga program populis yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, melalui desain program berbasis keswadayaan dan berciri budaya

- 1) Penetapan *One Village One Program* (satu kelurahan, satu program unggulan)
- Pembangunan rumah layak huni bagi keluarga kurang mampu
- 3) Pembangunan Infrastruktur lingkungan
- Persentase pemberian santunan kematian bagi warga kurang mampu
- 5) Jumlah bantuan dana rutin bagi tempat ibadah
- 6) Bantuan pembinaan bagi generasi muda
- Kerjasama dengan perguruan tinggi dan LSM

Tujuan 5: Penataan, Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Kota yang Serasi antara Kebutuhan dan Daya Dukung Lahan, antar Aspek Topografi dan Kawasan Pantai/Pesisir Berbasis Keterpaduan dan Keserasian Lingkungan Sosial Budaya dan Ekologis

Sasaran strategis 5:

Penataan infrastruktur perkotaan sebagai kota jasa dan perdagangan dengan pemanfaatan ruang kota secara terpadu untuk mendukung interaksi spasial, mobilitas dan aktivitas perkotaan yang tertib menuju terwujudnya Kota Ternate yang harmoni, sehat, aman dan nyaman dan berciri budaya serta berwawasan lingkungan

- Persentase penataan kawasan pasar
 Gamalama, Tapak I Plus dan Tapak II dengan aksentuasi ornament kebudayaan lokal
- Pengoptimalan pasar Bastiong, pasar Dufa-dufa, pasar Kotabaru dan pasar Sasa sebagai pasar tradisional
- Rasio taman kota dan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan
- Persentase pemantapan visi dan penataan kota baru berbasis pendidikan dan berciri lokal

- Persentase penataan area depan Kedaton Kesultanan, lapangan Ngara Lamo, Dodoku Ali sebagai RTH berciri budaya
- 6) Peningkatan program partisipatif untuk mewujudkan Ternate sebagai Kota Ternate yang hijau, asri, bersih, nyaman dan ramah lingkungan
- 7) Perwujudan Ternate bebas sampah dan bebas banjir

Tujuan 6: Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik, dengan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur yang Profesional, Bersih dan Berwibawa, serta Birokrasi
yang Efisien, Efektif, Kreatif, Inovatif dan Responsif.

Sasaran strategis 6:

Terwujudnya good government, dengan sumber daya aparatur yang profesional, kreatif, inovatif, yang mampu menjamin peningkatan kualitas pelayanan, akuntabilitas dan kemandirian masyarakat

- Jumlah organisasi perangkat daerah yang efektif dan efisien
- Optimalisasi kapasitas dan kapabilitas aparatur pemerintah
- Peningkatan *mainset* aparatur dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas
- Peningkatan kinerja dan prestasi aparatur
- Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur
- Peningkatan pelayanan umum di Kecamatan dan Kelurahan

Tujuan 7: Peningkatan Ekonomi Rakyat melalui Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perluasan Lapangan Kerja

Sasaran strategis 7:

Peningkatan kesejahteraan masyarakat
Petani, Nelayan, Pekebun, Peternak, Buruh
dan Pekerja, Koperasi, Usaha Mikro Kecil
Menengah (UMKM), Pedagang Kaki Lima,
dan Pedagang Tradisional, menuju pada
kemandirian dan kemampuan memenuhi

- Persentase pelayanan kemudahan izin usaha bagi masyarakat kurang mampu
- 2) Persentase pemberian kapasitas hukum dan kemudahan izin bagi investor
- Jumlah koperasi, UMKM, pedagang tradisional dan PKL yang diberikan bantuan modal usaha

kebutuhan dasar (basic need)	4) Peningkatan kesejahteraan melalui upah
(minimum kota
	5) Jumlah kelompok perempuan dan
	pemuda yang diberikan modal usaha
	6) Jumlah kursus dan pelatihan bagi
	pengangguran terbuka <i>unskill</i>
	7) Jumlah koperasi aktif
	8) Jumlah UKM
	9) Nilai modal kerja dan investasi UKM
	10) Nilai omzet UKM
	11) Penyerapan tenaga kerja
	12) Tingkat pengangguran terbuka
Tujuan 8: Pelayanan Publik yang Cepat,	
Sasaran strategis 8:	1) Jumlah lembaga perijinan
Terwujudnya pelayanan publik oleh aparatur	Persentase penurunan pungutan liar
yang profesional, dengan pelayanan yang	3) Penyediaan <i>database</i> kependudukan
cepat, mudah, murah, nyaman dan	online
berkualitas	4) Persentase pelayanan kelurahan
	terhadap pembuatan KTP, KK, Akte
	Kelahiran gratis
	5) Jumlah penduduk
	6) Laju Pertumbuhan Penduduk
	7) Rasio penduduk ber-KTP
	8) Rasio keluarga ber-KK
	9) Rasio bayi berakte kelahiran
	10) Rasio pasangan berakte nikah
	11) Jumlah penduduk miskin
	12) Jumlah surat kabar nasional/lokal
	13) Jumlah penyiaran radio/tv lokal
	14) Rasio wartel/warnet terhadap
	penduduk
Tujuan 9: Pelayanan Publik yang Cepat,	Murah dan Mudah
Sasaran strategis 9:	1) Pemetaan potensi masyarakat pesisir
Peningkatan kemandirian masyarakat,	2) Jumlah kelompok yang diberikan

melalui pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis potensi pesisir, melalui pengembangan usaha mikro kecil, menengah, koperasi yang mengarah pada produktifitas, dan kemampuan daya saing

- bantuan fasilitas bantuan dan peralatan
- Jumlah kelompok pengolahan hasil produksi perikanan diberikan bantuan modal usaha dan pendampingan
- Pelaksanaan kerjasama dengan perguruan tinggi dan LSM dalam pendampingan pemberdayaan

Tujuan 10: Membangun Kepedulian Sosial, Kesadaran Nilai Keagamaan, Kebudayaan dan Adat Istiadat

Sasaran strategis 10:

Menjawab permasalahan perkotaan seperti menurunnya kesadaran spiritualitas keberagamaan, solidaritas sosial dan kesadaran kebudayaan sebagai identitas daerah dan jati diri masyarakat, meningkatkan etos sosial dan optimalisasi penanggulangan masalah-masalah sosial seperti minuman keras, PSK, narkoba serta permasalahan sosial lainnya

- Penguatan kurikulum pendidikan agama dan kurikulum muatan lokal tentang budaya dan adat istiadat Ternate
- 2) Jumlah taman pengajian Al-Quran
- Optimalisasi pembinaan jemaat dan umat agama non-muslim
- 4) Upaya pembinaan kerukunan antar umat beragama, antar suku, etnis dan subetnis serta pelestarian situs, artifak dan dokumen sejarah dan aset seni budaya Kota Ternate
- Jaminan kesejahteraan Imam Masjid,
 Pendeta, Guru Mengaji, Guru TPA dan
 Pembimbing Jemaat
- 6) Jaminan pelestarian adat dan budaya Ternate

Tujuan 11: Penegakan Supremasi Hukum, Hak Azasi Manusia, untuk Mendorong Partisipasi Publik yang Dinamis dan Konstruktif

Sasaran strategis 11:

Menjawab masalah penegakan dan kepastian hukum di daerah, termasuk upaya mengadakan regulasi daerah yang mampu mendorong partisipasi publik yang dinamis dan konstruktif, serta regulasi untuk menjamin kualitas pelayanan publik

- Peningkatan regulasi daerah tentang jaminan kepastian hukum dan kemudahan investasi
- Penguatan regulasi terhadap partisipasi publik
- Penguatan regulasi tentang jaminan standar pelayanan minimal

4) Peninjauan kembali Peraturan Daerah
5) Pemberian layanan bantuan hukum
secara gratis terhadap warga kurang
mampu

f. Sasaran Prioritas Program Pembangunan Tahun 2011

Prioritas pembangunan tahun 2011 sesuai RPJMD Kota Ternate tahun 2011-2015, yaitu pada usaha untuk mewujudkan Sasaran 1,2 dan 3, meliputi :

- Sasaran 1, yaitu percepatan pengembangan infrastruktur secara merata dan berkeadilan, terutama pada kecamatan-kecamatan di luar kawasan perkotaan untuk membuka keterisolasian, serta memungkinkan terjadinya mobilitas arus barang dan manusia yang mempercepat perkembangan secara merata pada semua wilayah kecamatan.
- Sasaran 2, yaitu peningkatan sumber daya manusia, khususnya peningkatan derajat pendidikan melalui perluasan akses pendidikan yang murah dan terjangkau, sarana dan fasilitas yang memadai, tenaga guru yang cukup, dan mutu yang terus membaik.
- Sasaran 3, yaitu meningkatnya sumber daya manusia, melalui peningkatan derajat kesehatan dengan perluasan akses yang mudah, murah, terjangkau, dukungan sarana dan fasilitas memadai, ketersediaan dokter, tenaga kesehatan dan keperawatan yang cukup, dan mutu pelayanan yang terus membaik.

g. Indikator Kinerja Utama tahun 2011

Indikator kinerja utama (IKU) pembangunan Pemerintah Kota Ternate tahun 2011 adalah indikator kinerja sasaran yang ada dalam RPJMD Pemerintah Kota Ternate tahun 2011-2015, yaitu pada sasaran prioritas pembangunan tahun 2011. Indikator kinerja utama (IKU) tersebut adalah sebagai berikut:

NO	INDIKATOR UTAMA	TARGET
	Sasaran 1	
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	101.955,00 M
	(pembangunan infrastruktur wilayah di Kecamatan)	
2	Cakupan pemerataan pelayanan air bersih kawasan dataran	3 Lokasi
	tinggi	

3	Cakupan pemerataan pelayanan listrik yang tidak terjangkau	1	Kel.
	layanan PLN Sasaran 2		
1	Peningkatan:		
1	- Sarana Pendidikan	11	Jenis
	- Pemerataan Tenaga Pengajar	150	Guru
	- Peningkatan mutu pendidikan	204	Guru
2	Dana bantuan penunjang kegiatan sekolah (penunjang BOS)	134	Sekolah
_	untuk mewujudkan pendidikan dasar yang berkualitas	131	Senoium
3	Penyediaan buku pelajaran di perpustakaan sekolah	1.670	Judul
4	Pemberian beasiswa kepada siswa/mahasiswa berprestasi dan	2.594	Orang
'	kurang mampu	2.3) 1	Orung
5	Pemberian beasiswa kepada guru berprestasi untuk	20	Orang
	melanjutkan studi	20	Orung
6	Pemberian insentif kepada guru di daerah terpencil	309	Orang
7	Angka melek huruf	19,97	Pddk
8	Angka rata-rata lama sekolah	12	Tahun
9	Angka partisipasi murni :	12	1 011011
	- SD/MI/SDLB	87,50	%
	- SMP/MTs/SMPLB	88,00	%
	- SMA/SMK/MA/SMALB	70,50	%
10	Angka partisipasi kasar :	,	
	- SD/MI/SDLB	94,00	%
	- SMP/MTs/SMPLB	90,00	%
	- SMA/SMK/MA/SMALB	88,00	%
11	Angka putus sekolah :	,	
	- SD	0,09	%
	- SLTP	0,31	%
	- SLTA	0,32	%
12	Rasio guru/murid		
	- SD	1:32	Murid
	- SLTP	1:32	Murid
	- SLTA	1:32	Murid
	Sasaran 3:		
1	Peningkatan:		
	- Sarana prasarana pelayanan kesehatan	51	Unit
	- Pelayanan dokter dan perawat	248	Orang
	- Obat-obatan di Puskesmas/	149	Jenis
	Pustu/Poskeskel		

2	Pemberian insentif kepada bidan atau tenaga kesehatan di	55	Orang
	daerah terpencil		
3	Jumlah masyarakat miskin yang mendapat pelayanan	8.000	Orang
	Jamkesda		
4	Pelaksanaan kebijakan subsidi silang bagi pasien rawat inap	185	Jiwa
5	Angka harapan hidup	70,76	Tahun
6	Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup	4/1000	KH
7	Angka kematian ibu per 1.000 kelahiran hidup	78/100.000	KH
8	Persentase gizi buruk pada balita	0,80	%
9	Persentase kecamatan bebas rawan gizi	0,86	%
10	Persentase Posyandu:		
	- Purnama	50,00	%
	- Mandiri	7,00	%
11	Persentase penduduk yang memanfaatkan Puskesmas	85,00	%
12	Persentase persalinan oleh tenaga kesehatan	92,00	%
13	Rasio Puskesmas terhadap Jumlah penduduk	1:23.215	PKM
14	Penderita malaria :		
	- Annual Malaria incidence (AMI)	< 10‰	Jiwa
	- Annual parasite incidence (API)	< 1‰	Jiwa

B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2011

Sesuai dengan RPJMD Kota Ternate tahun 2011-2015, maka tahap pembangunan tahun 2011 merupakan tahapan untuk menyambung, melanjutkan dan menajamkan capaian RPJMD Kota Ternate tahun 2005-2010, sebagai tahapan dasar pembangunan lima tahun ke depan (2011-2015). Tahapan pembangunan tahun 2011 juga merupakan tahap untuk menjaga, meneruskan dan melanjutkan pembangunan yang sudah dicapai dan dilaksanakan 5 tahun sebelumnya dengan mengutamakan peningkatan dan penataan infrastruktur perkotaan, pendidikan dan kesehatan.

Pembangunan Kota Ternate tahun 2011 lebih ditegaskan pada komitmen untuk penguatan pada 3 (tiga) program sebagai fokus utama pembangunan di tahap I, yaitu:

1. Peningkatan dan penataan infrastruktur perkotaan serta percepatan dan pemerataan infrastruktur pada wilayah kecamatan; yang diarahkan pada peningkatan dan penataan infrastruktur perkotaan serta percepatan dan pemerataan infrastruktur secara merata dan berkeadilan di tiap kecamatan, terutama pada kecamatan-kecamatan di luar kawasan perkotaan untuk membuka keterisolasian, serta memungkinkan terjadinya mobilitas arus

- barang dan manusia yang mempercepat perkembangan secara merata pada semua wilayah kecamatan.
- 2. Pendidikan Murah, Terjangkau dan Berkualitas; yang diarahkan pada upaya peningkatan Sumber Daya Manusia, khususnya peningkatan derajat pendidikan melalui perluasan akses pendidikan yang murah dan terjangkau, sarana dan fasilitas yang memadai, tenaga guru yang cukup, dan mutu yang terus membaik.
- 3. Kesehatan Murah, Terjangkau dan Berkualitas; yang diarahkan pada upaya peningkatan Sumber Daya Manusia, melalui peningkatan derajat kesehatan dengan perluasan akses yang mudah, murah, terjangkau, dukungan sarana dan fasilitas memadai, ketersediaan dokter, tenaga kesehatan dan keperawatan yang cukup, dan mutu pelayanan yang terus membaik.

Namun demikian, 11 prioritas pembangunan Kota Ternate sesuai RPJMD Kota Ternate tahun 2011-2015 tetap dilaksanakan secara simultan dengan melaksanakan beberapa kegiatan yang dianggap urgen untuk dilaksanakan.

Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Ternate Tahun 2011 adalah sebagai berkut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Sasaran strategis 1:	1) Proporsi panjang jaringan	101.955,00 M
Percepatan	jalan dalam kondisi baik	
pengembangan	(pembangunan infrastruktur	
infrastruktur secara	wilayah di Kecamatan)	
merata dan	2) Peningkatan Pembangunan	14.651,50 M
berkeadilan, terutama	jalan	
pada kecamatan-	3) Persentase pemenuhan	4,64 %
kecamatan di luar	kebutuhan jembatan	
kawasan perkotaan	4) Persentase jembatan dalam	82,68 %
untuk membuka	kondisi baik	
keterisolasian, serta	5) Pembangunan	51,00 M
memungkinkan	talud/turap /bronjong	
terjadinya mobilitas	6) Cakupan pemerataan	3 Lokasi
arus barang dan	pelayanan air bersih kawasan	
manusia yang	dataran tinggi	
mempercepat	7) Cakupan pemerataan	1 Kel
perkembangan secara	pelayanan listrik yang tidak	
merata pada semua	terjangkau layanan PLN	
wilayah kecamatan		
Sasaran strategis 2:	1) Persentase:	
Peningkatan Sumber	- Sarana pendidikan	11 Jenis

Daya Manusia,	- Pemerataan tenaga pengajar	150	Guru
khususnya peningkat-	- Peningkatan mutu		
an derajat pendidikan	pendidikan	204	Guru
melalui perluasan	2) Dana bantuan penunjang	134	Sekolah
akses pendidikan yang	kegiatan sekolah (penunjang		
murah dan terjangkau,	BOS) untuk mewujudkan		
sarana dan fasilitas	pendidikan dasar yang		
yang memadai, tenaga	berkualitas		
guru yang cukup, dan	3) Penyediaan buku pelajaran di	1.670	Judul
mutu yang terus	perpustakaan sekolah		
membaik	4) Pemberian beasiswa kepada	2.594	Orang
	siswa/mahasiswa berprestasi		
	dan kurang mampu		
	5) Pemberian beasiswa kepada	20	Orang
	guru berprestasi untuk		
	melanjutkan studi		
	6) Pemberian insentif kepada	309	Orang
	guru di daerah terpencil		
	7) Angka melek huruf	19,97	Pddk
	8) Angka rata-rata lama sekolah	12	Tahun
	9) Angka partisipasi murni:		
	- SD/MI/SDLB	87,50	%
	- SMP/MTs/SMPLB	88,00	%
	- SMA/SMK/MA/SMALB	70,50	%
	10) Angka partisipasi kasar:		
	- SD/MI/SDLB	94,00	%
	- SMP/MTs/SMPLB	90,00	0/0
	- SMA/SMK/MA/SMALB	88,00	%
	11) Angka putus sekolah:		%
	- SD	0,09	%
	- SLTP	0,31	%
	- SLTA	0,32	
	12) Rasio guru/murid:		
	- SD	1:32	Murid
	- SLTP	1:32	Murid
	- SLTA	1:32	Murid

	13) Rata-rata nilai UN dan UAS:		
	a) SD/MI		
	- UN	4.00	
		4,00	
	- UAS	6,50	
	b) SMP/MTs		
	- UN	5,50	
	- UAS	7,25	
	c) SMA/MA/SMK		
	- UN	5,50	
	- UAS	7,50	
	14) Angka kelulusan:		
	- SD/MI	3.024	Orang
	- SMP/MTs	2.579	Orang
	- SMA/MA/SMK	2.449	Orang
	15) Rata-rata nilai paket ujian:		
	a) Paket A		
	- UN	5,50	
	- UAS	7,00	
	b) Paket B		
	- UN	5,50	
	- UAS	7,00	
	c) Paket C		
	- UN	5,50	
	- UAS	7,00	
	16) Jumlah penunjang layanan	6.500	Orang
	tetap dan layanan keliling		C
	perpustakaan		
	daerah		
	17) Persentase peningkatan	11,80	0/0
	jumlah koleksi buku di	11,50	. •
	perpustakaan daerah		
Sasaran strategis 3:	1) Peningkatan:		
Meningkatnya Sumber	- Jumlah sarana prasarana	51	Unit
Daya Manusia, melalui	Pelayanan kesehatan		
peningkatan derajat	- Pelayanan dokter dan	248	Orang
kesehatan dengan	perawat	240	Olulig
perluasan akses yang	- Jumlah obat-obatan di	149	Jenis
mudah, murah,	Puskesmas/Pustu /Poskeskel	149	301113
terjangkau, dukungan	1 uskesilias/1 ustu /1 oskeskei		
sarana dan fasilitas			
Sarana uan iasintas			

memadai, ketersediaan	2) Pemberian insentif kepada	55	Orang
dokter, tenaga	bidan atau tenaga kesehatan		
kesehatan dan	di daerah terpencil		
keperawatan yang	3) Jumlah masyarakat miskin	8.000	Orang
cukup, dan mutu	yang mendapat pelayanan		
pelayanan yang terus	Jamkesda		
membaik	4) Persentase pelaksanaan	185	Jiwa
	kebijakan subsidi silang bagi		
	pasien rawat inap		
	5) Angka harapan hidup	70,76	Tahun
	6) Angka kematian bayi per	4/1000	KH
	1.000 kelahiran hidup		
	7) Angka kematian ibu per	78/100.000	KH
	1.000 kelahiran hidup		
	8) Persentase gizi buruk pada	0.80	%
	balita		
	9) Persentase kecamatan bebas	0,86	%
	rawan gizi		
	10) Persentase Posyandu:		
	- Purnama	50,00	%
	- Mandiri	7,00	%
	11) Persentase penduduk yang	85,00	%
	memanfaatkan Puskesmas		
	12) Persentase persalinan oleh	92,00	%
	tenaga kesehatan		
	13) Rasio puskesmas terhadap	1:23.215	PKM
	jumlah penduduk		
	14) Penderita malaria		
	- Annual Malaria Incidence	< 10‰	Jiwa
	(AMI)		
	- Annual parasite incidence	< 1‰	Jiwa
	(API)		
	15) Angka kesakitan DBD/	2,5/1000	Pddk
	100.000 Jiwa		
	16) Angka kesembuhan TBC	86,00	%
	17) Angka penanganan Penyakit	90,00	%
	Kusta		

Sasaran strategis 4 :	1) Penetapan One Village One	5,00	%
Terwujudnya	Program (satu kelurahan,	ŕ	
kebijakan Anggaran	satu program unggulan)		
(APBD) yang	2) Pembangunan Infrastruktur		
proporsional dan Pro	lingkungan:		
Rakyat, yang	- MCK Komunal	19,35	%
diprioritaskan pada	- Drainase /gorong-gorong	7.280,00	M
upaya pemenuhan	- Pemenuhan kebutuhan jalan	20,46	%
kebutuhan rakyat serta	lingkungan		, 0
membiayai program	3) Persentase pemberian	20,00	%
pembangunan yang	santunan kematian bagi	20,00	70
strategis, juga program	warga kurang mampu		
populis yang	4) Bantuan pembinaan bagi	10,00	%
menyentuh kebutuhan	generasi muda	10,00	/0
dasar masyarakat,		100.00	0/
melalui desain program	5) Persentase pemanfaatan	100,00	%
berbasis keswadayaan	Dana Pembangunan		
,	Kelurahan (DPK)	_	
dan berciri budaya	6) Jumlah kelompok usaha	5	Klp.
	ekonomi kelurahan simpan		
	pinjam yang difasilitasi		
	pembentukannya		
	7) Jumlah Posyandu yang	70	Posy.
	menerima bantuan		
	8) Peningkatan pemahaman	340	Orang
	tentang perlindungan anak		
	PUG		
Sasaran strategis 5:	1) Persentase penataan kawasan	25,00	%
Penataan infrastruktur	pasar Gamalama, Tapak I		
perkotaan sebagai kota	Plus dan Tapak II dengan		
jasa dan perdagangan	aksentuasi ornament		
dengan pemanfaatan	kebudayaan lokal		
ruang kota secara	2) Pengoptimalan pasar	50,00	%
terpadu untuk	Bastiong, pasar Dufa-dufa,		
mendukung interaksi	pasar Kotabaru dan pasar		
spasial, mobilitas dan	Sasa sebagai pasar		
aktivitas perkotaan	Tradisional		
yang tertib menuju	3) Persentase penataan area	25,00	%
terwujudnya Kota	depan Kedaton Kesultanan,	ĺ	
Ternate yang harmoni,	lapangan Ngara Lamo,		
sehat, aman dan	Dodoku Ali sebagai RTH		

nyaman dan berciri	berciri budaya		
budaya serta	4) Persentase pengelolaan ruang	100,00	%
berwawasan	terbuka hijau (RTH)		
lingkungan	5) Persentase pengendalian	100,00	%
	pemanfaatan ruang		
	6) Dokumen perencanaan tata	3	Dok.
	ruang		
	7) Peningkatan program par-	50	Kel.
	tisipatif untuk mewujudkan		
	Ternate sebagai Kota yang		
	hijau, asri, bersih, nyaman		
	dan ramah lingkungan		
	8) Luas hutan yang terlindungi	4.403	На
	9) Perwujudan Ternate bebas	4	Kec.
	sampah dan bebas banjir		
	10) Persentase perusahaan yang	60,00	%
	memiliki UKL-UPL		
	11) Peningkatan penghijauan kota	3	Kec.
	12) Peningkatan perlindungan	3	Kec.
	dan konservasi SDA		
	13) Persentase tersedianya		
	dokumen perencanaan		
	pembangunan		
	- RKPD Kota Ternate tahun	100,00	%
	2012		
	- KUA PPAS dan KUA	100,00	%
	PPAS Perubahan		
	- RPJM Kota Ternate 2011-	100,00	%
	2015		
	- Ranperda RPJP Kota	100,00	%
	Ternate		
	14) Persentase tersedia data		
	penunjang perencanaan:		
	- Ternate dalam angka	100,00	%
	- Data Indikator ekonomi	100,00	%
	daerah Kota Ternate (PDRB	,	
	dan Inflasi)		
	- Monografi Kota Ternate	100,00	%
	tahun 2011	,	
	- Standar satuan harga (SSH)	100,00	%

	Pemerintah Kota Ternate - Standar Harga Satuan Bangunan Negara (HSBGN) dan Harga satuan konstruksi Pemerintah Kota Ternate	100,00	%
	15) Perda RTRW Kota Ternate	1	Dok.
	16) Laporan pertanggungjawaban	1	Dok.
	Walikota akhir tahun	•	Dok.
	17) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2010	1	Dok.
	18) Persentase penyediaan fasilitas penunjang aktivitas perhubungan laut	100,00	%
	19) Persentase terminal penumpang dalam Kondisi baik	70,00	%
	20) Persentase pelabuhan lokal dalam kondisi baik	100,00	%
	21) Persentase penyediaan fasilitas <i>traffic light</i>	100,00	%
	22) Jumlah fasilitas parkir yang tersedia	100,00	0/0
	23) Persentase jalan yang diberi pengaman	80,00	%
	24) Rasio jalan yang bermarka	100,00	%
Sasaran strategis 6: Terwujudnya good government, dengan	Jumlah organisasi perangkat daerah yang efektif dan efisien	36	SKPD
sumber daya aparatur yang profesional,	2) Jumlah PNS yang menerima Satya Lencana Karya Satya	315	Orang
kreatif, inovatif, yang mampu menjamin	3) Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur :		
peningkatan kualitas pelayanan, akuntabilitas dan	- Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan formal	76	Orang
kemandirian masyarakat	- Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan non formal	104	Orang

- Jumlah pegawai yang	478	Orang
mengikuti pendidikan dan	170	Orung
pelatihan struktural		
4) Jumlah penyelesaian berkas	5	Jenis
kepegawaian		301113
5) Jumlah LHP pemeriksaan	25	LHP
reguler yang diterbitkan	23	LIII
	14	LHP
6) Jumlah LHP pemeriksaan	14	LIII
khusus/kasus pengaduan yang diterbitkan		
7) Persentase penyelesaian		
temuan hasil pemeriksaan:	20.00	0.7
- Inspektorat Kota Ternate	30,00	%
- Inspektorat Provinsi Maluku	100,00	%
Utara		
- Itjen Kementrian	100,00	%
8) Formasi dan evaluasi jabatan	39	SKPD
perangkat daerah		
9) Buku tupoksi perangkat	75	Eksp
daerah		
10) Buku tata naskah dinas	100	Eksp
11) Buku himpunan Perda dan	100	Eksp
Perwali		
12) Dokumen penetapan kinerja	75	Eksp
SKPD tahun 2011		
13) Penjaringan aspirasi	7	Kec.
masyarakat		
14) Peningkatan kapasitas	25	Orang
pimpinan dan anggota DPRD		Č
dalam menunjang kinerja		
lembaga perwakilan rakyat		
daerah		
15) Persentase pemanfaatan dan	100,00	%
partisipatif	100,00	, u
16) Persentase peningkatan PAD	50,17	%
17) Penerbitan laporan keuangan	100,00	%
pemerintah daerah (LKPD)	100,00	70
tahun 2010 tepat waktu		
18) Penetapan dokumen anggaran		
tepat waktu:		

	- APBD 2012	100,00	%
	- APBD Perubahan 2011	100,00	%
	19) Peningkatan manajemen aset	75,00	%
	daerah	ŕ	
Sasaran strategis 7:	1) Jumlah Koperasi, yang	6	Kop.
Peningkatan	diberikan bantuan modal		
kesejahteraan	usaha		
masyarakat Petani,	2) Jumlah kelompok perempuan	7	Klp.
Nelayan, Pekebun,	dan pemuda yang diberikan		
Peternak, Buruh dan	modal usaha		
Pekerja, Koperasi,	3) Jumlah kursus dan pelatihan	16	Orang
Usaha Mikro Kecil	bagi pengangguran terbuka		
Menengah (UMKM),	unskill		
Pedagang Kaki Lima,	4) Jumlah Koperasi aktif	75	Klp.
dan Pedagang	5) Persentase pertumbuhan	7,36	%
Tradisional, menuju	ekonomi		
pada kemandirian dan	6) Tingkat Inflasi	3,00	%
kemampuan memenuhi	7) Pendapatan perkapita	2.500.000,00	Rp
kebutuhan dasar (basic	8) Indeks pembangunan manusia	74,62	%
need)	(IPM)		
	9) Jumlah Koperasi yang	12	Klp.
	berkualitas		
	10) Jumlah UKM	8.000	UKM
	11) Nilai modal kerja dan	735.223.418.220	Rp
	investasi UKM		
	12) Nilai Omzet UKM	1.278.397.557.270	RP
	13) Penyerapan tenaga kerja	30,00	%
	14) Tingkat pengangguran	10,42	%
	terbuka		
	15) Peningkatan pengembangan	10	Perus.
	informasi pasar kerja		
	16) Peningkatan pengembangan	5	Klp.
	sarana dan prasarana sektor		
	formal		
	17) Penataan pedagang Kaki	5	Lokasi
	Lima		
	18) Tersalurnya RASKIN	7	Kec.
	19) Operasi pasar murah	3	Kec.
	20) Peningkatan produksi pangan	57,50	Ton

	21) Peningkatan produksi	156,4	Ton
	tanaman holtikultura		
	22) Peningkatan produksi	4.520	Ekor
	peternakan		
	23) Meningkatnya produksi	8,00	Ton
	perkebunan		
	24) Persentase tertanggulanginya	100,00	%
	penyakit ternak		
	25) Berkembangnya usaha	20	Kel.
	agribisnis		
	26) Peningkatan keikutsertaan	23,67	%
	masyarakat dalam ber KB		
	27) Jumlah sarana prasarana KB	124	Unit
	dan KS		
	28) Meningkatnya ketahanan	286	Orang
	keluarga dalam peningkatan		
	kesertaan, pembinaan dan		
	kemandirian ber KB		
Sasaran strategis 8:	1) Penyediaan database	100,00	%
Terwujudnya	kependudukan <i>online</i>		
pelayanan publik oleh	2) Jumlah penduduk	190.737	Jiwa
aparatur yang	3) Laju Pertumbuhan Penduduk	3,83	%
Profesional, dengan	4) Rasio penduduk ber-KTP	1:1	Pddk
pelayanan yang cepat,	5) Rasio keluarga ber-KK	1:1	KK
mudah, murah, nyaman	6) Rasio bayi berakte kelahiran	1:1	Jiwa
dan berkualitas	7) Jumlah kelurahan yang	77	Kel.
	terlayani E-KTP		
	8) Jumlah penduduk miskin	6.500	Jiwa
	9) Persentase penanganan	100,00	%
	kejadian kebakaran		
	10) Persentase penanganan	100,00	%
	kejadian bencana alam	ĺ	
	11) Jumlah surat kabar	10	Penerbit
	nasional/lokal		
	12) Jumlah penyiaran radio/tv	9	Stas.
	lokal		
Sasaran strategis 9:	1) Pemetaan potensi masyarakat	3	Keg.
Peningkatan	pesisir		

kemandirian	2) Jumlah kelompok yang	25	Klp.
masyarakat, melalui	diberikan bantuan fasilitas		
pengembangan	bantuan dan peralatan		
ekonomi kerakyatan	3) Jumlah kelompok pengolahan	1	Klp.
berbasis potensi	hasil produksi perikanan		
pesisir, melalui	diberikan bantuan modal		
pengembangan usaha	usaha dan pendampingan		
mikro kecil, menengah,	4) Pelaksanaan kerjasama	1	Lemb.
koperasi yang	dengan perguruan tinggi dan		
mengarah pada	LSM dalam pendampingan		
produktifitas, dan	pemberdayaan		
kemampuan daya saing	5) Peningkatan kunjungan		
	wisatawan lokal dan manca		
	Negara		
	- WNI	92.350	Orang
	- WNA	800	Orang
	6) Terkendalinya harga	12	Bulan
	kebutuhan pokok di Ternate		
	7) Terpenuhinya kebutuhan	12	Bulan
	sembilan bahan pokok di		
	Ternate		
	8) Meningkatnya produktifitas	5	Jenis
	dan mutu produk usaha		
Sasaran strategis 10:	Penguatan kurikulum	35,00	%
Menjawab	pendidikan agama dan	22,00	, 0
permasalahan	kurikulum muatan lokal		
perkotaan seperti	tentang budaya dan adat		
menurunnya kesadaran	istiadat Ternate		
spiritualitas	2) Jumlah taman pengajian Al-	168	TPQ
keberagamaan,	Quran	100	11 Q
solidaritas sosial dan	3) STQ Tingkat Kota Ternate	7	Khafilah
kesadaran kebudayaan	4) Khafilah Kota Ternate pada	22	Orang
sebagai identitas	STQ tingkat Provinsi Maluku	22	Orung
daerah dan jati diri	Utara		
masyarakat,	5) Pembinaan Khatib dan Imam	60	Orang
meningkatkan etos	′		%
sosial dan optimalisasi	6) Persentase Pelepasan calon	100,00	/0
penanggulangan	jamaah haji dan penjemputan		
masalah-masalah sosial	haji Kota Ternate		
seperti minuman keras,			
seperti illinuman keras,			

PSK, narkoba serta	7) Upaya pembinaan kerukunan	7	Kec.
permasalahan sosial	antar umat beragama, antar	,	RCC.
lainnya	suku, etnis dan subetnis		
lammya	8) Pelestarian situs, artifak dan	14	Jenis
	dokumen sejarah dan aset	14	Jenns
	•		
	seni budaya Kota Ternate	1.45	0
	9) Jaminan kesejahteraan Imam	145	Orang
	Masjid, Pendeta, Guru		
	Mengaji, Guru TPA dan		
	Pembimbing Jemaat		
	10) Jaminan pelestarian adat dan	4	Keg.
	budaya Ternate		
	11) Peningkatan kesadaran	150	Orang
	pemuda terhadap bahaya		
	Narkoba		
	12) Peningkatan kualitas sarana	4	Bh
	olahraga		
	13) Jumlah atlit yang berprestasi	162	Orang
	pada kompetisi cabang		
	olahraga unggulan		
	14) Pemberantasan penyakit	2	Jenis
	masyarakat		
	15) Peningkatan pemberdayaan	50	Orang
	kelembagaan sosial		
	16) Pembinaan penyandang	4	Orang
	cacat dan trauma		
	17) Bantuan tanggap darurat	2	Kel.
	korban bencana alam sosial		
	dan penyandang masalah		
	kesejahteraan sosial (PMKS)		
Sasaran strategis 11:	1) Peninjauan kembali peraturan	2	Perda
Menjawab masalah	daerah		
penegakan dan	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Kec.
kepastian hukum di	,		
daerah, termasuk upaya			Kec.
mengadakan regulasi	ketertiban masyarakat serta	4	
daerah yang mampu	pencegahan tindak kriminal		
mendorong partisipasi	4) Penegakan PERDA dan	4	Kec.
publik yang dinamis	Peraturan pelaksana		1100.
dan konstruktif, serta	Totaldian polandana		
The second district of the			

regulasi untuk	5) Sertifikasi tanah bagi	15 Orang
menjamin kualitas	masyarakat kurang mampu	
pelayanan publik	6) Penyelesaian masalah hukum	100,00 %
	Pemda Kota Ternate	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

a. Penetapan Kategori Nilai Capaian

Dalam pengukuran kinerja perlu dilakukan atribusi penilaian untuk memudahkan dalam penarikan simpulan. Dalam menilai capaian kinerja Pemerintah Kota Ternate tahun 2011 digunakan standar pengukuran skala ordinal sebagai berikut:

NO	JUMLAH NILAI	KATEGORI
1.	85 sampai dengan 100	Sangat Berhasil
2.	70 s/d kurang dari 85	Berhasil
3.	55 s/d kurang dari 70	Cukup berhasil
4.	Kurang dari 55	Tidak berhasil

Hasil dari pengukuran kinerja melalui skala ordinal tersebut digunakan untuk menilai sampai sejauh mana tingkat keberhasilan maupun ketidak-berhasilan kinerja guna meningkatkan dan memperbaiki kinerja organisasi, serta mengidentifikasi faktor-faktor apa yang menjadi hambatan dan kendala pencapaian sasaran, untuk selanjutnya menjadi bahan perumusan langkah dan strategi ke depan yang perlu dilaksanakan.

b. Pengukuran Kinerja

1) Evaluasi Pencapaian Kinerja Indikator Utama tahun 2011

Hasil pengukuran sasaran prioritas tahun 2011 yang dijadikan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada formulir pengukuran kinerja terlampir, nilai capaian masingmasing indikator kinerja sasaran berkisar antara 34,48 % sampai dengan 158,06 %. Pencapaian target indikator kinerja utama (IKU) tahun 2011 adalah sebagai berikut:

NO	INDIKATOR UTAMA	TARGET		TARGET		%
	Sasaran 1					
1	Proporsi panjang jaringan jalan	101.955,00	M	101.955,00	M	100,00
	dalam kondisi baik					
	(pembangunan infrastruktur					
	wilayah di Kecamatan)					
2	Cakupan pemerataan pelayanan	3	Lokasi	3	Lokasi	100,00
	air bersih kawasan dataran					
	tinggi					

3	Cakupan pemerataan pelayanan listrik yang tidak terjangkau layanan PLN	1	Kel.	1	Kel.	100,00
	Sasaran 2					
1	Peningkatan:					
	- Sarana pendidikan	11	Jenis	11	Jenis	100,00
	- Pemerataan tenaga pengajar	150	Guru	120	Guru	80,00
	- Peningkatan mutu pendidikan	204	Guru	173	Guru	84,80
2	Dana bantuan penunjang	134	Sekolah	134	Sekolah	100,00
	kegiatan sekolah (penunjang					
	BOS) untuk mewujudkan					
	pendidikan dasar yang					
	berkualitas					
3	Penyediaan buku pelajaran di	1.670	Judul	1.670	Judul	100,00
	perpustakaan sekolah					
4	Pemberian beasiswa kepada	2.594	Orang	2.594	Orang	100,00
	siswa/mahasiswa berprestasi dan					
	kurang mampu					
5	Pemberian beasiswa kepada	20	Orang	20	Orang	100,00
	guru berprestasi untuk					
	melanjutkan studi					
6	Pemberian insentif kepada guru	309	Orang	309	Orang	100,00
	di daerah terpencil					
7	Angka Melek Huruf	19,97	Pddk	19,96	Pddk	99,95
8	Angka Rata-rata Lama Sekolah.	12	Tahun	12	Tahun	100,00
9	Angka Partisipasi Murni:					
	- SD/MI/SDLB	87,50	%	87,75	%	100,29
	- SMP/MTs/SMPLB	88,00	%	88,26	%	100,30
	- SMA/SMK/MA/SMALB	70,50	%	70,83	%	100,47
10	Angka Partisipasi Kasar:					
	- SD/MI/SDLB	94,00	%	94,37	%	100,39
	- SMP/MTs/SMPLB	90,00	%	92,17	%	102,41
	- SMA/SMK/MA/SMALB	88,00	%	88,03	%	100,03
11	Angka Putus Sekolah:	0.00	0./	0.04	0./	155.56
	- SD	0,09	%	0,04	%	155,56
	- SLTP	0,31	%	0,13	%	158,06
12	- SLTA	0,32	%	0,17	%	146,88
12	Rasio Guru/Murid:	1 22	M: 1	1 10	M 1	115 22
	- SD	1:32	Murid	1:18	Murid	115,22
	- SLTP	1:32	Murid Murid	1:15	Murid Murid	118,48
	- SLTA	1:32	Murid	1:14	Murid	119,57
				1		1

44

	Sasaran 3					
1	Peningkatan:					
	- Sarana prasarana pelayanan	51	Unit	51	Unit	100,00
	kesehatan					
	- Pelayanan dokter dan perawat	248	Orang	183	Orang	73,79
	- Obat-obatan di puskesmas/	149	Jenis	149	Jenis	100,00
	pustu/poskeskel					
2	Pemberian insentif kepada bidan	55	Orang	55	Orang	100,00
	atau tenaga kesehatan di daerah					
	terpencil					
3	Jumlah masyarakat miskin yang	8.000	Orang	8.000	Orang	100,00
	mendapat pelayanan Jamkesda					
4	Pelaksanaan kebijakan subsidi	185	Jiwa	185	Jiwa	100,00
	silang bagi pasien rawat inap					
5	Angka harapan hidup	70,76	Tahun	66,38	Tahun	93,81
6	Angka kematian bayi per 1.000	4/1000	KH	6,5/1000	KH	61,54
	kelahiran hidup					
7	Angka kematian ibu per 1.000	78/100.000	KH	130/100.000	KH	60,00
	kelahiran hidup					
8	Persentase gizi buruk pada balita	0,80	%	0,50	%	137,50
9	Persentase kecamatan bebas	0,86	% 0	0,050	%	141,86
	rawan gizi					
10	Persentase Posyandu:					
	- Purnama	50,00	% 0	57,14	%	114,28
	- Mandiri	7,00	%	10,00	%	142,86
11	Persentase penduduk yang	85,00	%	72,00	%	84,43
	memanfaatkan Puskesmas					
12	Persentase persalinan oleh	92,00	%	74,00	%	80,43
	tenaga kesehatan					
13	Rasio Puskesmas terhadap	1:23.215	PKM	1:23.215	PKM	100,00
	Jumlah penduduk					
14	Penderita Malaria:					
	- Annual Malaria Incidence	< 10‰	Jiwa	< 29‰	Jiwa	34,48
	(AMI)					
	- Annual Parasite Incidence	< 1‰	Jiwa	< 2‰	Jiwa	50,00
	(API)					

Pada tabel tersebut diatas terlihat bahwa dari dua puluh sembilan indikator kinerja utama, sebanyak dua puluh lima telah mencapai target dan empat indikator kinerja utama belum mencapai target. Penjelasan penyebab dan tindak

lanjut indikator utama yang belum mencapai sasaran dijelaskan pada sub bab analisa capaian kinerja.

2) Evaluasi Pencapaian Kinerja

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pemerintah Kota Ternate tahun 2011, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2011 dengan realisasinya. Dari hasil pengukuran (Formulir Pengukuran Kinerja terlampir) nilai capaian masing-masing indikator kinerja sasaran berkisar antara 34,48 % sampai dengan 158,06 % yang dapat dikelompokan sebagai berikut:

No	Capaian Kinerja Indikator Sasaran	Predikat	Jumlah			
1	85 sampai dengan 100	Sangat Berhasil	180			
2	70 s/d kurang dari 85	Berhasil	15			
3	55 s/d kurang dari 70	Cukup berhasil	4			
4	Kurang dari 55	Tidak berhasil	5			
	Jumlah					

Tingkat pencapaian kinerja Pemerintah Kota Ternate tahun 2011 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Target		Realisasi	%
Sasaran 1:	1) Proporsi panjang	101.955,00 M	101.955,00 M	100,00
Percepatan	jaringan jalan dalam			
pengembang-an	kondisi baik			
infrastruktur secara	(pembangunan			
merata dan	infrastruktur wilayah			
berkeadilan,	di Kecamatan)			
terutama pada	2) Peningkatan	14.651,50 M	19.381,20 M	132,28
kecamatan-	pembangunan jalan			
kecamatan di luar	3) Persentase	4,64 %	4,13 %	89,01
kawasan perkotaan	pemenuhan			
untuk membuka	kebutuhan jembatan			
keterisolasian, serta	4) Persentase jembatan	82,68 %	82,68 %	100,00
memungkinkan	dalam kondisi baik			
terjadinya mobilitas	5) Pembangunan talud/	51,00 M	46,00 M	90,20
arus barang dan	turap/bronjong			

manusia yang mempercepat perkembangan secara merata pada	6) Cakupan pemerataan pelayanan air bersih kawasan dataran tinggi	3	Lokasi	3	Lokasi	100,00
semua wilayah	7) Cakupan pemerataan	1	Kel.	1	Kel.	100,00
kecamatan	pelayanan listrik					
	yang tidak terjangkau					
	layanan PLN					
Sasaran 2:	1) Persentase:					
Meningkatkannya	- Sarana pendidikan	11	Jenis	11	Jenis	100,00
Sumber Daya	- Pemerataan tenaga	150	Guru	120	Guru	80,00
Manusia,	pengajar					
khususnya	- Peningkatan mutu	204	Guru	173	Guru	84,80
peningkatan derajat	pendidikan					
pendidikan melalui	2) Dana bantuan	134	Sekolah	134	Sekolah	100,00
perluas-an akses	penunjang kegiatan					
pendidikan yang	sekolah (penunjang					
murah dan	BOS) untuk					
terjangkau, sarana	mewujudkan					
dan fasilitas yang	pendidikan dasar					
memadai, tenaga	yang berkualitas					
guru yang cukup,	3) Penyediaan buku	1.670	Judul	1.670	Judul	100,00
dan mutu yang	pelajaran di					
terus membaik	perpustakaan sekolah	2.504		2.504		100.00
	4) Pemberian beasiswa	2.594	Orang	2.594	Orang	100,00
	kepada siswa/					
	mahasiswa					
	berprestasi dan					
	kurang mampu	20	0	20	0	100,00
	5) Pemberian beasiswa	20	Orang	20	Orang	100,00
	kepada guru berprestasi untuk					
	melanjutkan studi					
	6) Pemberian insentif	309	Orang	309	Orang	100,00
	kepada guru di	309	Orang	309	Orang	100,00
	daerah terpencil					
	7) Angka melek huruf	19,97	Pddk	19,96	Pddk	99,95
	8) Angka rata-rata lama	12	Tahun	12	Tahun	100,00
	sekolah	12	i aniani	12	1 MIMI	100,00
	9) Angka partisipasi					
	murni:					
	- SD/MI/SDLB	87,50	%	87,75	%	100,29
		37,50	70	07,75	/ U	100,27

	- SMP/MTs/	88,00	%	88,26	%	100,30
	SMPLB					
	- SMA/SMK/MA/	70,50	%	70,83	%	100,47
	SMALB					
	10) Angka partisipasi					
	kasar:					
	- SD/MI/SDLB	94,00	%	94,37	%	100,39
	- SMP/MTs/	90,00	%	92,17	%	102,41
	SMPLB					
	- SMA/SMK/MA/	88,00	%	88,03	%	100,03
	SMALB					
	11) Angka putus sekolah:					
	- SD	0,09	%	0,04	%	155,56
	- SLTP	0,31	%	0,13	%	158.06
	- SLTA	0,32	%	0,14	%	146.88
	12) Rasio guru/murid:					
	- SD	1:32	Murid	1:18	Murid	115,22
	- SLTP	1:32	Murid	1:15	Murid	118,48
	- SLTA	1:32	Murid	1:14	Murid	119,57
	13) Rata-rata nilai UN					
	dan UAS:					
	a) SD/MI					
	- UN	4,00		4,00		100,00
	- UAS	6,50		7,25		111,54
	b) SMP/MTs					
	- UN	5,50		5,60		101,82
	- UAS	7,25		7,50		103,45
	c) SMA/MA/SMK					
	- UN	5,50		5,75		104,55
	- UAS	7,50		8,00		106,67
	14) Angka kelulusan:					
	- SD/MI	3.024	Orang	3.024	Orang	100,00
	- SMP/MTs	2.579	Orang	2.561	Orang	99,30
	- SMA/MA/SMK	2.449	Orang	2.419	Orang	98,78
	15) Rata-rata nilai paket		-		-	
	ujian:					
	a) Paket A					
	- UN	5,50		6,00		109,09
	- UAS	7,00		7,00		100,00
	b) Paket B					
	- UN	5,50		6,50		118,18
	- UAS	7,00		7,25		103,57
		•				
·	ů.					

	c) Paket C					
	c) Paket C - UN	5,50		6,50		118,18
	- UAS	7,00		7,50		107,14
	16) Jumlah penunjang	6.500	Orang	7,182	Orang	110,49
	layanan tetap dan	-, 0		,,,,,,	6	, . >
	layanan keliling					
	perpustakaan					
	daerah					
	17) Persentase	11,80	%	7,30	%	61,86
	peningkatan jumlah					
	koleksi buku di					
	perpustakaan daerah					
Sasaran 3:	1) Peningkatan:					
Meningkatnya	- Jumlah sarana pra-	51	Unit	51	Unit	100,00
Sumber Daya	sarana pelayanan					
Manusia,	kesehatan					
melalui	- Pelayanan dokter	248	Orang	183	Orang	73,79
peningkatan	dan perawat					
derajat kesehatan	- Jumlah obat-	149	Jenis	149	Jenis	100,00
dengan perluasan	obatan di					
akses yang	Puskesmas /Pustu/					
mudah, murah,	Poskeskel					
terjangkau,	2) Pemberian insentif	55	Orang	55	Orang	100,00
dukungan sarana	kepada bidan atau					
dan fasilitas	tenaga kesehatan di					
memadai,	daerah terpencil					
ketersediaan	3) Jumlah masyarakat	8.000	Orang	8.000	Orang	100,00
dokter, tenaga	miskin yang					
kesehatan dan	mendapat pelayanan					
keperawatan yang	Jamkesda					
cukup, dan mutu	4) Persentase	185	Jiwa	185	Jiwa	100,00
pelayanan yang	pelaksanaan					
terus membaik	kebijakan subsidi					
	silang bagi pasien					
	rawat inap					
	5) Angka harapan hidup	70,76	Tahun	66,38	Tahun	93,81
	6) Angka kematian bayi	4/1000	KH	6,5/1000	KH	61,54
	per 1.000 kelahiran					
	hidup					
	7) Angka kematian ibu	78/100.000	KH	130/100.000	KH	60,00
	per 1.000 kelahiran					
	hidup					

	8)	Persentase gizi buruk	0,80	%	0,50	%	137,50
		pada balita					
	9)	Persentase kecamatan bebas rawan gizi	0,86	%	0,50	%	141,86
	10)	Persentase Posyandu:					
	10)	- Purnama	50,00	%	57,14	%	114,28
		- Mandiri	7,00	%	10,00	%	142,86
	11)	Persentase penduduk	85,00	%	72,00	%	84,71
		yang memanfaatkan	02,00	, u	72,00	7.0	0 1,71
		Puskesmas					
	12)	Persentase persalinan	92,00	%	74,00	%	80,43
	12)	oleh tenaga kesehatan	> -, 00	, u	7 1,00	7.0	30,15
	13)	Rasio Puskesmas	1:23.215	PKM	1;23,215	PKM	100,00
		terhadap jumlah	1,20,210	112.1	1,20,210	112.11	100,00
		penduduk					
	14)	Penderita malaria:					
	11)	- Annual Malaria	< 10‰	Jiwa	< 29‰	Jiwa	34,48
		Incidence (AMI)	10,00	vivia	25700	0111 d	3 1, 10
		- Annual Parasite	< 1‰	Jiwa	< 2‰	Jiwa	50,00
		Incidence (API)	1,00	vivia	2700	0111 d	20,00
	15)	Angka kesakitan	2,5/1000	Pddk	3,1/1000	Pddk	76,00
		DBD/100.000 Jiwa	2,5,1000	T Class	2,1,1000	1 4411	, 0,00
	16)	Angka kesembuhan	86,00	%	81,00	%	94,19
	/	TBC	,				1 1,12
	17)	Angka penanganan	90,00	%	81,00	%	90,00
		Penyakit Kusta	,		,		
Sasaran 4:	1)	Penetapan One	5,00	%	5,00	%	100,00
Terwujudnya		Village One Program	,		,		
kebijakan		(satu kelurahan satu					
Anggaran		program unggulan)					
(APBD) yang	2)	Pembangunan Infra-					
proporsional dan		struktur lingkungan:					
Pro Rakyat, yang		- MCK Komunal	19,35	%	16,13	%	83,36
diprioritaskan		- Drainase/gorong-	7.280,00	M	6.000,00	M	82,42
pada upaya		gorong					
pemenuhan		- Pemenuhan	20,46	%	19,46	%	95,11
kebutuhan rakyat		kebutuhan jalan					
serta membiayai	L	lingkungan					
program	3)	Persentase pemberian	20,00	%	20,00	%	100,00
pembangunan		santunan kematian					
yang strategis,		bagi warga kurang					
juga program		mampu					
populis yang							

menyentuh kebutuhan dasar	4) Bantuan pembinaan bagi generasi muda	10,00	%	15,00	%	150,00
masyarakat, melalui desain program berbasis keswadayaan dan	5) Persentase pemanfaatan Dana Pembangunan Kelurahan (DPK)	100,00	%	100,00	%	100,00
berciri budaya	6) Jumlah kelompok usaha ekonomi kelurahan simpan pinjam yang difasilitasi pembentukannya	5	Klp.	5	Klp.	100,00
	7) Jumlah Posyandu yang menerima bantuan	70	Posy.	70	Posy.	100,00
	8) Peningkatan pemahaman tentang perlindungan anak PUG	340	Orang	340	Orang	100,00
Sasaran 5: Terwujudnya penataan infrastruktur perkotaan sebagai kota jasa dan perdagangan	Persentase penataan kawasan pasar Gamalama, Tapak I Plus dan Tapak II dengan aksentuasi ornament kebudayaan lokal	25,00	9%	25,00	%	100,00
dengan pemanfaatan ruang kota secara terpadu untuk mendukung interaksi spasial,	2) Pengoptimalan pasar Bastiong, pasar Dufa- Dufa, pasar Kotabaru dan pasar Sasa sebagai pasar tradisional	50,00	%	50,00	%	100,00
mobilitas dan aktivitas perkotaan yang tertib menuju terwujudnya Kota Ternate yang	3) Persentase penataan area depan Kedaton Kesultanan, lapangan Ngara Lamo, Dodoku Ali sebagai RTH berciri budaya	25,00	%	25,00	%	100,00
harmoni, sehat, aman, nyaman, & berciri budaya serta berwawasan lingkungan	4) Persentase pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	100,00	%	100,00	%	100,00

5)	Persentase pengendalian	100,00	%	100,00	%	100,00
6)	Dokumen perencanaan tata	3	Dok.	3	Dok.	100,00
7)	Peningkatan program partisipatif untuk mewujudkan Ternate sebagai Kota yang hijau, asri, bersih, nyaman dan ramah lingkungan	50	Kel.	40	Kel.	80,00
8)	Luas hutan yang terlindungi	4.403	На	4.403	На	100,00
9)	Perwujudan Ternate bebas sampah dan bebas banjir	4	Kec.	4	Kec.	100,00
10)	Persentase perusahaan yang memiliki UKL- UPL	60,00	%	50,00	%	83,33
11)	Peningkatan penghijauan kota	3	Kec.	3	Kec.	100,00
12)	Peningkatan perlindungan dan konservasi SDA	3	Kec.	3	Kec.	100,00
13)	Persentase tersedianya dokumen perencanaan pembangunan :					
	- RKPD Kota Ternate tahun 2012	100,00	%	100,00	%	100,00
	- KUA PPAS dan KUA PPAS Perubahan	100,00	%	100,00	%	100,00
	- RPJM Kota Ternate2011-2015	100,00	%	100,00	%	100,00
	- Ramperda RPJP Kota Ternate	100,00	%	100,00	%	100,00
[14)	Persentase tersedia data penunjang perencanaan:					

		•		,		
	- Ternate dalam	100,00	%	100,00	%	100,00
	- Data Indikator ekonomi daerah KotaTernat (PDRB dan Inflasi)	100,00	%	100,00	%	100,00
	- Monografi Kota Ternate tahun 2011	100,00	%	100,00	%	100,00
	 Standar satuan harga (SSH) Pemerintah Kota Ternate 	100,00	%	100,00	%	100,00
	- Standar Harga Satuan Bangunan Negara (HSBGN) dan harga satuan konstruksi Pemerintah Kota Ternate	100,00	%	100,00	%	100,00
1:	5) Perda RTRW Kota Ternate	1	Dok.	1	Dok.	100,00
10	6) Laporan pertanggungjawaban Walikota akhir tahun	1	Dok.	1	Dok.	100,00
1	7) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2010	1	Dok.	1	Dok.	100,00
1:	8) Persentase penyediaan fasilitas penunjang aktivitas perhubungan laut	100,00	%	100,00	%	100,00
19	9) Persentase terminal penumpang dalam kondisi baik	70,00	%	70,00	%	100,00
20	0) Persentse pelabuhan lokal dalam kondisi baik	100,00	0/0	100,00	%	100,00
2	Persentase penyediaan fasilitas traffic light	100,00	0/0	100,00	0/0	100,00

	22) Jumlah fasilitas parkir yang tersedia	100,00	%	100,00	%	100,00
	23) Persentase jalan yang diberi pengaman	80,00	%	80,00	%	100,00
	24) Rasio jalan yang bermarka	100,00	%	100,00	%	100,00
Sasaran 6: Terwujudnya good government, dengan sumber daya	Jumlah organisasi perangkat daerah yang efektif dan efisien	36	SKPD	41	SKPD	113,89
aparatur yang profesional, kreatif, inovatif, yang	Jumlah PNS yang menerima Satya Lencana Karya Satya	315	Orang	315	Orang	100,00
mampu menjamin peningkatan kualitas pelayanan, akuntabilitas dan	3) Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur :	74	Orana	74	Orana	100.00
kemandirian masyarakat	- Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan formal	76	Orang	76	Orang	100,00
	 Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan non formal 	104	Orang	104	Orang	100,00
	 Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural 	478	Orang	478	Orang	100,00
	4) Jumlah penyelesaian berkas kepegawaian	5	Jenis	5	Jenis	100,00
	5) Jumlah LHP pemeriksaan reguler yang diterbitkan	25	LHP	20	LHP	80,00
	6) Jumlah LHP pemeriksaan khusus/ kasus pengaduan yang diterbitkan	14	LHP	12	LHP	85,71
	7) Persentase penyelesaian temuan hasil pemeriksaan :Inspektorat Kota Ternate	30,00	%	7,86	%	26,20

- Inspektorat Provinsi Maluku	100,00	%	100,00	%	100,00
Utara	100.00	0/	100.00	0/	100.00
- Itjen Kementrian	100,00	%	100,00	%	100,00
8) Formasi dan evaluasi	39	SKPD	39	SKPD	100,00
jabatan perangkat					
daerah					
9) Buku tupoksi	75	Eksp	75	Eksp	100,00
perangkat daerah					
10) Buku tata naskah	100	Eksp	100	Eksp	100,00
dinas					
11) Buku himpunan	100	Eksp	100	Eksp	100,00
Perda dan Perwali					
12) Dokumen penetapan	75	Eksp	75	Eksp	100,00
kinerja SKPD tahun					
2011					
13) Penjaringan aspirasi	7	Kec.	7	Kec.	100,00
masyarakat					
14) Peningkatan	25	Orang	25	Orang	100,00
kapasitas pimpinan					
dan anggota DPRD					
dalam menunjang					
kinerja lembaga					
perwakilan rakyat					
daerah					
15) Persentase	100,00	%	100,00	%	100,00
pemanfaatan dan					
partisipatif					
16) Persentase	50,17	%	51,33	%	102,31
peningkatan PAD					
17) Penerbitan laporan	100,00	%	100,00	%	100,00
keuangan pemerintah	ŕ				
daerah (LKPD) tahun					
2010 tepat waktu					
18) Penetapan dokumen					
anggaran tepat waktu:					
- APBD 2012	100,00	%	100,00	%	100,00
- APBD Perubahan	100,00	%	100,00	%	100,00
2011	100,00	, •	100,00	, •	150,00
19) Peningkatan	75,00	%	75,00	%	100,00
manajemen aset	75,00	/ U	75,00	/ U	100,00
daerah					
Gaçıan					
	L		L		

Sasaran 7:	1) Jumlah koperasi,	6	Kop.	6	Кор.	100,00
Meningkatnya	yang diberikan	_	P			
kesejahteraan	bantuan modal usaha					
masyarakat Petani,	2) Jumlah kelompok	7	Klp.	7	Klp.	100,00
Nelayan, Pekebun,	perempuan dan	,	p·		р-	
Peternak, Buruh	pemuda yang					
dan Pekerja,	diberikan modal					
Koperasi, Usaha	usaha					
Mikro Kecil	3) Jumlah kursus dan	16	Orang	16	Orang	100,00
Menengah	pelatihan bagi		8			
(UMKM),	pengangguran					
Pedagang Kaki	terbuka <i>unskill</i>					
Lima, dan	4) Jumlah Koperasi aktif	75	Kop.	87	Kop.	116,00
Pedagang	5) Persentase	7,36	%	8,03	%	109,10
Tradisional, menuju	pertumbuhan	,,,,,,	, 0	,,,,,	, 0	103,10
pada kemandirian	ekonomi					
dan kemampuan	6) Tingkat Inflasi	3,00	%	4,52	%	49,33
memenuhi	7) Pendapatan perkapita	2.500.000,00	Rp	2.955.276,00	Rp	118,21
kebutuhan dasar	8) Indeks pembangunan	74,62	%	76,93	%	103,10
(basic need)	manusia (IPM)	7 1,92	, 0	, 0,,,,	, 0	105,10
	9) Jumlah Koperasi	12	Kop.	10	Kop.	83,33
	yang berkualitas		p·			
	10) Jumlah UKM	8.000	UKM	8.282	UKM	103,53
	11) Nilai modal kerja dan	735.223.418.220	Rp	748.123.416.220	Rp	101,75
	investasi UKM		- -			
	12) Nilai Omzet UKM	1.278.397.557.270	RP	1.388.947.557.270	RP	108,65
	13) Penyerapan tenaga	30,00	%	30,03	%	100,10
	kerja	,		,		
	14) Tingkat	10,42	%	8,66	%	120,32
	pengangguran					
	terbuka					
	15) Peningkatan	10	Perus.	10	Perus.	100,00
	pengembangan					
	informasi pasar kerja					
	16) Peningkatan	5	Klp.	5	Klp.	100,00
	pengembangan				•	
	sarana dan prasarana					
	sektor formal					
	17) Penataan pedagang	5	Lokasi	5	Lokasi	100,00
	Kaki Lima					
	18) Tersalurnya RASKIN	7	Kec.	7	Kec.	100,00
	19) Operasi pasar murah	3	Kec.	3	Kec.	100,00
	-					

	20) Peningkatan produksi	57,50	Ton	57,50	Ton	100,00
	pangan					
	21) Peningkatan produksi tanaman holtikultura	156,4	Ton	131,3	Ton	83,95
	22) Peningkatan produksi	4.520	Ekor	4,520	Ekor	100,00
	peternakan	7,520	LKOI	7,520	LKOI	100,00
	23) Meningkatnya	8,00	Ton	8,00	Ton	100,00
	produksi perkebunan	0,00	1011	0,00	1011	100,00
	24) Persentase	100,00	%	100,00	%	100,00
	tertanggulanginya	,				,
	penyakit ternak					
	25) Berkembangnya	20	Kel.	20	Kel.	100,00
	usaha agribisnis					
	26) Peningkatan	23,67	%	25,27	%	106,76
	keikutsertaan					
	masyarakat dalam ber					
	KB					
	27) Jumlah sarana	124	Unit	124	Unit	100,00
	prasarana KB dan KS					
	28) Meningkatnya	286	Orang	286	Orang	100,00
	ketahanan keluarga					
	dalam peningkatan					
	kesertaan, pembinaan					
	dan kemandirian ber					
	KB					
Sasaran 8:	1) Penyediaan database	100,00	%	100,00	%	100,00
Terwujudnya	kependudukan online					
pelayanan publik	2) Jumlah penduduk	190.737	Jiwa	190.184	Jiwa	99,71
oleh aparatur yang	3) Laju Pertumbuhan	3,83	%	3,53	%	92,17
profesional, dengan	Penduduk					
pelayanan yang	4) Rasio penduduk ber	1:1	Pddk	1:0,90	Pddk	90,00
cepat, mudah,	KTP					
murah, nyaman dan berkualitas	5) Rasio keluarga ber	1:1	KK	1:0,77	KK	76,13
berkuaritas	KK		T'	1 0 47	T'	47.00
	6) Rasio bayi berakte	1:1	Jiwa	1:0,47	Jiwa	47,00
	kelahiran		17.1		TZ .1	0.4.42
	7) Jumlah kelurahan	77	Kel.	65	Kel.	84,42
	yang terlayani e-KTP	(500	Times	(500	Tive	100.00
	8) Jumlah penduduk	6.500	Jiwa	6.500	Jiwa	100,00
	miskin	100.00	0/	100.00	0/	100.00
	9) Persentase	100,00	%	100,00	%	100,00
	penanganan kejadian kebakaran					
	KCUaKaiali					

	10) Persentase penanganan kejadian bencana alam	100,00	%	100,00	%	100,00
	11) Jumlah surat kabar nasional/lokal	10	Penerbit	10	Penerbit	100,00
	12) Jumlah penyiaran radio/tv lokal	9	Stas.	9	Stas.	100,00
Sasaran 9 : Meningkatnya	Pemetaan potensi masyarakat pesisir	3	Keg.	3	Keg.	100,00
kemandirian masyarakat, melalui pengembangan ekonomi	Jumlah kelompok yang diberikan bantuan fasilitas bantuan dan peralatan	25	Klp.	25	Klp.	100,00
kerakyatan berbasis potensi pesisir, melalui pengembangan usaha mikro kecil, menengah, koperasi	3) Jumlah kelompok pengolahan hasil produksi perikanan diberikan bantuan modal usaha dan pendampingan	1	Klp.	1	Klp.	100,00
yang mengarah pada produktifitas, dan kemampuan daya saing	4) Pelaksanaan kerja- sama dengan pergu- ruan tinggi dan LSM dalam pendampingan pemberdayaan	1	Lemb.	1	Lemb.	100,00
	5) Peningkatan kunjungan wisatawan lokal dan manca Negara					
	- WNI	92.350	Orang	92.385	Orang	100,04
	- WNA	800	Orang	831	Orang	103,88
	6) Terkendalinya harga kebutuhan pokok di Ternate	12	Bulan	12	Bulan	100,00
	7) Terpenuhinya kebutuhan sembilan bahan pokok di Ternate	12	Bulan	12	Bulan	100,00
	Meningkatnya produktifitas dan mutu produk usaha	5	Jenis	5	Jenis	100,00
Sasaran 10: Terjawabnya permasalahan	Penguatan kurikulum pendidikan agama dan kurikulum	35,00	%	40,00	%	114,29

perkotaan seperti	muatan lokal tentang					
menurunnya	budaya dan adat					
kesadaran	istiadat Ternate	106	/EDO	106	T.D.O.	100.00
spiritualitas	2) Jumlah taman	186	TPQ	186	TPQ	100,00
keberagamaan,	pengajian Al-Quran	_		_		100.00
solidaritas sosial	3) STQ Tingkat Kota	7	Khafilah	7	Khafilah	100,00
dan kesadaran	Ternate					
kebudayaan	4) Khafilah Kota	22	Orang	22	Orang	100,00
sebagai identitas	Ternate pada STQ					
daerah dan jati diri	tingkat Provinsi					
masyarakat,	Maluku Utara					
meningkatkan etos	5) Pembinaan Khatib	60	Orang	60	Orang	100,00
sosial dan	dan Imam					
optimalisasi	6) Persentase Pelepasan	100,00	%	100,00	%	100,00
penanggulang-an	calon jamaah haji dan					
masalah-masalah	penjemputan haji					
sosial seperti	Kota Ternate					
minuman keras,	7) Upaya pembinaan	7	Kec.	7	Kec.	100,00
PSK, narkoba serta	kerukunan antar umat					
permasalahan sosial	beragama, antar suku,					
lainnya	etnis dan sub etnis					
	8) Pelestarian situs,	14	Jenis	14	Jenis	100,00
	artifak dan dokumen					
	sejarah dan aset seni					
	budaya Kota Ternate					
	9) Jaminan	145	Orang	145	Orang	100,00
	kesejahteraan Imam					
	Masjid, Pendeta,					
	Guru Mengaji, Guru					
	TPA dan Pembimbing					
	Jemaat					
	10) Jaminan pelestarian	4	Keg.	4	Keg.	100,00
	adat dan budaya		-		-	
	Ternate					
	11) Peningkatan	150	Orang	150	Orang	100,00
	kesadaran pemuda		C		C	
	terhadap bahaya					
	Narkoba					
	12) Peningkatan kualitas	4	Bh	4	Bh	100,00
	sarana olahraga					,
	3					
	i.			1		

	13) Jumlah atlit yang	162	Orang	162	Orang	100,00
	berprestasi pada	102	Orung	102	Orang	100,00
	kompetisi cabang					
	olahraga unggulan					
	14) Pemberantasan	2	Jenis	2	Jenis	100,00
	,	2	Jems	2	Jems	100,00
	penyakit masyarakat					
	15) Peningkatan	50	Orang	50	Orang	100,00
	pemberdayaan					
	kelembagaan sosial					
	16) Pembinaan	4	Orang	4	Orang	100,00
	penyandang cacat					
	dan trauma					
	17) Bantuan tanggap	2	Kel.	2	Kel.	100,00
	darurat korban					
	bencana alam sosial					
	dan Penyandang					
	Masalah					
	Kesejahteraan Sosial					
	(PMKS)					
Sasaran 11:	1) Peninjauan kembali	2	Perda	2	Perda	100,00
Terjawabnya	peraturan daerah					
masalah penegakan	2) Pengendalian	4	Kec.	4	Kec.	100,00
dan kepastian	keamanan dan					
hukum di daerah,	kenyamanan					
termasuk upaya	lingkungan					
mengadakan	3) Pemeliharaan	4	Kec.	4	Kec.	100,00
regulasi daerah	keamanan dan					
yang mampu	ketertiban masyarakat					
mendorong	serta pencegahan					
partisipasi publik	tindak kriminal					
yang dinamis dan	4) Penegakan PERDA	4	Kec.	4	Kec.	100,00
konstruktif, serta	dan Peraturan					
regulasi untuk	pelaksana					
menjamin kualitas	5) Sertifikasi tanah bagi	15	Orang	15	Orang	100,00
pelayanan publik	masyarakat kurang				6	
	mampu					
	6) Penyelesaian masalah	100,00	%	66,00	%	66,00
	hukum Pemda Kota	100,00	/ U	00,00	70	00,00
	Ternate					
	1 Ciliate	1		<u>i</u>		

B. ANALISA CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian kinerja pada Formulir Pengukuran Kinerja Pemerintah Kota Ternate tahun 2011, diketahui Kinerja Pemerintah Kota Ternate tahun 2011 berada pada kategori **Sangat Berhasil**. Hal tersebut terlihat dari 11 sasaran dengan jumlah indikator kinerja sebanyak 204, sebanyak 193 (94,61%) indikator kinerja mencapai nilai optimal ≥80,00% dan hanya 11 (5,39%) indikator kinerja sasaran yang nilai capaiannya kurang optimal <80,00%. Realisasi pencapaian sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

Sasaran strategis 1:

Percepatan pengembangan infrastruktur secara merata dan berkeadilan, terutama pada kecamatan-kecamatan di luar kawasan perkotaan untuk membuka keterisolasian, serta memungkinkan terjadinya mobilitas arus barang dan manusia yang mempercepat perkembangan secara merata pada semua wilayah kecamatan.

Pencapaian target sasaran 1 tersebut adalah sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGE	ET	REALISA	ASI	%
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (pembangunan infrastruktur wilayah di Kecamatan.	101.955,00	M	101.955,00	M	100,00
2	Peningkatan pembangunan jalan	14.651,50	M	19.381,20	M	132,28
3	Persentase pemenuhan kebutuhan jembatan	4,64	%	4,13	%	89,01
4	Persentase jembatan dalam kondisi baik	82,68	%	82,68	%	100,00
5	Pembangunan talud/ turap/bronjong	51,00	M	46,00	M	90,20
6	Cakupan pemerataan pelayanan air bersih kawasan dataran tinggi	3	Lokasi	3	Lokasi	100,00
7	Cakupan pemerataan pelayanan listrik yang tidak terjangkau layanan PLN	1	Kel.	1	Kel.	100,00

Pada tabel tersebut diatas menunjukan bahwa tujuh Indikator kinerja sasaran, yaitu: proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (pembangunan infrastruktur wilayah di Kecamatan, peningkatan pembangunan jalan, persentase pemenuhan kebutuhan jembatan, persentase jembatan dalam kondisi baik, pembangunan talud/turap /bronjong, cakupan pemerataan pelayanan air bersih kawasan dataran tinggi, cakupan pemerataan pelayanan listrik yang tidak terjangkau layanan PLN telah mencapai target yang ditetapkan.

Sasaran 2:

Meningkatkan Sumber Daya Manusia, khususnya peningkatan derajat pendidikan melalui perluasan akses pendidikan yang murah dan terjangkau, sarana dan fasilitas yang memadai, tenaga guru yang cukup, dan mutu yang terus membaik

Pencapaian target sasaran 2 tersebut adalah sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGE	Γ	REAL	ISASI	%
1	Peningkatan:					
	- Sarana pendidikan	11	Jenis	11	Jenis	100,00
	- Pemerataan tenaga pengajar	150	Guru	120	Guru	80,00
	- Peningkatan mutu pendidikan	204	Guru	173	Guru	84,80
2	Dana bantuan penunjang kegiatan	134	Sekolah	134	Sekolah	100,00
_	sekolah (penunjang BOS) untuk	15.	5 4110 1411	10.	2 4110 1411	100,00
	mewujudkan pendidikan dasar yang					
	berkualitas					
3	Penyediaan buku pelajaran di	1.670	Judul	1.670	Judul	100,00
	perpustakaan sekolah	1.070	Judui	1.070	3 dddi	100,00
4	Pemberian beasiswa kepada	2.594	Orang	2.594	Orang	100,00
	siswa/mahasiswa berprestasi dan	2,371	Orang	2.571	Orang	100,00
	kurang mampu					
5	Pemberian beasiswa kepada guru	20	Orang	20	Orang	100,00
	berprestasi untuk melanjutkan studi	20	Orang	20	Orang	100,00
6	Pemberian insentif kepada guru di	309	Orang	309	Orang	100,00
	daerah terpencil	307	Orang	307	Orang	100,00
7	Angka melek huruf	19,97	Pddk	19,96	Pddk	99,95
8	Angka merek nurui Angka rata-rata lama sekolah	19,97	Tahun	19,96	Tahun	100,00
9	Angka Partisipasi Murni:	12	1 alluil	12	1 alluli	100,00
)	- SD/MI/SDLB	87,50	%	87,75	%	100,29
			%		%	
	- SMP/MTs/SMPLB	88,00	% %	88,26	% %	100,30
10	- SMA/SMK/MA/SMALB	70,50	70	70,83	70	100,47
10	Angka Partisipasi Kasar : - SD/MI/SDLB	04.00	0/	04.27	0/	100.20
		94,00	%	94,37	%	100,39
	- SMP/MTs/SMPLB	90,00	% 0/	92,17	% 0/	102,41
1.1	- SMA/SMK/MA/SMALB	88,00	%	88,03	%	100,03
11	Angka Putus Sekolah:	0.00	0/	0.04	07	155.56
	- SD - SLTP	0,09	% 0/	0,04	% 0/	155,56
		0,31	% 0/	0,13	% 0/	158,06
12	- SLTA Rasio Guru/murid:	0,32	%	0,17	%	146,88
12		1.22	N (' d	1.10	N 4: -1	115 22
		1:32	Murid	1:18	Murid	115,22
	- SLTP	1:32	Murid	1:15	Murid	118,48
1.2	- SLTA	1:32	Murid	1:14	Murid	119,57
13	Rata-rata nilai UN dan UAS:					
	a) SD/MI	4.00		4.00		100.00
	- UN	4,00		4,00		100,00
	- UAS	6,50		7,25		111,54
	b) SMP/MTs	5 50		F (0		101.02
	- UN	5,50		5,60		101,82
	- UAS	7,25		7,50		103,45
	c) SMA/MA/SMK	E 50		£ 75		104.55
	- UN	5,50		5,75		104,55
1.4	- UAS	7,50		8,00		106,67
14	Angka Kelulusan:	2.024		2.02.4	0	100.00
	- SD/MI	3.024	Orang	3.024	Orang	100,00
	- SMP/MTs	2.579	Orang	2.561	Orang	99,30
1.7	- SMA/MA/SMK	2.449	Orang	2.419	Orang	98,78
15	Rata-Rata Nilai Paket Ujian:					
	a) Paket A			<i>-</i> • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		100.00
	- UN	5,50		6,00		109,09
	- UAS	7,00		7,00		100,00
	b) Paket B			<i></i>		110.10
	- UN	5,50		6,50		118,18
	- UAS	7,00		7,25		103,57

	c) Paket C - UN - UAS	5,50 7,00	6,50 7,50	118,18 107,14
16	Jumlah penunjang layanan tetap dan layanan keliling perpustakaan daerah	6.500 Orang	7.182 Orang	110,49
17	Persentase peningkatan jumlah koleksi buku di perpustakaan daerah	11,80 %	7,30 %	61,86

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa enam belas Indikator kinerja sasaran telah mencapai target, yaitu: peningkatan sarana pendidikan, pemerataan tenaga pengajar, peningkatan mutu pendidikan, dana bantuan penunjang kegiatan sekolah (penunjang BOS) untuk mewujudkan pendidikan dasar yang berkualitas, Penyediaan buku pelajaran di perpustakaan sekolah, Pemberian beasiswa kepada siswa/mahasiswa berprestasi dan kurang mampu, pemberian beasiswa kepada guru berprestasi untuk melanjutkan studi, pemberian insentif kepada guru di daerah terpencil, angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi murni (SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/SMK/MA/SMALB), angka partisipasi kasar (SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/SMK/MA/SMALB), angka putus sekolah (SD, SLTP, SLTA), rasio guru/murid (SD, SLTP, SLTA), rata-rata nilai UN dan UAS (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK), angka kelulusan (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK), rata-rata nilai paket ujian (paket A,B dan C), Jumlah penunjang layanan tetap dan layanan keliling perpustakaan daerah. Namun terdapat satu indikator kinerja sasaran yang belum mencapai target, yaitu persentase peningkatan jumlah koleksi buku di perpustakaan daerah dengan nilai capaian 61,83%. Rendahnya nilai capaian tersebut disebabkan adanya pengurangan anggaran untuk pengadaan buku, sehingga jumlah exemplar yang direncanakan sebanyak 1.181 yang dapat diadakan hanya sebanyak 695 exemplar. Upaya yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut kedepan, yaitu melakukan penambahan anggaran untuk meningkatkan koleksi buku pada perpustakaan daerah.

Sasaran 3:

Meningkatnya Sumber Daya Manusia, melalui peningkatan derajat kesehatan dengan perluasan akses yang mudah, murah, terjangkau, dukungan sarana dan fasilitas memadai, ketersediaan dokter, tenaga kesehatan dan keperawatan yang cukup, dan mutu pelayanan yang terus membaik

Pencapaian target sasaran 3 tersebut adalah sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Peningkatan: - Jumlah sarana prasarana pelayanan kesehatan - Pelayanan dokter dan perawat	51 Unit 248 Orang	51 Unit 183 Orang	100,00 73,79

	- Jumlah obat-obatan di Puskesmas/Pustu /Poskeskel	149	Jenis	149	Jenis	100,00
2	Pemberian insentif kepada bidan atau tenaga kesehatan di daerah terpencil	55	Orang	55	Orang	100,00
3	Jumlah masyarakat miskin yang mendapat pelayanan Jamkesda	8.000	Orang	8.000	Orang	100,00
4	Persentase pelaksanaan kebijakan subsidi silang bagi pasien rawat inap	185	Jiwa	185	Jiwa	100,00
5	Angka Harapan Hidup	70,76	Tahun	66,38	Tahun	93,81
6	Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup	4/1000	KH	6,5/1000	KH	61,54
7	Angka kematian ibu per 1.000 kelahiran hidup	78/100.000	KH	130/100.000	KH	60,00
8	Persentase gizi buruk pada balita	0.80	%	0.50	%	137,50
9	Persentase kecamatan bebas rawan Gizi	0,86	%	0,50	%	141,86
10	Persentase Posyandu:					
	- Purnama	50,00	%	57,14	%	114,28
	- Mandiri	7,00	%	10,00	%	142,86
11	Persentase Penduduk yang memanfaatkan Puskesmas	85,00	%	72,00	%	84,71
12	Persentase persalinan oleh tenaga kesehatan	92,00	%	74,00	%	80,43
13	Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	1:23.215	PKM	1:23.215	PKM	100,00
14	Penderita Malaria: - Annual Malaria Incidence (AMI)	< 10‰	Jiwa	< 29‰	Jiwa	34,48%
	- Annual Parasite Incidence (API)	< 1‰	Jiwa	< 2‰	Jiwa	50,00%
15	Angka kesakitan DBD/100.000 Jiwa	2,5/1000	Pddk	3,1/1000	Pddk	76,00
16	Angka kesembuhan TBC	86,00	%	81,00	%	94,19
17	Angka penanganan Penyakit Kusta	90,00	%	81,00	%	90,00

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa dua belas indikator kinerja sasaran telah mencapai target, yaitu: peningkatan sarana prasarana pelayanan kesehatan, jumlah obat-obatan di Puskesmas/Pustu /Poskeskel, pemberian insentif kepada bidan atau tenaga kesehatan di daerah terpencil, jumlah masyarakat miskin yang mendapat pelayanan Jamkesda, persentase pelaksanaan kebijakan subsidi silang bagi pasien rawat inap, angka harapan hidup, persentase gizi buruk pada balita, Persentase kecamatan bebas rawan gizi, Persentase Posyandu purnama dan mandiri, persentase Penduduk yang memanfaatkan Puskesmas, persentase persalinan oleh tenaga kesehatan, rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk, angka kesembuhan TBC dan Angka penanganan Penyakit Kusta. Sedangkan indikator kinerja sasaran yang belum mencapai target sebanyak lima indikator kinerja sasaran, yaitu: pelayanan dokter dan perawat nilai capaian 73,79%, angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup nilai capaian 61,54%, angka kematian ibu per 1.000 kelahiran hidup nilai capaian 60,00%, penderita Malaria yang meliputi

Annual Malaria Incidence (AMI) nilai capaian 34,48% dan Annual Parasite Incidence (API) nilai capaian 50,00%, dan angka kesakitan DBD/100.000 Jiwa nilai capaian 76,00%.

Rendahnya nilai capaian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1. Pelayanan dokter dan perawat nilai capaian 73,79%, disebabkan: belum adanya institusi pendidikan/fakultas kedokteran di Ternate dan juga disebabkan kuota penerimaan tenaga kesehatan baik dokter, perawat dan bidan sebagai PNS masih kurang. Upaya yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah: bekerjasama dengan institusi pendidikan untuk menyiapkan tenaga dokter di Ternate, pemberian insentif yang memadai kepada tenaga kesehatan, menyekolahkan anak daerah ke fakultas kedokteran dengan ikatan dinas dan memperbesar kuota penerimaan PNS untuk tenaga kesehatan.
- 2. Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup nilai capaian 61,54%, disebabkan masih tingginya ibu hamil dengan kekurangan energy kronik (KEK) yang menyebabkan bayi lahir dengan berat lahir rendah sebagai faktor yang menyebabkan kematian bayi, faktor sosial budaya dan keterlambatan mengenal tanda bahaya pada bayi baru lahir di masyarakat. Upaya yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut kedepan adalah: memberikan makanan tambahan (PMT) pada Bumil KEK, meningkatkan kunjungan rumah untuk melakukan kunjungan Neonatal, meningkatkan penyuluhan berbasis masyarakat (TOMA, TOGA), melakukan penyuluhan tanda bahaya pada bayi serta melakukan manajemen terpadu pada bayi muda untuk skrening bayi dengan faktor resiko.
- 3. Angka kematian ibu per 1.000 kelahiran hidup nilai capaian 60,00%, disebabkan karena kehamilan dengan 4 terlalu : terlalu tua, terlalu muda, terlalu dekat dan terlalu banyak, terlambat mengenal tanda bahaya pada ibu dan terlambat merujuk ibu hamil, bersalin dengan faktor resiko, terlambat mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan dan rendahnya sosial ekonomi. Untuk mengatasi masalah tersebut, kedepan akan dilakukan sosialisasi dengan sasaran ibu hamil dan bersalin, pelacakan kasus resiko tinggi pada ibu hamil, memperluas jangkauan pelayanan ibu dengan menyiapkan puskesmas PONED, meningkatkan penyuluhan tentang tanda bahaya pada ibu hamil, meningkatkan pengetahuan bidan tentang PPGDON dan membangun rumah tunggu untuk rumah Mayau.
- 4. Penderita Malaria yang meliputi Annual Malaria Incidence (AMI) nilai capaian 34,48% dan Annual Parasite Incidence (API) nilai capaian 50,00%, disebabkan masih kurangnya koordinasi LS terkait dalam pengendalian dan penanggulangan malaria, tingginya mobilitas penduduk, banyaknya breading place (tempat perindukan nyamuk) baik yang permanent maupun yang tidak permanent, kurangnya kesadaran masyarakat untuk melindungi diri dari kontak nyamuk, kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang PHBS, gerakan PSN masih kurang, penyuluhan yang belum optimal, penggunaan kelambu yang belum optimal dan tingginya tingkat penularan malaria, sistem kewaspadaan dini dan pemantauan wilayah

setempat masih rendah, kurangnya kesadaran masyarakat dalam kepatuhan minum obat. Untuk mengatasi masalah tersebut maka perlu meningkatkan koordinasi LS terkait dalam pengendalian dan penanggulangan malaria, meningkatkan screening dan identitas lengkap, meningkatkan pengamatan dan pengendalian jentik pada daerah breading, sosialisasi dan monitoring penggunaan kelambu sehingga mengurangi kontak langsung dengan nyamuk, meningkatkan penyuluhan, meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam gerakan kerja bakti di masyarakat, meningkatkan penyuluhan, sosialisasi tentang penggunaan kelambu dan sistem survailance penyakit malaria lebih ditingkatkan, peningkatan SKD dan PWS secara kontinyu dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang protap pengobatan malaria yang tepat.

5. Angka kesakitan DBD/100.000 Jiwa nilai capaian 76,00% disebabkan sistem kewaspadaan dini dan PWS belum optimal, belum optimalnya kegiatan penyuluhan, masih kurangnya kesadaran masyarakat akan gerakan 3M Plus, kurangnya koordinasi LS (rumah sakit) dalam pelaporan kasus DBD, keterlambatan keluarga untuk membawa pasien ke unit pelayanan kesehatan (sudah demam), adanya siklus tahunan penghujan yang tidak beraturan, masih banyak jentik Aedes Aegypti. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka perlu meningkatkan sistem kewaspadaan dini, optimalisasi kegiatan penyuluhan baik di luar gedung maupun di dalam gedung, meningkatkan koordinasi dalam pelaporan, meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat tentang protap penanganan DBD, meningkatkan SKD dan PWS yang diikuti dengan upaya-upaya pencegahan (instruksi SKD dari puskesmas ke kelurahan, distribusi abate, pemantauan jentik dan pencegahan penularan dengan melakukan kegiatan fooging/penyemprotan), meningkatkan pengawasan jentik dengan kegiatan abatesasi.

Sasaran strategis 4:

Terwujudnya kebijakan Anggaran (APBD) yang proporsional dan Pro Rakyat, yang diprioritaskan pada upaya pemenuhan kebutuhan rakyat serta membiayai program pembangunan yang strategis, juga program populis yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, melalui desain program berbasis keswadayaan dan berciri budaya

Pencapaian target sasaran 4 tersebut adalah sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Penetapan One Village One	5,00 %	5,00 %	100,00
	Program (satu kelurahan, satu			
	program unggulan)			
2	Pembangunan Infrastruktur			
	lingkungan;			
	- MCK Komunal	19,35 %	16,13 %	83,36
	- Drainase/gorong-gorong	7.280,00 M	6.000,00 M	82,42
	- Pemenuhan kebutuhan jalan	20,46 %	19,46 %	95,11
	lingkungan		·	

3	Persentase pemberian santunan kematian bagi warga kurang mampu	20,00	% 0	20,00	%	100,00
4	Bantuan pembinaan bagi generasi muda	10,00	%	15,00	%	150,00
5	Persentase pemanfaatan Dana Pembangunan Kelurahan (DPK)	100,00	%	100,00	%	100,00
6	Jumlah kelompok usaha ekonomi kelurahan simpan pinjam yang difasilitasi pembentukannya	5	Klp.	5	Klp.	100,00
7	Jumlah Posyandu yang menerima bantuan	70	Posy.	70	Posy.	100,00
8	Peningkatan pemahaman tentang perlindungan anak PUG	340	Orang	340	Orang	100,00

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa delapan Indikator kinerja sasaran telah mencapai target, yaitu: penetapan *One Village One Program* (satu kelurahan, satu program unggulan), pembangunan infrastruktur lingkungan (MCK komunal, drainase /gorong-gorong dan pemenuhan kebutuhan jalan lingkungan), persentase pemberian santunan kematian bagi warga kurang mampu, bantuan pembinaan bagi generasi muda, Persentase pemanfaatan Dana Pembangunan Kelurahan (DPK), jumlah kelompok usaha ekonomi kelurahan simpan pinjam yang difasilitasi pembentukannya, jumlah Posyandu yang menerima bantuan dan peningkatan pemahaman tentang perlindungan anak PUG.

Sasaran strategis 5:

Terwujudnya penataan infrastruktur perkotaan sebagai kota jasa dan perdagangan dengan pemanfaatan ruang kota secara terpadu untuk mendukung interaksi spasial, mobilitas dan aktivitas perkotaan yang tertib menuju terwujudnya Kota Ternate yang harmoni, sehat, aman dan nyaman dan berciri budaya serta berwawasan lingkungan

Pencapaian target sasaran 5 tersebut adalah sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISA	SI	%
1	Persentase penataan kawasan pasar Gamalama, Tapak I Plus dan Tapak II dengan aksentuasi ornament kebudayaan lokal	25,00	%	25,00	%	100,00
2	Pengoptimalan pasar Bastiong, pasar Dufa-dufa, pasar Kotabaru dan pasar Sasa sebagai pasar tradisional	50,00	%	50,00	%	100,00
3	Persentase penataan area depan Kedaton Kesultanan, lapangan Ngara Lamo, Dodoku Ali sebagai RTH berciri budaya	25,00	%	25,00	%	100,00
4	Persentase pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	100,00	%	100,00	%	100,00
5	Persentase pengendalian pemanfaatan ruang	100,00	%	100,00	%	100,00
6	Dokumen perencanaan tata ruang	3	Dok.	3	Dok.	100,00

7	Peningkatan program partisipatif	50	Kel.	40	Kel.	80,00
'	untuk mewujudkan Ternate sebagai	50	IXCI.	40	IXCI.	30,00
	Kota yang hijau, asri, bersih,					
	nyaman dan ramah lingkungan					
8	Luas hutan yang terlindungi	4.403	На	4.403	На	100,00
9	Perwujudan Ternate bebas sampah	4	Kec.	4	Kec.	100,00
"	dan bebas banjir	'	icc.	•	1200.	100,00
10	Persentase perusahaan yang	60,00	%	50,00	%	83,33
10	memiliki UKL-UPL	00,00	70	20,00	70	03,33
11	Peningkatan penghijauan kota	3	Kec.	3	Kec.	100,00
12	Peningkatan perlindungan dan	3	Kec.	3	Kec.	100,00
	konservasi SDA					
13	Persentase tersedianya dokumen					
	perencanaan pembangunan:					
	- RKPD Kota Ternate Tahun	100,00	%	100,00	%	100,00
	2012	•		•		
	- KUA PPAS dan KUA PPAS	100,00	%	100,00	%	100,00
	Perubahan					
	- RPJM Kota Ternate 2011-2015	100,00	%	100,00	%	100,00
	- Ranperda RPJP Kota Ternate	100,00	%	100,00	%	100,00
14	Persentase tersedia Data Penunjang					
	perencanaan:					
	- Ternate dalam angka	100,00	%	100,00	%	100,00
	- Data Indikator Ekonomi Daerah	100,00	%	100,00	%	100,00
	Kota Ternate (PDRB Kota					
	Ternate dan Inflasi)					
	- Data Indikator Monografi Kota	100,00	%	100,00	%	100,00
	Ternate tahun 2011					
	- Standar satuan harga (SSH)	100,00	%	100,00	%	100,00
	Pemerintah KotaTernate	400.00	0.4	400.00	0.4	10000
	- Standar Satuan Bangunan	100,00	%	100,00	%	100,00
	Negara (HSBGN) dan Harga					
	Satuan Konstruksi Pemerintah					
1.5	KotaTernate	1	D. I	-	D 1	100.00
15	Perda RTRW Kota Ternate	1	Dok.	1	Dok.	100,00
16	Laporan pertanggungjawaban	1	Dok.	1	Dok.	100,00
	Walikota akhir tahun	1	D. I	1	D 1	100.00
17	Laporan pertanggungjawaban	1	Dok.	1	Dok.	100,00
10	pelaksanaan APBD 2010	100,00	%	100.00	%	100.00
18	Persentase penyediaan fasilitas penunjang aktivitas perhubungan	100,00	%0	100,00	%0	100,00
	_					
19	laut Persentase terminal penumpang	70,00	%	70,00	%	100,00
19	dalam Kondisi baik	70,00	/0	70,00	70	100,00
20	Persentase pelabuhan lokal dalam	100,00	%	100,00	%	100,00
20	kondisi baik	100,00	/0	100,00	/0	100,00
21	Persentase penyediaan fasilitas	100,00	%	100,00	%	100,00
^{∠1}	traffic light	100,00	/0	100,00	/0	100,00
22	Jumlah fasilitas parkir yang tersedia	100,00	%	100,00	%	100,00
23	Persentase jalan yang diberi	80,00	%	80,00	%	100,00
23	pengaman	80,00	/0	80,00	/0	100,00
24	Rasio jalan yang bermarka	100,00	%	100,00	%	100,00
∠+	Kasio Jaian yang otimarka	100,00	/0	100,00	/0	100,00

Pada tabel tersebut diatas, terlihat bahwa dua puluh empat indikator kinerja sasaran yang telah mencapai target, yaitu: persentase penataan kawasan pasar Gamalama, Tapak I Plus dan Tapak II dengan aksentuasi ornament kebudayaan lokal, pengoptimalan pasar Bastiong, pasar Dufa-

dufa, pasar Kotabaru dan pasar Sasa sebagai pasar tradisional, persentase penataan area depan Kedaton Kesultanan, lapangan Ngara Lamo, Dodoku Ali sebagai RTH berciri budaya, persentase pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), persentase pengendalian pemanfaatan ruang, dokumen perencanaan tata ruang, peningkatan program partisipatif untuk mewujudkan Ternate sebagai Kota Ternate yang hijau, asri, bersih, nyaman dan ramah lingkungan, Luas hutan yang terlindungi, perwujudan Ternate bebas sampah dan bebas banjir, persentase perusahaan yang memiliki UKL-UPL, peningkatan penghijauan kota, peningkatan perlindungan dan konservasi SDA, persentase tersedianya dokumen perencanaan pembangunan (RKPD Kota Ternate tahun 2012, KUA PPAS dan KUA PPAS perubahan, RPJM Kota Ternate 2011-2015, Ranperda RPJP Kota Ternate), Persentase tersedia data penunjang perencanaan (Ternate dalam angka, data indikator ekonomi daerah Kota Ternate (PDRB dan Inflasi), monografi Kota Ternate tahun 2011, Standar Satuan Harga (SSH) Pemerintah Kota Ternate dan Standar Harga Satuan Bangunan Negara (HSBGN) dan harga satuan konstruksi Pemerintah Kota Ternate), Perda RTRW Kota Ternate, laporan pertanggungjawaban Walikota akhir tahun, Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2010, persentase penyediaan fasilitas penunjang aktivitas perhubungan laut, persentase terminal penumpang dalam kondisi baik, persentase pelabuhan lokal dalam kondisi baik, persentase penyediaan fasilitas traffic light, Jumlah fasilitas parkir yang tersedia, persentase jalan yang diberi pengaman dan rasio jalan yang bermarka.

Sasaran strategis 6:

Terwujudnya good government, dengan sumber daya aparatur yang profesional, kreatif, inovatif, yang mampu menjamin peningkatan kualitas pelayanan, akuntabilitas dan kemandirian masyarakat

Pencapaian target sasaran 6 tersebut adalah sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TAR	GET	REALIS	ASI	%
1	Jumlah organisasi perangkat daerah yang efektif dan efisien	36	SKPD	41	SKPD	113,89
2	Jumlah PNS yang mene- rima Satya Lencana Karya Satya	315	Orang	315	Orang	100,00
3	Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur : - Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan formal	76	Orang	76	Orang	100,00
	- Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan non formal	104	Orang	104	Orang	100,00
	- Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan structural	478	Orang	478	Orang	100,00
4	Jumlah penyelesaian berkas kepegawaian	5	Jenis	5	Jenis	100,00

5	Jumlah LHP pemeriksaan reguler yang diterbitkan	25	LHP	20	LHP	80,00
6	Jumlah LHP pemeriksaan khusus/kasus pengaduan yang diterbitkan	14	LHP	12	LHP	85,71
7	Persentase penyelesaian temuan hasil pemeriksaan:					
	- Inspektorat Kota Ternate	30,00	%	7,86	%	20,26
	- Inspektorat provinsi Maluku	100,00	%	100,00	%	100,00
	Utara	•		·		
	- Itjen Kementrian	100,00	%	100,00	%	100,00
8	Formasi dan evaluasi jabatan	39	SKPD	39	SKPD	100,00
	perangkat daerah					
9	Buku tupoksi perangkat daerah	75	Eksp	75	Eksp	100,00
10	Buku tata naskah dinas	100	Eksp	100	Eksp	100,00
11	Buku himpunan Perda dan Perwali	100	Eksp	100	Eksp	100,00
12	Dokumen penetapan kinerja SKPD tahun 2011	75	Eksp	75	Eksp	100,00
13	Penjaringan aspirasi masyarakat	7	Kec.	7	Kec.	100,00
14	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD dalam menunjang kinerja lembaga perwakilan rakyat daerah	25	Orang	25	Orang	100,00
15	Persentase pemanfaatan dan partisipatif	100,00	%	100,00	%	100,00
16	Persentase peningkatan PAD	50,17	%	51,33	%	102,31
17	Penerbitan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun 2010 tepat waktu	100,00	%	100,00	%	100,00
18	Penetapan dokumen anggaran tepat waktu:					
	- APBD 2012	100,00	%	100,00	%	100,00
	- APBD Perubahan 2011	100,00	%	100,00	%	100,00
19	Peningkatan manajemen aset daerah	75,00	%	75,00	%	100,00

Dari tabel tersebut diatas, terlihat bahwa sebanyak delapan belas indikator kinerja sasaran telah mencapai target yang ditetapkan, yaitu: jumlah organisasi perangkat daerah yang efektif dan efisien, jumlah PNS yang menerima Satya Lencana Karya Satya, Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur (jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan formal, jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan non formal, dan jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural, Jumlah penyelesaian berkas kepegawaian, Jumlah LHP pemeriksaan reguler yang diterbitkan, jumlah LHP pemeriksaan khusus/kasus pengaduan yang diterbitkan, formasi dan evaluasi jabatan perangkat daerah, buku tupoksi perangkat daerah, buku tata naskah dinas, buku himpunan Perda dan Perwali, dokumen penetapan kinerja SKPD tahun 2011, penjaringan aspirasi masyarakat, peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD dalam menunjang kinerja lembaga perwakilan rakyat daerah, persentase pemanfaatan dan partisipatif, persentase peningkatan PAD, penerbitan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun 2010 tepat waktu, penetapan dokumen anggaran tepat waktu (APBD 2012, APBD Perubahan 2011), dan Peningkatan manajemen aset daerah.

Indikator kinerja sasaran yang belum mencapai target adalah sebanyak 1(satu) indikator kinerja sasaran, yaitu persentase penyelesaian temuan hasil pemeriksaan, pada tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Ternate nilai capaiannya rendah, yakni 26,20 %. Hal tersebut disebabkan: masih rendahnya kesadaran dan tanggungjawab obyek pemeriksaan, baik pimpinan SKPD maupun pihak ketiga (rekanan) dalam menyelesaikan temuan hasil pemeriksaan, belum adanya sanksi yang lebih tegas yang diberikan kepada pimpinan SKPD maupun rekanan yang belum menyelesaikan temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Ternate, pihak-pihak yang terkait langsung dengan temuan sebagian sudah tidak jelas keberadaannya. Upaya yang akan dilakukan dalam mengatasi masalah tersebut, adalah memberikan sanksi kepada pimpinan SKPD yang lamban dalam menyelesaikan temuan dan memberikan sanksi tidak mengikutsertakan rekanan yang tidak menyelesaikan temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Ternate pada pengadaan barang/jasa pada masa yang akan datang.

Sasaran strategis 7:

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat Petani, Nelayan, Pekebun, Peternak, Buruh dan Pekerja, Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Pedagang Kaki Lima, dan Pedagang Tradisional, menuju pada kemandirian dan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic need)

Pencapaian target sasaran 7 tersebut adalah sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARG	ET	REALISA	SI	%
1	Jumlah Koperasi, yang diberikan bantuan modal usaha	6	Kop.	6	Kop.	100,00
2	Jumlah kelompok perempuan dan pemuda yang diberikan modal usaha	7	Klp.	7	Klp.	100,00
3	Jumlah kursus dan pelatihan bagi pengangguran terbuka <i>unskill</i>	16	Orang	16	Orang	100,00
4	Jumlah Koperasi aktif	75	Kop.	87	Kop.	116,00
5	Persentase pertumbuhan ekonomi	7,36	%	8,03	%	109,10
6	Tingkat Inflasi	3,00	%	4,52	%	49,33
7	Pendapatan perkapita	2.500.000,00	Rp	2.955.276,00	Rp	118,21
8	Indeks pembangunan manusia (IPM)	74,62	%	76,93	%	103,10
9	Jumlah Koperasi yang berkualitas	12	Kop.	10	Kop.	83,33
10	Jumlah UKM	8.000	UKM	8.282	UKM	103,53
11	Nilai modal kerja dan investasi UKM	735.223.418.220	Rp	748.123.416.220	Rp	101,75
12	Nilai Omzet UKM	1.278.397.557.270	RP	1.388.947.557.270	RP	108,65
13	Penyerapan tenaga kerja	30	%	30,03	%	100,10
14	Tingkat pengangguran terbuka	10,42	%	8,66	%	120,32
15	Peningkatan pengembangan informasi pasar kerja	10	Perus.	10	Perus.	100,00
16	Peningkatan pengembangan sarana dan prasarana sektor formal	5	Klp.	5	Klp.	100,00

17	Penataan pedagang Kaki Lima	5	Lokasi	5	Lokasi	100,00
18	Tersalurnya RASKIN	7	Kec.	7	Kec.	100,00
19	Operasi pasar murah	3	Kec.	3	Kec.	100,00
20	Peningkatan produksi pangan	57,50	Ton	57,50	Ton	100,00
21	Peningkatan produksi tanaman holtikultura	156,4	Ton	131,3	Ton	83,95
22	Peningkatan produksi peternakan	4.520	Ekor	4.520	Ekor	100,00
23	Meningkatnya produksi perkebunan	8,00	Ton	8,00	Ton	100,00
24	Persentase tertanggulanginya penyakit ternak	100,00	%	100,00	%	100,00
25	Berkembangnya usaha agribisnis	20	Kel.	20	Kel.	100,00
26	Peningkatan keikutsertaan masyarakat dalam ber KB	23,67	%	25,27	%	106,76
27	Jumlah sarana prasarana KB dan KS	124	Unit	124	Unit	100,00
28	Meningkatnya ketahanan keluarga dalam peningkatan kesertaan, pembinaan dan kemandirian ber KB	286	Orang	286	Orang	100,00

Pada tabel tersebut, terlihat bahwa sebanyak dua puluh tujuh indikator kinerja sasaran telah mencapai target, yaitu: jumlah koperasi yang diberikan bantuan modal usaha, jumlah kelompok perempuan dan pemuda yang diberikan modal usaha, jumlah kursus dan pelatihan bagi pengangguran terbuka *unskill*, jumlah koperasi aktif, persentase pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita, Indeks pembangunan manusia (IPM), jumlah Koperasi yang berkualitas, jumlah UKM, nilai modal kerja dan investasi UKM, nilai Omzet UKM, penyerapan tenaga kerja, tingkat pengangguran terbuka, peningkatan pengembangan informasi pasar kerja, peningkatan pengembangan sarana dan prasarana sektor formal, penataan pedagang Kaki Lima, tersalurnya RASKIN, operasi pasar murah, peningkatan produksi pangan, peningkatan produksi tanaman holtikultura, peningkatan produksi peternakan, meningkatnya produksi perkebunan, persentase tertanggulanginya penyakit ternak, berkembangnya usaha agribisnis, peningkatan keikutsertaan masyarakat dalam ber KB, jumlah sarana prasarana KB dan KS, meningkatnya ketahanan keluarga dalam peningkatan kesertaan, pembinaan dan kemandirian ber KB.

Indikator kinerja sasaran yang nilai capaiannya rendah, yaitu tingkat inflasi nilai capaian 49,33%. Hal tersebut disebabkan pengaruh faktor eksternal seperti kenaikan harga 5 bahan pokok. Penyumbang terbesar terjadinya inflasi di Kota Ternate adalah kelompok bahan makanan, yang disebabkan oleh faktor alam yang kadang menyebabkan ketersediaan komoditi dari kelompok bahan makanan menjadi langkah seperti komoditi ikan, cabe wortel dan lain-lain. Upaya yang dilakukan untuk menekan laju inflasi kedepan adalah:

 Mendorong beberapa kebijakan dalam mengatasi masalah tersebut, diantaranya adalah program/kegiatan SKPD yang menyentuh beberapa sektor yang dianggap mampu mengatasi masalah inflasi langsung.

- 2. Kebijakan dalam hal mendorong sektor-sektor produksi, terutama pada beberapa bahan pokok yang selama ini masih di inport dari daerah diluar Kota Ternate.
- 3. Memperbaiki beberapa regulasi yang mengatur arus masuk dan keluar Ternate.

Sasaran strategis 8:

Terwujudnya pelayanan publik oleh aparatur yang profesional, dengan pelayanan yang cepat, mudah, murah, nyaman dan berkualitas

Pencapaian target sasaran 8 tersebut adalah sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARG	ET	REALISA	ASI	%
1	Penyediaan database kependudukan	100,00	%	100,00	%	100,00
	online					
2	Jumlah penduduk	190.737	Jiwa	190.184	Jiwa	99,71
3	Laju Pertumbuhan Penduduk	3,83	%	3,53	%	92,17
4	Rasio penduduk ber-KTP	1:1	Pddk	1:0,90	Pddk	90,00
5	Rasio keluarga ber-KK	1:1	KK	1:0,77	KK	76,13
6	Rasio bayi berakte kelahiran	1:1	Jiwa	1:0,47	Jiwa	47,00
7	Jumlah kelurahan yang terlayani	77	Kel.	65	Kel.	84,42
	e-KTP					
8	Jumlah penduduk miskin	6.500	Jiwa	6.500	Jiwa	100,00
9	Persentase penanganan kejadian	100,00	%	100,00	%	100,00
	kebakaran					
10	Persentase penanganan kejadian	100,00	%	100,00	%	100,00
	bencana alam					
11	Jumlah surat kabar nasional/lokal	10	Penerbit	10	Penerbit	100,00
12	Jumlah penyiaran radio/tv	9	Stasion	9	Stasion	100,00
	lokal					

Dari tabel tersebut diatas, terlihat bahwa sepuluh indikator kinerja sasaran telah mencapai target, yaitu: penyediaan *database* kependudukan *online*, jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, rasio penduduk ber-KTP, jumlah kelurahan yang terlayani E-KTP, jumlah penduduk miskin, Persentase penanganan kejadian kebakaran, Persentase penanganan kejadian bencana alam, jumlah surat kabar nasional/lokal dan jumlah penyiaran radio/tv lokal.

Indikator kinerja sasaran yang belum mencapai target adalah sebanyak dua indikator sasaran, yaitu: rasio keluarga ber-KK nilai capaian 76,13%, dan rasio bayi berakte kelahiran dengan nilai capaian 47,00% yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1. Rasio keluarga ber-KK nilai capaian 76,13%, hal tersebut disebabkan adanya pembentukan keluarga baru yang belum mempunyai KK dan masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memiliki kartu keluarga (KK). Untuk mengatasi masalah tersebut, maka kedepan perlu dilakukan pelayanan keliling pembuatan kartu keluarga (KK) dan melakukan pendataan ulang keluarga baru.
- 2. Rasio bayi berakte kelahiran dengan nilai capaian 47,00%, hal tersebut disebabkan masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk segera membuat akte kelahiran bayi yang baru lahir.

Untuk mengatasi masalah tersebut, kedepan akan dilakukan pendataan kembali terhadap bayi yang belum berakte kelahiran dan memberikan kemudahan dalam pembuatan akte kelahiran serta melakukan sosialisasi tentang pembuatan akte kelahiran gratis.

Sasaran strategis 9:

Meningkatnya kemandirian masyarakat, melalui pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis potensi pesisir, melalui pengembangan usaha mikro kecil, menengah, koperasi yang mengarah pada produktivitas, dan kemampuan daya saing

Pencapaian target sasaran 9 tersebut adalah sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TAR	GET	REAI	LISASI	%
1	Pemetaan potensi masyarakat pesisir	3	Keg.	3	Keg.	100,00
2	Jumlah kelompok yang diberikan bantuan fasilitas bantuan dan peralatan	25	Klp.	25	Klp.	100,00
3	Jumlah kelompok pengolahan hasil produksi perikanan diberikan bantuan modal usaha dan pendampingan	1	Klp.	1	Klp.	100,00
4	Pelaksanaan kerjasama dengan perguruan tinggi dan LSM dalam pendampingan pemberdayaan	1	Lemb.	1	Lemb.	100,00
5	Peningkatan kunjungan wisatawan lokal dan manca Negara					
	- WNI	92.350	Orang	92.385	Orang	100,04
	- WNA	800	Orang	831	Orang	103,88
6	Terkendalinya harga kebutuhan pokok	12	Bulan	12	Bulan	100,00
7	Terpenuhinya kebutuhan sembilan bahan pokok	12	Bulan	12	Bulan	100,00
8	Meningkatnya produktifitas dan mutu produk usaha	5	Jenis	5	Jenis	100,00

Pencapaian kinerja pada tabel tersebut di atas, terlihat sebanyak delapan indikator kinerja sasaran telah mencapai target, yaitu: pemetaan potensi masyarakat pesisir, jumlah kelompok yang diberikan bantuan fasilitas bantuan dan peralatan, jumlah kelompok pengolahan hasil produksi perikanan diberikan bantuan modal usaha dan pendampingan, Pelaksanaan kerjasama dengan perguruan tinggi dan LSM dalam pendampingan pemberdayaan, peningkatan kunjungan wisatawan lokal dan manca Negara (WNI dan WNA), terkendalinya harga kebutuhan pokok, terpenuhinya kebutuhan sembilan bahan pokok, dan meningkatnya produktifitas dan mutu produk usaha.

Sasaran strategis 10:

Terjawabnya permasalahan perkotaan seperti menurunnya kesadaran spiritualitas keberagamaan, solidaritas sosial dan kesadaran kebudayaan sebagai identitas daerah dan jati diri masyarakat, meningkatkan etos sosial dan optimalisasi penanggulangan masalah-masalah sosial seperti minuman keras, PSK, narkoba serta permasalahan sosial lainnya

Pencapaian target sasaran 10 tersebut adalah sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TAR	GET	REALI	SASI	%
1	Penguatan kurikulum pendidikan agama dan kurikulum muatan lokal tentang budaya dan adat istiadat Ternate	35,00	%	40,00	%	114,29
2	Jumlah taman pengajian Al-Quran	186	TPQ	186	TPQ	100,00
3	STQ Tingkat Kota Ternate	7	Khafilah	7	Khafilah	100,00
4	Khafilah Kota Ternate pada STQ tingkat Provinsi Maluku Utara	22	Orang	22	Orang	100,00
5	Pembinaan Khatib dan Imam	60	Orang	60	Orang	100,00
6	Persentase Pelepasan calon jamaah haji dan penjemputan haji Kota Ternate	100,00	%	100,00	%	100,00
7	Upaya pembinaan kerukunan antar umat beragama, antar suku, etnis dan subetnis	7	Kec.	7	Kec.	100,00
8	Pelestarian situs, artifak dan dokumen sejarah dan aset seni budaya Kota Ternate	14	Jenis	14	Jenis	100,00
9	Jaminan kesejahteraan Imam Masjid, Pendeta, Guru Mengaji, Guru TPA dan Pembimbing Jemaat	145	Orang	145	Orang	100,00
10	Jaminan pelestarian adat dan budaya Ternate	4	Keg.	4	Keg.	100,00
11	Peningkatan kesadaran pemuda terhadap bahaya Narkoba	150	Orang	150	Orang	100,00
12	Peningkatan kualitas sarana olahraga	4	Bh	4	Bh	100,00
13	Jumlah atlit yang berprestasi pada kompetisi cabang olahraga unggulan	162	Orang	162	Orang	100,00
14	Pemberantasan penyakit masyarakat	2	Jenis	2	Jenis	100,00
15	Peningkatan pemberdayaan kelembagaan sosial	50	Orang	50	Orang	100,00
16	Pembinaan penyandang cacat dan trauma	4	Orang	4	Orang	100,00
17	Bantuan tanggap darurat korban bencana alam sosial dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	2	Kel.	2	Kel.	100,00

Dari tabel tersebut tergambar bahwa sebanyak tujuh belas indikator kinerja sasaran yang telah mencapai target, yaitu : penguatan kurikulum pendidikan agama dan kurikulum muatan lokal

tentang budaya dan adat istiadat Ternate, jumlah taman pengajian Al-Quran, STQ Tingkat Kota Ternate, khafilah Kota Ternate pada STQ tingkat Provinsi Maluku Utara, Pembinaan Khatib dan Imam, persentase Pelepasan calon jamaah haji dan penjemputan haji Kota Ternate, upaya pembinaan kerukunan antar umat beragama, antar suku, etnis dan subetnis, pelestarian situs, artifak dan dokumen sejarah dan aset seni budaya Kota Ternate, jaminan kesejahteraan Imam Masjid, Pendeta, Guru Mengaji, Guru TPA dan Pembimbing Jemaat, jaminan pelestarian adat dan budaya Ternate, peningkatan kesadaran pemuda terhadap bahaya Narkoba, peningkatan kualitas sarana olahraga, jumlah atlit yang berprestasi pada kompetisi cabang olahraga unggulan, pemberantasan penyakit masyarakat, peningkatan pemberdayaan kelembagaan sosial, pembinaan penyandang cacat dan trauma, dan bantuan tanggap darurat korban bencana alam sosial dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

Sasaran strategis 11:

Terjawabnya masalah penegakan dan kepastian hukum di daerah, termasuk upaya mengadakan regulasi daerah yang mampu mendorong partisipasi publik yang dinamis dan konstruktif, serta regulasi untuk menjamin kualitas pelayanan publik

Pencapaian target sasaran 11 tersebut adalah sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TA	RGET	REALI	SASI	%
1	Peninjauan kembali peraturan	2	Perda	2	Perda	100,00
	daerah					
2	Pengendalian keamanan dan	4	Kec.	4	Kec.	100,00
	kenyamanan lingkungan					
3	Pemeliharaan keamanan dan	4	Kec.	4	Kec.	100,00
	ketertiban masyarakat serta					
	pencegahan tindak kriminal					
4	Penegakan PERDA dan Peraturan	4	Kec.	4	Kec.	100,00
	pelaksana					
5	Sertifikasi tanah bagi masyarakat	15	Orang	15	Orang	100,00
	kurang mampu					
6	Penyelesaian masalah hukum	100,00	%	66,00	%	66,00
	Pemda Kota Ternate					

Pada tabel tersebut terlihat bahwa 5 (lima) indikator kinerja sasaran telah mencapai target yang ditetapkan, yaitu: peninjauan kembali peraturan daerah, pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pencegahan tindak kriminal, penegakan PERDA dan peraturan pelaksana, dan sertifikasi tanah bagi masyarakat kurang mampu. Indikator kinerja sasaran yang tidak mencapai target, yaitu penyelesaian masalah hukum Pemda Kota Ternate dengan nilai capaian 66,00%. Hal tersebut dapat dijelaskan bahwa sesuai permasalahan hukum yang terjadi pada Pemerintah Kota Ternate tahun 2011, yaitu sebanyak 3 kasus, yang dapat diselesaikan sebanyak 2 kasus. Kasus yang belum selesai, yaitu sengketa tanah ex PT. Telkom yang berada di Kelurahan Sasa Kecamatan Ternate Selatan dimana Pemerintah Kota Ternate menjadi tergugat VII. Upaya yang dilakukan

untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah mengumpulkan bukti-bukti tertulis, mengidentifikasi para saksi yang masih hidup dan mencari saksi ahli yang tepat.

C. ANALISA TREND CAPAIAN KINERJA

Analisa trend capaian kinerja Pemerintah Kota Ternate tahun 2011 belum dapat dilakukan karena tahun 2011 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD Kota Ternate tahun 2011-2015 sehingga belum dapat dilakukan perbandingan pencapaian kinerja tahunan. Demikian juga tahun 2011 merupakan tahun pertama pelaksanaan penetapan kinerja dan pengukuran kinerja yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditetapkan pada tanggal 31 Desember tahun 2010.

D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Garis besar APBD Kota Ternate tahun 2011 dan realisasinya adalah sebagai berikut :

NO.	VID. V. V.	JUMLA	AH (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG	
REK.	URAIAN	SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN DAERAH				
1,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	14.500.000.000	15.650.351.291	1.150.351.291	107,93
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	11.425.000.000	11.083.126.093	(341.873.907)	97,01
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	500.000.000	104.019.267	(395.980.733)	20,80
1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	5.775.000.000	9.984.449.440	4.209.449.440	172,89
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	32.200.000.000	36.821.946.091	4.621.946.091	114,35
1,2	PENDAPATAN TRANSFER				
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	63.386.000.000	63.718.929.859	332.929.859	100,53
1.2.2	Dana Alokasi Umum	314.020.640.000	313.861.356.000	(159.284.000)	99,95
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	29.522.900.000	29.521.400.000	(1.500.000)	99,99
1.2.4	Lain-Lain	-	-	-	0,00
	Jumlah Pendapatan Transfer	406.929.540.000	407.101.685.859	172.145.859	100,04
1,3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
1.3.1	Hibah	1.260.000.000	22.341.539.663	21.081.539.663	1773,14
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-	0,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemda Lainnya	15.710.000.000	7.290.551.479	(8.419.448.521)	46,41
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	81.509.491.800	59.216.465.127	(22.293.026.673)	72,65

1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi/Pemda Lainnya	-	-	-	0,00
1.3.6	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah	-	-	-	0,00
	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	98.479.491.800	88.848.556.269	(9.630.935.531)	90,22
	JUMLAH PENDAPATAN	537.609.031.800	532.772.188.219	(4.836.843.581)	99,10
2	BELANJA DAERAH				
2,1	BELANJA TIDAK LANGSUNG				
2.1.1	Belanja Pegawai	275.164.411.637	274.053.516.806	1.110.894.831	99,60
2.1.2	Belanja Bunga		-	-	0,00
2.1.3	Belanja Subsidi	_	_	_	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	4.921.325.000	5.051.843.750	(130.518.750)	0,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	7.898.500.000	9.411.308.170	(1.512.808.170)	119,15
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kab./	<u>-</u>	<u>-</u>	_	0,00
	Kota dan Desa				-,
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kab./Kota dan Desa	-	-	-	0,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	3.750.000.000	4.500.000.000	(750.000.000)	120,00
2.1.9	Lain-Lain	<u>-</u>	-	_	0,00
	Jumlah Tidak Langsung	291.734.236.637	293.016.668.726	(1.282.432.089)	100,44
2,2	BELANJA LANGSUNG				
2.2.1	Belanja Pegawai	53.732.414.388	50.567.855.250	3.164.559.138	94,11
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	101.319.424.386	95.784.420.145	5.535.004.241	94,54
2.2.3	Belanja Modal	117.350.763.531	113.828.951.573	3.521.811.958	97,00
	Jumlah Belanja Langsung	272.402.602.305	260.181.226.968	12.221.375.337	95,51
	JUMLAH BELANJA	564.136.838.942	553.197.895.694	10.938.943.248	98,06
	SURPLUS / (DEFISIT)	(26.527.807.142)	(20.425.707.475)	(15.775.786.829)	77,00
3	PEMBIAYAAN				
3,1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1.1	SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya	6.843.069.059	_	6.843.069.059	0,00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	0,00
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-	0,00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi	21.781.738.083	-	21.781.738.083	0,00
3.1.5	Daerah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	_	0,00
3.1.6	Daerah Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah	28.624.807.142	-	28.624.807.142	0,00

3,2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH				
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.097.000.000	2.097.000.000	-	100,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	0,00
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah	2.097.000.000	2.097.000.000	-	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	26.527.807.142	(2.097.000.000)	28.624.807.142	-7,90
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-	(22.522.707.475)	12.849.020.313	0,00

Realisasi APBD Kota Ternate tahun 2011 adalah sebagai berikut:

- Anggaran Pendapatan terealisir sebesar 99,10 %
- Anggaran Belanja terealisir sebesar 98,06 %

BAB IV

PENUTUP

Kinerja Pemerintah Kota Ternate tahun 2011 sesuai evaluasi hasil pengukuran dengan menggunakan skala ordinal, diketahui bahwa kinerja Pemerintah Kota Ternate tahun 2011 berada pada katagori **Sangat Berhasil.** Hal tersebut terlihat dari hasil pengukuran penetapan kinerja Pemerintah Kota Ternate tahun 2011, sebanyak 11 sasaran dengan jumlah indikator kinerja sasaran yang ditetapkan sebanyak 204 indikator, 193 (94,61%) indikator kinerja sasaran mencapai hasil optimal (≥ 80%). Namun demikian, terdapat 11 (5,39%) indikator kinerja sasaran Pemerintah Kota Ternate tahun 2011 yang nilai capaiannya kurang optimal (< 80%) yaitu:

- 1. Persentase peningkatan jumlah koleksi buku di perpustakaan daerah, nilai capaian 61,86%;
- 2. Peningkatan pelayanan dokter dan perawat, nilai capaian 73,79 %;
- 3. Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup, nilai capaian 61,54%;
- 4. Angka kematian ibu per 1.000 kelahiran hidup, nilai capaian 60,00%;
- 5. Penderita *Malaria Annual Malaria Incidence* (AMI) nilai capaian 34,48% dan *Annual Parasite Incidence* (API) nilai capaian 50,00%;
- 6. Angka kesakitan DBD/100.000 Jiwa, nilai capaian 76,00%;
- 7. Persentase penyelesaian temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Ternate, nilai capaian 26,20%;
- 8. Tingkat Inflasi, nilai capaian 49,33%;
- 9. Rasio keluarga ber-KK, nilai capaian 76,13%;
- 10. Rasio bayi berakte kelahiran, nilai capaian 47,00%; dan
- 11. Penyelesaian masalah hukum Pemda Kota Ternate, nilai capaian 66,00%

Kelemahan tersebut diatas, diprioritaskan untuk segera dibenahi dengan memperhatikan faktor-faktor penyebabnya. Dengan memperhatikan keberhasilan yang telah dicapai maupun kekurangan/kelemahan sebagaimana tergambar dalam akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Ternate tahun 2011, maka hal tersebut akan dijadikan umpan balik untuk lebih meningkatkan kinerja aparatur Pemerintah Kota Ternate kedepan guna peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat dengan mengedepankan prinsip-prinsip *Good Governance dan Clean Government*.

LAMPIRAN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Pemerintah Kota : Ternate Tahun : 2011

	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	(1)	(2)	(3)
1	Percepatan pengembangan infra- struktur secara merata dan berke- adilan, terutama pada kecamatan- kecamatan di luar kawasan perko-	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (pembangunan infrastruktur wilayah di kecamatan)	101,955.00 M
	taan untuk membuka keterisolasian serta memungkinkan terjadinya	2) Peningkatan pembangunan jalan	14,651.50 M
	mobilitas arus barang dan manusia yang mempercepat perkembangan	3) Persentase pemenuhan kebutuhan jembatan	4.64 %
	secara merata pada semua wilayah kecamatan	4) Persentase jembatan dalam kondisi baik	82.68 %
		5) Pembangunan talud/turap/bronjong	51 M
		6) Cakupan pemerataan pelayanan air bersih kawasan dataran tinggi	3 Lokasi
		7) Cakupan pemerataan pelayanan listrik yang tidak terjangkau layanan PLN	1 Kel.
2	Meningkatnya Sumber Daya Manusia, khususnya peningkatan derajat pendidikan melalui perluas- an akses pendidikan yang murah dan terjangkau sarana dan fasilitas yang memadai, tenaga guru yang	Peningkatan: Sarana Pendidikan Pemerataan Tenaga Pengajar Peningkatan mutu pendidikan Dana bantuan penunjang kegiatan sekolah	11 Jenis 150 Guru 204 Guru 134 Sekolah
	cukup, dan mutu yang terus membaik	(penunjang BOS) untuk mewujudkan pendidikan dasar yang berkualitas	
		3) Penyediaan buku pelajaran di perpustakaan sekolah	1670 Judul
		4) Pemberian beasiswa kepada siswa/mahasiswa berprestasi dan kurang mampu	2594 Orang
		5) Pemberian beasiswa kepada guru berprestasi untuk melanjutkan studi	20 Orang
		6) Pemberian insentif kepada guru di daerah terpencil	309 Orang
		7) Angka Melek Huruf	19.97 Pddk

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
	8) Angka rata-rata lama sekolah	12 Tahun
	9) Angka Partisipasi Murni	
	- SD/MI/SDLB	87.50 %
	- SMP/MTs/SMPLB	88.00 %
	- SMA/SMK/MA/SMALB	70.50 %
	10) Angka Partisipasi Kasar	
	- SD/MI/SDLB	94.00 %
	- SMP/MTs/SMPLB	90.00 %
	- SMA/SMK/MA/SMALB	88.00 %
	11) Angka Putus Sekolah	
	- SD	0.09 %
	- SLTP	0.31 %
	- SLTA	0.32 %
	12) P:- C/:1	
	12) Rasio Guru/murid	
	- SD	1:32 Murid
	- SLTP	1:32 Murid
	- SLTA	1:32 Murid
	13) Rata-rata nilai UN dan UAS	
	a) SD/MI	
	- UN	4.00
	- UAS	6.50
	b) SMP/MTs	
	- UN	5.50
	- UAS	7.25
	c) SMA/MA/SMK	
	- UN	5.50
	- UAS	7.50
	14) Angka Kelulusan	
	- SD/MI	3,024 Orang
	- SMP/MTs	2,579 Orang
	- SMA/MA/SMK	2,379 Orang 2,449 Orang
		2,117 Glung
	15) Rata-Rata Nilai Paket Ujian :	
	a) Paket A	
	- UN	5.50
	- UAS	7.00
	b) Paket B	
	- UN	5.50
	- UAS	7.00
	CTAD	7.00

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
	c) Paket C - UN - UAS 16) Jumlah pengunjung layanan tetap dan layanan keliling perpustakaan daerah	5.50 7.00 6,500 Orang
	17) Persentase peningkatan jumlah koleksi buku di perpustakaan daerah	11.80 %
3 Meningkatnya Sumber Daya Manusia, melalui peningkatan derajat kesehatan dengan perluasan akses yang mudah, murah, terjang- kau, dukungan sarana dan fasilitas	1) Peningkatan: - Jumlah sarana prasarana pelayanan kesehatan - Pelayanan dokter dan perawat - Jumlah obat-obatan di Puskesmas/Pustu	51 Unit 248 Orang 149 Jenis
memadai, ketersediaan dah lasintas memadai, ketersediaan dokter, tenaga kesehatan dan keperawatan yang cukup, dan mutu pelayanan yang terus membaik	/Poskeskel 2) Pemberian insentif kepada bidan atau tenaga kesehatan di daerah terpencil	55 Orang
	Jumlah masyarakat miskin yang mendapat pelayanan Jamkesda	8000 Orang
	Pelaksanaan kebijakan subsidi silang bagi pasien rawat inap	185 jiwa
	5) Angka Harapan Hidup	70.76 Tahun
	6) Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup	4/1000 KH
	7) Angka kematian ibu per 1.000 kelahiran hidup	78/100.000 KH
	8) Persentase gizi buruk pada balita	0.80 %
	9) Persentase Kecamatan bebas rawan Gizi	0.86 %
	10) Persentase posyandu - Purnama - Mandiri	50.00 % 7.00 %
	11) Persentase penduduk yang memanfaatkan Puskesmas	85.00 %
	12) Persentase persalinan oleh tenaga kesehatan	92.00 %
	13) Rasio puskesmas terhadap jumlah penduduk	1:23.215 PKM

	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
	(1)	(2)	(3)	
		14) Penderita Malaria - Annual Malaria Incidence (AMI) - Annual Parasite Incidence (API)	< 10% < 1%	
		15) Angka kesakitan DBD/100.000 Jiwa	2,5/1000	Pddk
		16) Angka kesembuhan TBC	86.00	%
		17) Angka penanganan Penyakit Kusta	90.00	%
4	Terwujudnya kebijakan Anggaran (APBD) yang proporsional dan Pro Rakyat, yang diprioritaskan pada upaya pemenuhan kebutuhan	Penetapan One Village One Program (satu Kelurahan, satu Program Unggulan) Pembangunan Infrastruktur lingkungan:	5.00	%
	rakyat serta membiayai program	- MCK Komunal	19.35	%
	pembangunan yang strategis, juga	- Drainase /gorong-gorong	7,280.00	M
	program populis yang menyentuh	- Pemenuhan kebutuhan jalan lingkungan	20.46	%
	kebutuhan dasar masyarakat, me- lalui desain program berbasis ke- swadayaan dan berciri budaya	3) Persentase pemberian santunan kematian bagi warga kurang mampu	20.00	%
		4) Bantuan pembinaan bagi generasi muda	10.00	%
		5) Persentase pemanfaatan Dana Pembangunan Kelurahan (DPK)	100.00	%
		6) Jumlah kelompok usaha ekonomi kelurahan simpan pinjam yang difasilitasi pembentukannya	5	Klp.
		7) Jumlah Posyandu yang menerima bantuan	70	Posy.
		8) Peningkatan pemahaman tentang perlindung- an anak PUG	340	Orang
5	Tertatanya infrastruktur perkotaan sebagai kota jasa dan perdagangan dengan pemanfaatan ruang kota secara terpadu untuk mendukung	Persentase penataan kawasan pasar Gama- lama, Tapak I Plus dan Tapak II dengan aksentuasi ornament kebudayaan lokal	25.00	%
	interaksi spasial, mobilitas dan aktivitas perkotaan yang tertib menuju terwujudnya Kota Ternate yang harmoni, sehat, aman dan	 Pengoptimalan pasar Bastiong, pasar Dufa-dufa, pasar Kotabaru dan pasar Sasa sebagai pasar Tradisional 	50.00	%
	nyaman dan berciri budaya serta berwawasan lingkungan	3) Persentase penataan area depan Kedaton Kesultanan, lapangan Ngara Lamo, Dodoku Ali sebagai RTH berciri budaya	25.00	%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
(1)	(2)	(3)	
	4) Persentase pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	100.00 %	6
	5) Persentase pengendalian pemanfaatan ruang	100.00 %	6
	6) Dokumen perencanaan tata ruang	3 D	Ook.
	7) Peningkatan program partisipatif untuk mewujudkan Ternate sebagai Kota yang hijau, asri, bersih, nyaman dan ramah lingkungan	50 K	Cel.
	8) Luas hutan yang terlindungi	4,403.00 H	ła
	9) Perwujudan Ternate bebas sampah dan bebas banjir	4 K	Kec.
	10) Persentase perusahan yang memiliki UKL- UPL	60.00 %	6
	11) Peningkatan penghijauan kota	3 K	Kec.
	12) Peningkatan perlindungan dan konservasi SDA	3 K	Zec.
	13) Persentase tersedianya dokumen perencanaan pembangunan		
	- RKPD Kota Ternate tahun 2012	100.00 %	o
	- KUA PPAS dan KUA PPAS perubahan	100.00 %	
	- RPJM Kota Ternate 2011-2015	100.00 %	
	- Ranperda RPJP Kota Ternate 14) Persentase tersedia data penunjang	100.00 %	Ó
	perencanaan:		
	Ternate dalam angkaData Indikator ekonomi daerah Kota	100.00 % 100.00 %	
	Ternate (PDRB dan Inflasi)	100.00 %	0
	- Monografi Kota Ternate tahun 2011	100.00 %	6
	- Standar satuan harga (SSH) Pemerintah Kota Ternate	100.00 %	
	- Standar harga satuan bangunan negara (HSBGN) dan harga satuan kontruksi Pemerintah Kota Ternate	100.00 %	ó
	15) Perda RTRW Kota Ternate	1 D	Ook.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
	16) Laporan pertanggungjawaban Walikota akhir tahun	1 Dok.
	17) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2010	1 Dok.
	18) Persentase penyediaan fasilitas penunjang aktivitas perhubungan laut	100.00 %
	19) Persentase terminal penumpang dalam kondisi baik	70.00 %
	20) Persentase pelabuhan lokal dalam kondisi baik	100.00 %
	21) Persentase penyediaan fasilitas traffic light	100.00 %
	22) Jumlah fasilitas parkir yang tersedia	100.00 %
	23) Persentase jalan yang diberi pengaman	80.00 %
	24) Rasio jalan yang bermarka	100.00 %
6 Terwujudnya good government, dengan sumber daya aparatur yang profesional, kreatif, inovatif, yang	Jumlah organisasi perangkat daerah yang efektif dan efisien	36 SKPD
mampu menjamin peningkatan kua- litas pelayanan, akuntabilitas dan	Jumlah PNS yang menerima Satya Lencana Karya Satya	315 Orang
kemandirian masyarakat	3) Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur :	
	- Jumlah pegawai yang mengikuti pendidik- an formal	76 Orang
	- Jumlah pegawai yang mengikuti pendidik- an non formal	104 Orang
	- Jumlah pegawai yang mengikuti pendidik- an dan pelatihan struktural	478 Orang
	4) Jumlah penyelesaian berkas kepegawaian	5 Jenis
	5) Jumlah LHP pemeriksaan reguler yang di- terbitkan	25 LHP
	6) Jumlah LHP pemeriksaan khusus/kasus pengaduan yang diterbitkan	14 LHP

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
	 7) Persentase penyelesaian temuan hasil pemeriksaan: Inspektorat Kota Ternate Inspektorat Provinsi Maluku Utara Itjen Kementrian 	30.00 % 100.00 % 100.00 %
	8) Formasi dan evaluasi jabatan perangkat daerah	39 SKPD
	9) Buku tupoksi perangkat daerah	75 Eksp
	10) Buku tata naskah dinas	100 Eksp
	11) Buku himpunan Perda dan Perwali	100 Eksp
	12) Dokumen penetapan kinerja SKPD tahun 2011	75 Eksp
	13) Penjaringan aspirasi masyarakat	7 Kec.
	14) Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD dalam menunjang kinerja Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	25 Orang
	15) Persentase pemanfaatan dana partisipatif	100.00 %
	16) Persentase peningkatan PAD	50.17 %
	17) Penerbitan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun 2010 tepat waktu	100.00 %
	18) Penetapan dokumen anggaran tepat waktu- APBD 2012- APBD Perubahan 2011	100.00 % 100.00 %
	19) Peningkatan manajemen aset daerah	75.00 %
7 Peningkatan kesejahteraan masyarakat Petani, Nelayan, Pekebun, Peternak, Buruh dan Pekerja,	Jumlah Koperasi yang diberikan bantuan modal usaha	6 Кор.
Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Pedagang Kaki Lima, dan Pedagang Tradisi-	Jumlah kelompok perempuan dan pemuda yang diberikan modal usaha	7 Klp.
onal, menuju pada kemandirian dan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic need)	3) Jumlah kursus dan pelatihan bagi pengang- guran terbuka <i>unskill</i>	16 Orang

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
	4) Jumlah koperasi aktif	75 Kop.
	5) Persentase pertumbuhan ekonomi	7.36 %
	6) Tingkat Inflasi	3.00 %
	7) Pendapatan perkapita	2,500,000.00 Rupiah
	8) Indeks pembangunan manusia (IPM)	74.62 %
	9) Jumlah Koperasi yang berkualitas	12 Kop.
	10) Jumlah UKM	8000 UKM
	11) Nilai modal kerja dan investasi UKM	735,223,418,220.00 Rp
	12) Nilai omzet UKM	1,278,397,557,270.00 Rp
	13) Penyerapan tenaga kerja	30.00 %
	14) Tingkat pengangguran terbuka	10.42 %
	15) Peningkatan pengembangan informasi pasar kerja	10 Perus.
	16) Peningkatan pengembangan sarana dan prasarana sektor formal	5 Klp.
	17) Penataan pedagang Kaki Lima	5 Lokasi
	18) Tersalurnya RASKIN	7 Kec.
	19) Operasi pasar murah	3 Kec.
	20) Peningkatan produksi pangan	57.50 Ton
	21) Peningkatan produksi tanaman holtikultura	156.40 Ton
	22) Peningkatan produksi peternakan	4,520 Ekor
	23) Meningkatnya produksi perkebunan	8.00 Ton
	24) Persentase tertanggulanginya penyakit ternak	100.00 %
	25) Berkembangnya usaha agribisnis	20 Kel.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
	26) Peningkatan keikutsertaan masyarakat dalam ber KB	23.67 %
	27) Jumlah sarana prasarana KB dan KS	124 Unit
	28) Meningkatnya ketahanan keluarga dalam peningkatan kesertaan, pembinaan dan kemandirian ber KB	286 Orang
8 Terwujudnya pelayanan publik oleh aparatur yang Profesional, dengan pelayanan yang cepat,	Penyediaan database kependudukan online	100.00 %
mudah, murah, nyaman dan ber- kualitas	2) Jumlah penduduk	190,737 Jiwa
	3) Laju pertumbuhan penduduk	3.83 %
	4) Rasio penduduk ber-KTP	1:1 Pddk
	5) Rasio keluarga ber-KK	1:1 KK
	6) Rasio bayi berakte kelahiran	1:1 Jiwa
	7) Jumlah kelurahan yang terlayani E-KTP	77 Kel.
	8) Jumlah penduduk miskin	6500 Jiwa
	9) Persentase penanganan kejadian kebakaran	100.00 %
	10) Persentase penanganan kejadian bencana alam	100.00 %
	11) Jumlah surat kabar nasional/lokal	10 Penerbit
	12) Jumlah penyiaran radio/tv lokal	9 Stas.
9 Peningkatan kemandirian masyara- kat melalui pengembangan eko-	Pemetaan potensi masyarakat pesisir	3 Keg.
nomi kerakyatan berbasis potensi pesisir, melalui pengembangan usaha mikro kecil, menengah,	Jumlah kelompok yang diberikan bantuan fasilitas bantuan dan peralatan	25 Klp.
koperasi yang mengarah pada produktifitas, dan kemampuan daya saing	 Jumlah kelompok pengolahan hasil produksi perikanan diberikan bantuan modal usaha dan pendampingan 	1 Klp.
	Pelaksanaan kerjasama dengan perguruan tinggi dan LSM dalam pendampingan pemberdayaan	1 Lemb.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
	 5) Peningkatan kunjungan wisatawan Lokal dan Manca Negara: WNI WNA 6) Terkendalinya harga kebutuhan pokok 7) Terpenuhinya kebutuhan sembilan bahan 	92350 Orang 800 Orang 12 Bulan 12 Bulan
	pokok 8) Meningkatnya produktifitas dan mutu produk usaha	5 Jenis
10 Tertanganinya permasalahan per- kotaan seperti menurunnya ke- sadaran spiritualitas keberagama- an, solidaritas sosial dan kesadar- an kebudayaan sebagai identitas	Penguatan kurikulum pendidikan agama dan kurikulum muatan lokal tentang budaya dan adat istiadat Ternate Jumlah Taman Pengajian Al-Quran	35.00 % 186 TPQ
daerah dan jati diri masyarakat, meningkatkan etos sosial, dan	3) STQ Tingkat Kota Ternate	7 Khafilah
optimalisasi penanggulangan masalah-masalah sosial seperti minuman keras, PSK, narkoba serta permasalahan sosial lainnya	4) Khafilah Kota Ternate pada STQ tingkat Provinsi Maluku Utara	22 Orang
seria permasaranan sesiar tahiniya	5) Pembinaan Khatib dan Imam	60 Orang
	6) Persentase Pelepasan calon jamaah haji dan penjemputan haji Kota Ternate	100.00 %
	7) Upaya pembinaan kerukunan antar umat beragama, antar suku, etnis dan subetnis	7 Kec.
	8) Pelestarian situs, artifak dan dokumen sejarah dan aset seni budaya Kota Ternate	14 Jenis
	9) Jaminan kesejahteraan Imam Masjid, Pendeta, Guru Mengaji, Guru TPA dan Pembimbing Jemaat	145 Orang
	10) Jaminan pelestarian adat dan budaya Ternate	4 Keg.
	11) Peningkatan kesadaran pemuda terhadap bahaya Narkoba	150 Orang

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
	12) Peningkatan kualitas sarana olahraga	4 Bh
	13) Jumlah atlit yang berprestasi pada kompetisi cabang olahraga unggulan	162 Orang
	14) Pemberantasan penyakit masyarakat	2 Jenis
	15) Peningkatan pemberdayaan kelembagaan sosial	50 Orang
	16) Pembinaan penyandang cacat dan trauma	4 Orang
	17) Bantuan tanggap darurat korban bencana alam sosial dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	2 Kel.
11 Tertanganinya masalah penegakan dan kepastian hukum di daerah,	1) Peninjauan kembali Peraturan Daerah	2 Perda
termasuk upaya mengadakan regulasi daerah yang mampu mendorong partisipasi publik yang	Pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	4 Kec.
dinamis dan konstruktif, serta re- gulasi untuk menjamin kualitas pelayanan publik	Pemeliharaan keamananan dan ketertiban masyarakat serta pencegahan tindak kriminal	4 Kec.
	4) Penegakan PERDA dan Peraturan pelaksana	4 Kec.
	5) Sertifikasi tanah bagi masyarakat kurang mampu	15 Orang
	6) Penyelesaian masalah hukum Pemda Kota Ternate	100.00 %

LAMPIRAN PENGUKURAN KINERJA

PENGUKURAN KINERJA

Pemerintah Kota : Ternate Tahun Anggaran : 2011

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 Percepatan pengembangan infrastruktur secara merata dan berkeadilan, terutama pada kecamatan-kecamatan di luar kawasan perkotaan untuk membuka keterisolasian,	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (pembangunan infrastruktur wilayah di kecamatan)	101,955.00 M	101,955.00 M	100.00
serta memungkinkan terjadinya mobilitas arus barang dan manusia yang mempercepat	2) Peningkatan pembangunan jalan	14,651.50 M	19,381.20 M	132.28
perkembangan secara merata pada semua wilayah kecamatan	3) Persentase pemenuhan kebutuhan jembatan	4.64 %	4.13 %	89.01
	4) Persentase jembatan dalam kondisi baik	82.68 %	82.68 %	100.00
	5) Pembangunan talud/turap/bronjong	51.00 M	46.00 M	90.20
	Cakupan pemerataan pelayanan air bersih kawasan dataran tinggi	3 Lokasi	3 Lokasi	100.00
	Cakupan pemerataan pelayanan listrik yang tidak terjangkau layanan PLN	1 Kel.	1 Kel.	100.00
Meningkatnya Sumber Daya Manusia, khususnya peningkatan derajat pendidikan	Peningkatan : Sarana Pendidikan	11 Jenis	11 Jenis	100.00
melalui perluasan akses pendidikan yang murah		150 Guru	120 Guru	80.00
dan terjangkau, sarana dan fasilitas yang memadai, tenaga guru yang cukup, dan mutu yang terus membaik	- Peningkatan mutu pendidikan	204 Guru	173 Guru	84.80

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Dana bantuan penunjang kegiatan sekolah (penunjang BOS) untuk mewujudkan pendidikan dasar yang berkualitas	134 Sekolah	134 Sekolah	100.00
	3) Penyediaan buku pelajaran di perpustakaan sekolah	1,670 Judul	1,670 Judul	100.00
	4) Pemberian beasiswa kepada siswa/mahasiswa berprestasi dan kurang mampu	2,594 Orang	2,594 Orang	100.00
	5) Pemberian beasiswa kepada guru berprestasi untuk melanjutkan studi	20 Orang	20 Orang	100.00
	Pemberian insentif kepada guru di daerah terpencil	309 Orang	309 Orang	100.00
	7) Angka melek huruf	19.97 Pddk	19.96 Pddk	99.95
	8) Angka rata-rata lama sekolah	12 Tahun	12 Tahun	100.00
	9) Angka partisipasi murni			
	- SD/MI/SDLB	87.50 %	87.75 %	100.29
	- SMP/MTs/SMPLB	88.00 %	88.26 %	100.30
	- SMA/SMK/MA/SMALB	70.50 %	70.83 %	100.47
	10) Angka partisipasi kasar			
	10) Angka partisipasi kasar - SD/MI/SDLB	94.00 %	94.37 %	100.39
	- SMP/MTs/SMPLB	90.00 %	92.17 %	100.39
	- SMA/SMK/MA/SMALB	88.00 %	88.03 %	100.03

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
·	11) Angka Putus Sekolah			
	- SD	0.09 %	0.04 %	155.56
	- SLTP	0.31 %	0.13 %	158.06
	- SLTA	0.32 %	0.17 %	146.88
	12) Rasio Guru/murid			
	- SD	1:32 Murid	1:18 Murid	115.22
	- SLTP	1:32 Murid	1:15 Murid	118.48
	- SLTA	1:32 Murid	1:14 Murid	119.57
	13) Rata-rata nilai UN dan UAS			
	a) SD/MI			
	- UN	4.00	4.00	100.00
	- UAS	6.50	7.25	111.54
	b) SMP/MTs			
	- UN	5.50	5.60	101.82
	- UAS	7.25	7.50	103.45
	c) SMA/MA/SMK			
	- UN	5.50	5.75	104.55
	- UAS	7.50	8.00	106.67
	14) Angka Kelulusan			
	- SD/MI	3,024 Orang	3,024 Orang	100.00
	- SMP/MTs	2,579 Orang	2,561 Orang	99.30
	- SMA/MA/SMK	2,449 Orang	2,419 Orang	98.78
	15) Rata-Rata Nilai Paket Ujian :			
	a) Paket A			
	- UN	5.50	6.00	109.09
	- UAS	7.00	7.00	100.00

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	b) Paket B - UN - UAS	5.50 7.00	6.50 7.25	118.18 103.57
	c) Paket C	,	, . <u></u> 2	105.57
	- UN	5.50	6.50	118.18
	- UAS	7.00	7.50	107.14
	16) Jumlah pengunjung layanan tetap dan layanan keliling perpustakaan daerah	6,500 Orang	7,182 Orang	110.49
	17) Persentase peningkatan jumlah koleksi buku di perpustakaan daerah	11.80 %	7.30 %	61.86
3 Meningkatnya Sumber Daya Manusia, melalui peningkatan derajat kesehatan dengan perluasan akses yang mudah,	Peningkatan : Jumlah sarana prasarana pelayanan kesehatan	51 Unit	51 Unit	100.00
murah, terjangkau, dukungan sarana dan	- Pelayanan dokter dan perawat	248 Orang	183 Orang	73.79
fasilitas memadai, ketersediaan dokter, tenaga kesehatan dan keperawatan yang cukup, dan mutu pelayanan yang terus	- Jumlah obat-obatan di Puskesmas/Pustu /Poskeskel	149 Jenis	149 Jenis	100.00
membaik	Pemberian insentif kepada bidan atau tenaga kesehatan di daerah terpencil	55 Orang	55 Orang	100.00
	Jumlah masyarakat miskin yang mendapat pelayanan Jamkesda	8,000 Orang	8,000 Orang	100.00
	Pelaksanaan kebijakan subsidi silang bagi pasien rawat inap	185 jiwa	185 Jiwa	100.00
	5) Angka Harapan Hidup	70.76 Tahun	66.38 Tahun	93.81

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	6) Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup	4/1000 KH	6,5/1000 KH	61.54
	7) Angka kematian ibu per 1.000 kelahiran hidup	78/100.000 KH	130/100.000 KH	60.00
	8) Persentase gizi buruk pada balita	0.80 %	0.50 %	137.50
	9) Persentase Kecamatan bebas rawan Gizi	0.86 %	0.50 %	141.86
	10) Persentase posyandu			
	- Purnama	50.00 %	57.14 %	114.28
	- Mandiri	7.00 %	10.00 %	142.86
	11) Persentase penduduk yang memanfaatkan Puskesmas	85.00 %	72.00 %	84.71
	12) Persentase persalinan oleh tenaga kesehatan	92.00 %	74.00 %	80.43
	13) Rasio puskesmas terhadap jumlah penduduk	1:23.215 PKM	1:23.215 PKM	100.00
	14) Penderita Malaria	10.00	29.00	
	- Annual Malaria incidence (AMI)	< 10‰ Jiwa	< 29‰ Jiwa	34.48
	- Annual parasite incidence (API)	< 1‰ Jiwa	< 2‰ Jiwa	50.00
	15) Angka kesakitan DBD/100.000 Jiwa	2,5/1000 Pddk	3,1/1000 Pddk	76.00
	16) Angka kesembuhan TBC	86.00 %	81.00 %	94.19
	17) Angka penanganan Penyakit Kusta	90.00 %	81.00 %	90.00

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4 Terwujudnya kebijakan Anggaran (APBD) yang proporsional dan Pro Rakyat yang diprioritaskan pada upaya pemenuhan	Penetapan One Village One Program (satu Kelurahan, satu Program Unggulan)	5.00 %	5.00 %	100.00
kebutuhan rakyat serta membiayai program	2) Pembangunan Infrastruktur lingkungan:			
pembangunan yang strategis, juga program	- MCK Komunal	19.35 %	16.13 %	83.36
populis yang menyentuh kebutuhan dasar	- Drainase /gorong-gorong	7,280.00 M	6,000.00 M	82.42
masyarakat, melalui desain program berbasis keswadayaan dan berciri budaya	- Pemenuhan kebutuhan jalan lingkungan	20.46 %	19.46 %	95.11
	Persentase pemberian santunan kematian bagi warga kurang mampu	20.00 %	20.00 %	100.00
	4) Bantuan pembinaan bagi generasi muda	10.00 %	15.00 %	150.00
	5) Persentase pemanfaatan Dana Pembangunan Kelurahan (DPK)	100.00 %	100.00 %	100.00
	Jumlah kelompok usaha ekonomi kelurahan simpan pinjam yang difasilitasi pembentukannya	5 Klp.	5 Klp.	100.00
	7) Jumlah Posyandu yang menerima bantuan	70 Posy.	70 Posy.	100.00
	8) Peningkatan pemahaman tentang perlindungan anak PUG	340 Orang	340 Orang	100.00
5 Tertatanya infrastruktur perkotaan sebagai kota jasa dan perdagangan dengan pemanfaatan ruang kota secara terpadu untuk mendukung interaksi spasial, mobilitas dan aktivitas perkotaan yang tertib menuju terwujudnya	Persentase penataan kawasan pasar gamala- ma, Tapak I Plus dan Tapak II dengan aksen- tuasi ornament kebudayaan lokal	25.00 %	25.00 %	100.00

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kota Ternate yang harmoni, sehat, aman, nyaman dan berciri budaya serta berwawasan lingkungan	Pengoptimalan pasar Bastiong, pasar Dufa- Dufa, pasar Kotabaru dan pasar Sasa sebagai pasar Tradisional	50.00 %	50.00 %	100.00
	Persentase penataan area depan Kedaton Kesultanan, lapangan Ngara Lamo, Dodoku Ali sebagai RTH berciri budaya	25.00 %	25.00 %	100.00
	4) Persentase pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	100.00 %	100.00 %	100.00
	5) Persentase pengendalian pemanfaatan ruang	100.00 %	100.00 %	100.00
	6) Dokumen perencanaan tata ruang	3 Dok.	3 Dok.	100.00
	7) Peningkatan program partisipatif untuk me- wujudkan Ternate sebagai Kota yang hijau, asri, bersih, nyaman dan ramah lingkungan	50 Kel.	40 Kel.	80.00
	8) Luas hutan yang terlindungi	4,403 Ha	4,403 Ha	100.00
	9) Perwujudan Ternate bebas sampah dan bebas banjir	4 Kec.	4 Kec.	100.00
	10) Persentase perusahan yang memiliki UKL-UPL	60 %	50 %	83.33
	11) Peningkatan penghijauan kota	3 Kec.	3 Kec.	100.00
	12) Peningkatan perlindungan dan konservasi SDA	3 Kec.	3 Kec.	100.00

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	13) Persentase tersedianya dokumen perencanaan			
	pembangunan:			
	- RKPD Kota Ternate tahun 2012	100.00 %	100.00 %	100.00
	- KUA PPAS dan KUA PPAS perubahan	100.00 %	100.00 %	100.00
	- RPJM Kota Ternate 2011-2015	100.00 %	100.00 %	100.00
	- Ranperda RPJP Kota Ternate	100.00 %	100.00 %	100.00
	14) Persentase tersedia data penunjang			
	perencanaan:			
	- Ternate dalam angka	100.00 %	100.00 %	100.00
	- Data Indikator ekonomi daerah Kota Ternate (PDRB dan Inflasi)	100.00 %	100.00 %	100.00
	- Monografi Kota Ternate tahun 2011	100.00 %	100.00 %	100.00
	- Standar satuan harga (SSH) Pemerintah	100.00 %	100.00 %	100.00
	Kota Ternate	100100 70	100100 //	100,00
	- Standar harga satuan bangunan negara	100.00 %	100.00 %	100.00
	(HSBGN) dan harga satuan kontruksi			
	Pemerintah Kota Ternate			
	15) Perda RTRW Kota Ternate	1 Dok.	1 Dok.	100.00
	16) Laporan pertanggungjawaban Walikota akhir tahun	1 Dok.	1 Dok.	100.00
	17) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2010	1 Dok.	1 Dok.	100.00
	18) Persentase penyediaan fasilitas penunjang aktivitas perhubungan laut	100.00 %	100.00 %	100.00

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	19) Persentase terminal penumpang dalam kondisi baik	70.00 %	70.00 %	100.00
	20) Persentse pelabuhan lokal dalam kondisi baik	100.00 %	100.00 %	100.00
	21) Persentase penyediaan fasilitas traffic light	100.00 %	100.00 %	100.00
	22) Jumlah fasilitas parkir yang tersedia	100.00 %	100.00 %	100.00
	23) Persentase jalan yang diberi pengaman	80.00 %	80.00 %	100.00
	24) Rasio jalan yang bermarka	100.00 %	100.00 %	100.00
6 Terwujudnya <i>good government</i> , dengan sumber daya aparatur yang profesional, kreatif, inovatif, yang mampu menjamin	Jumlah organisasi perangkat daerah yang efektif dan efisien	36 SKPD	41 SKPD	113.89
peningkatan kualitas pelayanan, akuntabilitas, dan kemandirian masyarakat	Jumlah PNS yang menerima Satya Lencana Karya Satya	315 Orang	315 Orang	100.00
	Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan formal	76 Orang	76 Orang	100.00
	Jumlah pegawai yang mengikuti pendikan non formal	104 Orang	104 Orang	100.00
	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	478 Orang	478 Orang	100.00
	4) Jumlah penyelesaian berkas kepegawaian	5 Jenis	5 Jenis	100.00

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	5) Jumlah LHP pemeriksaan reguler yang diterbitkan	25 LHP	20 LHP	80.00
	6) Jumlah LHP pemeriksaan khusus/kasus pengaduan yang diterbitkan	14 LHP	12 LHP	85.71
	7) Persentase penyelesaian temuan hasil pemeriksaan:			
	- Inspektorat Kota Ternate	30.00 %	7.86 %	26.20
	- Inspektorat Provinsi Maluku Utara	100.00 %	100.00 %	100.00
	- Itjen Kementrian	100.00 %	100.00 %	100.00
	8) Formasi dan evaluasi jabatan perangkat daerah	39 SKPD	39 SKPD	100.00
	9) Buku tupoksi perangkat daerah	75 Eksp	75 Eksp	100.00
	10) Buku tata naskah dinas	100 Eksp	100 Eksp	100.00
	11) Buku himpunan Perda dan Perwali	100 Eksp	100 Eksp	100.00
	12) Dokumen penetapan kinerja SKPD tahun 2011	75 Eksp	75 Eksp	100.00
	13) Penjaringan aspirasi masyarakat	7 Kec.	7 Kec.	100.00
	14) Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD dalam menunjang kinerja Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	25 Orang	25 Orang	100.00
	15) Persentase pemanfaatan dana partisipatif	100.00 %	100.00 %	100.00

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	16) Persentase peningkatan PAD	50.17 %	51.33 %	102.31
	17) Penerbitan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun 2010 tepat waktu	100.00 %	100.00 %	100.00
	18) Penetapan dokumen anggaran tepat waktu- APBD 2012- APBD Perubahan 2011	100.00 % 100.00 %	100.00 % 100.00 %	100.00 100.00
	19) Peningkatan manajemen aset daerah	75.00 %	75.00 %	100.00
7 Peningkatan kesejahteraan masyarakat Petani, Nelayan, Pekebun, Peternak, Buruh, dan Pekerja, Koperasi, Usaha Mikro Kecil	Jumlah Koperasi yang diberikan bantuan modal usaha	6 Кор.	6 Кор.	100.00
Menengah (UMKM), Pedagang Kaki Lima, dan pedagang tradisional, menuju pada kemandirian dan kemampuan memenuhi	Jumlah kelompok perempuan dan pemuda yang diberikan modal usaha	7 Klp.	7 Klp.	100.00
kebutuhan dasar (basic need)	Jumlah kursus dan pelatihan bagi pengangguran terbuka <i>unskill</i>	16 Orang	16 Orang	100.00
	4) Jumlah koperasi aktif	75 Kop.	87 Kop.	116.00
	5) Persentase pertumbuhan ekonomi	7.36 %	8.03 %	109.10
	6) Tingkat Inflasi	3.00 %	4.52 %	49.33
	7) Pendapatan perkapita	2,500,000.00 Rupiah	2,955,276.00 Rupiah	118.21
	8) Indeks pembangunan manusia (IPM)	74.62 %	76.93 %	103.10

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
, ,	9) Jumlah Koperasi yang berkualitas	12 Kop.	10 Кор.	83.33
	10) Jumlah UKM	8,000 UKM	8,282 UKM	103.53
	11) Nilai modal kerja dan investasi UKM	735,223,418,220 Rp	748,123,416,220 Rp	101.75
	12) Nilai omzet UKM	1,278,397,557,270 Rp	1,388,947,557,270 Rp	108.65
	13) Penyerapan tenaga kerja	30.00 %	30.03 %	100.10
	14) Tingkat pengangguran terbuka	10.42 %	8.66 %	120.32
	15) Peningkatan pengembangan informasi pasar kerja	10 Perus.	10 Perus.	100.00
	16) Peningkatan pengembangan sarana dan prasarana sektor formal	5 Klp.	5 Klp.	100.00
	17) Penataan pedagang kaki lima	5 Lokasi	5 Lokasi	100.00
	18) Tersalurnya RASKIN	7 Kec.	7 Kec.	100.00
	19) Operasi pasar murah	3 Kec.	3 Kec.	100.00
	20) Peningkatan produksi pangan	57.50 Ton	57.50 Ton	100.00
	21) Peningkatan produksi tanaman holtikultura	156.4 Ton	131.3 Ton	83.95
	22) Peningkatan produksi peternakan	4,520 Ekor	4,520 Ekor	100.00

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	23) Meningkatnya produksi perkebunan	8.00 Ton	8.00 Ton	100.00
	24) Persentase tertanggulanginya penyakit ternak	100.00 %	100.00 %	100.00
	25) Berkembangnya usaha agribisnis	20 Kel.	20 Kcl.	100.00
	26) Peningkatan keikutsertaan masyarakat dalam ber KB	23.67 %	25.27 %	106.76
	27) Jumlah sarana prasarana KB dan KS	124 Unit	124 Unit	100.00
	28) Meningkatnya ketahanan keluarga dalam peningkatan kesertaan, pembinaan dan kemandirian ber KB	286 Orang	286 Orang	100.00
8 Terwujudnya pelayanan publik oleh aparatur yang Profesional, dengan pelayanan yang	1) Penyediaan database kependudukan online	100.00 %	100.00 %	100.00
cepat, mudah, murah, nyaman dan berkualitas	2) Jumlah penduduk	190,737 Jiwa	190,184 Jiwa	99.71
	3) Laju pertumbuhan penduduk	3.83 %	3.53 %	92.17
	4) Rasio penduduk ber-KTP	1:1 Pddk	1:0,90 Pddk	90.00
	5) Rasio keluarga ber-KK	1:1 KK	1:0,77 KK	76.13
	6) Rasio bayi berakte kelahiran	1:1 Jiwa	1:0,47 Jiwa	47.00
	7) Jumlah kelurahan yang terlayani e-KTP	77 Kel.	65 Kel.	84.42
	8) Jumlah penduduk miskin	6,500 Jiwa	6,500 Jiwa	100.00

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	9) Persentase penanganan kejadian kebakaran	100.00 %	100.00 %	100.00
	10) Persentase penanganan kejadian bencana alam	100.00 %	100.00 %	100.00
	11) Jumlah surat kabar nasional/lokal	10 Penerbit	10 Penerbit	100.00
	12) Jumlah penyiaran radio/tv lokal	9 Stas.	9 Stas.	100.00
Peningkatan kemandirian masyarakat melalui pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis	Pemetaan potensi masyarakat pesisir	3 Keg.	3 Keg.	100.00
potensi pesisir, melalui pengembangan usaha mikro kecil, menengah, koperasi yang mengarah pada produktivitas, dan kemampuan	Jumlah kelompok yang diberikan bantuan fasilitas bantuan dan peralatan	25 Klp.	25 Klp.	100.00
daya saing	Jumlah kelompok pengolahan hasil produksi perikanan diberikan bantuan modal usaha dan pendampingan	1 Klp.	l Klp.	100.00
	Pelaksanaan kerjasama dengan perguruan tinggi dan LSM dalam pendampingan pemberdayaan	1 Lemb.	1 Lemb.	100.00
	5) Peningkatan kunjungan wisatawan Lokal dan Manca Negara :			
	- WNI	92,350 Orang	92,385 Orang	100.04
	- WNA	800 Orang	831 Orang	103.88
	6) Terkendalinya harga kebutuhan pokok	12 Bulan	12 Bulan	100.00
	Terpenuhinya kebutuhan sembilan bahan pokok	12 Bulan	12 Bulan	100.00

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Meningkatnya produktifitas dan mutu produk usaha	5 Jenis	5 Jenis	100.00
Tertanganinya permasalahan perkotaan seperti menurunnya kesadaran spiritualitas keberagamaan, solidaritas sosial dan kesadaran kebudayaan sebagai identitas daerah dan jati diri masyarakat, meningkatkan etos sosial, dan optimalisasi penanggulangan masalahmasalah sosial seperti minuman keras, PSK, narkoba serta permasalahan sosial lainnya	Penguatan kurikulum pendidikan agama dan kurikulum muatan lokal tentang budaya dan adat istiadat Ternate	35.00 %	40.00 %	114.29
	2) Jumlah Taman Pengajian Al-Quran	186 TPQ	186 TPQ	100.00
	3) STQ Tingkat Kota Ternate	7 Khafilah	7 Khafilah	100.00
	4) Khafilah Kota Ternate pada STQ tingkat Provinsi Maluku Utara	22 Orang	22 Orang	100.00
	5) Pembinaan Khatib dan Imam	60 Orang	60 Orang	100.00
	Persentase Pelepasan calon jamaah haji dan penjemputan haji Kota Ternate	100 %	100 %	100.00
	7) Upaya pembinaan kerukunan antar umat beragama, antar suku, etnis dan subetnis	7 Kec.	7 Kec.	100.00
	Pelestarian situs, artifak dan dokumen sejarah dan aset seni budaya Kota Ternate	14 Jenis	14 Jenis	100.00
	9) Jaminan kesejahteraan Imam Masjid, Pendeta, Guru Mengaji, Guru TPA dan Pem- bimbing Jemaat	145 Orang	145 Orang	100.00
	10) Jaminan pelestarian adat dan budaya Ternate	4 Keg.	4 Keg.	100.00

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	11) Peningkatan kesadaran pemuda terhadap bahaya Narkoba	150 Orang	150 Orang	100.00
	12) Peningkatan kualitas sarana olahraga	4 Bh	4 Bh	100.00
	13) Jumlah atlit yang berprestasi pada kompetisi cabang olahraga unggulan	162 Orang	162 Orang	100.00
	14) Pemberantasan penyakit masyarakat	2 Jenis	2 jenis	100.00
	15) Peningkatan pemberdayaan kelembagaan sosial	50 Orang	50 Orang	100.00
	16) Pembinaan penyandang cacat dan trauma	4 Orang	4 Orang	100.00
	17) Bantuan tanggap darurat korban bencana alam sosial dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	2 Kel.	2 Kel.	100.00
11 Tertanganinya masalah penegakan dan kepastian hukum di daerah, termasuk upaya mengadakan regulasi daerah yang mampu mendorong partisipasi publik yang dinamis dan konstruktif, serta regulasi untuk menjamin kualitas pelayanan publik	1) Peninjauan kembali Peraturan Daerah	2 Perda	2 Perda	100.00
	Pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	4 Kec.	4 Kec.	100.00
	Pemeliharaan keamananan dan ketertiban masyarakat serta pencegahan tindak kriminal	4 Kec.	4 Kec.	100.00
	4) Penegakan PERDA dan Peraturan pelaksana	4 Kcc.	4 Kcc.	100.00

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	5) Sertifikasi tanah bagi masyarakat kurang mampu	15 Orang	15 Orang	100.00
	6) Penyelesaian masalah hukum Pemda Kota Ternate	100.00 %	66.00 %	66.00